GERAKAN PERBUM

DAN

ASPEK-ASPEKNYA DALAM INDUSTRI MINYAK

DI

INDONESIA

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
JAKARTA, 1972

Dipindai dengan CamScanner

GERAKAN PERBUM DAN ASPEK-ASPEKNYA DALAM INDUSTRI MINYAK DI INDONESIA

Dipindai dengan CamScanner

08 februari 2024

Sugeng Riyadi

GERAKAN PERBUM

DAN

ASPEK-ASPEKNYA DALAM INDUSTRI MINYAK

DI

INDONESIA

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
JAKARTA, 1972

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar Direktur Utama Pertamina xi

Pendahuluan 1

Bab I **Profil PKI** 3
1. Lahirnya PKI 3
2. Pemberontakan ke-I PKI 3
3. FDR lahir 4
4. Muso dan "Jalan Baru"-nya 5
5. Pemberontakan ke-II PKI 6
6. Lahirnya CC-PKI pimpinan Aidit 7
7. Sesudah tahun 1951 9

Bab II **Gerakan Buruh Indonesia sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan** 11
1. U m u m 11
2. Zaman Penjajahan (1905 - 1945) 12
3. Zaman Kemerdekaan 19
   A. Periode Tahun 1945 - 1950 19
   B. Periode Tahun 1950 - 1965 23
   C. Periode Tahun 1965 - sekarang 25

Bab III **Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Gerakan Buruh** 29
1. Sebelum Tahun 1965 29
2. Sesudah Tahun 1965 32

Bab IV **Gerakan Perbum** 34
1. Perkembangan yang paralel 34
2. Infiltrasi SOBSI 37
3. K A B M 38
4. Kongres Fusi Perbum 39
5. Keanggotaan dan kepemimpinan Perbum 43

Dipindai dengan CamScanner

Halaman

6. Merebut Massa 50
7. Perbumisasi PN PERMIGAN 54
8. Proloog G.30.S/PKI 58
9. Epiloog G.30.S/PKI 61

Lampiran I — IV/1 - 2 65
Singkatan 80
I n d e k 82
Bibliografi 88

Dipindai dengan CamScanner

"Pemberontakan PKI yang kedua pada tahun 1965 merupakan lembaran yang paling hitam dalam sejarah kemerdekaan kita, meninggalkan luka-luka yang sangat dalam pada tubuh Bangsa kita, bekas luka-luka itu masih tergores sampai sekarang.

Tetapi kita telah bertekad agar malapetaka seperti itu tidak terulang lagi untuk selama-lamanya ....."

Amanat Presiden Soeharto

Pada Upacara Peresmian Keanggotaan MPR

Pada tanggal 1 Oktober 1972

Dipindai dengan CamScanner

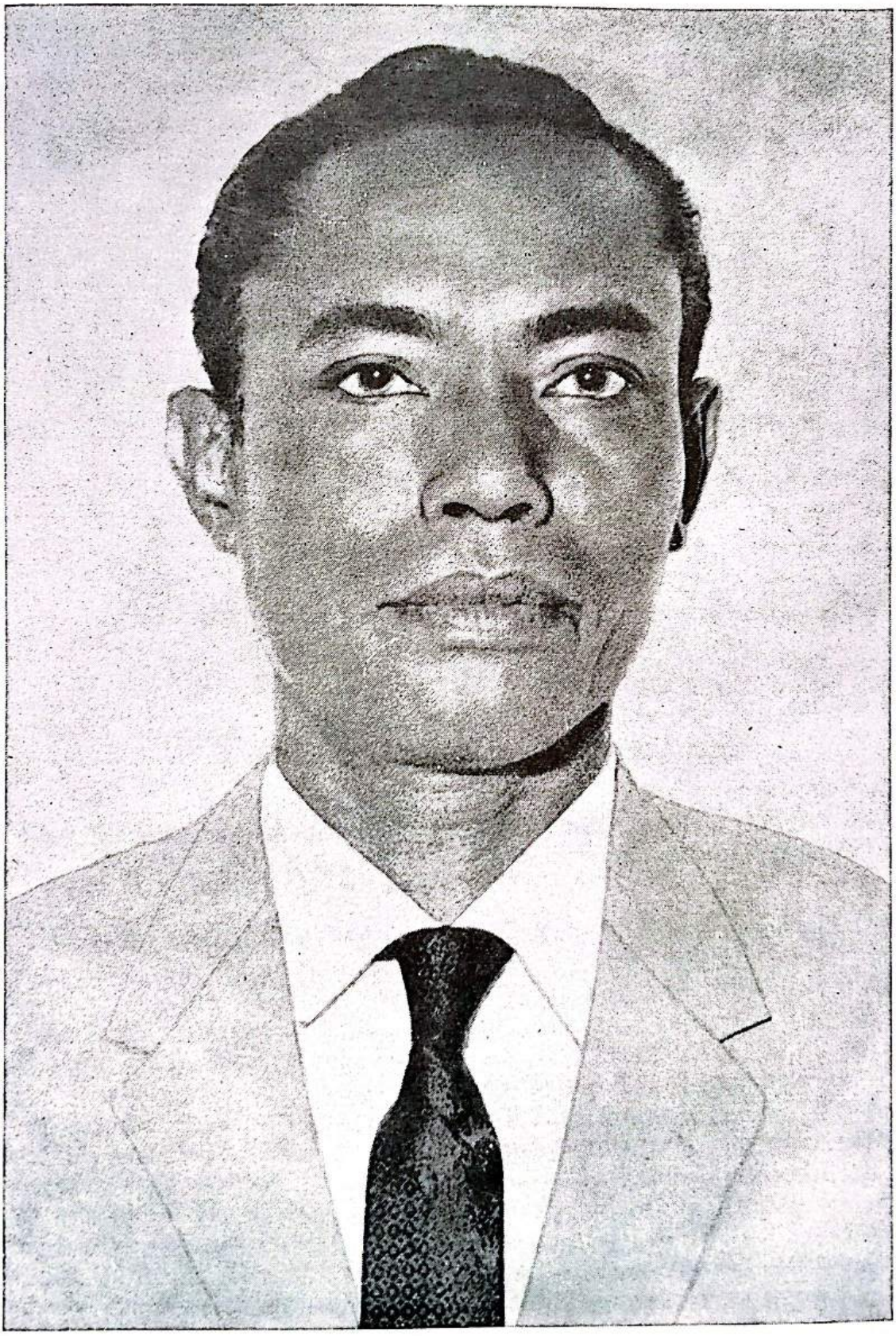

Letnan Jenderal T.N.I. Dr. H. Ibnu Sutowo

Dipindai dengan CamScanner

KATA - PENGANTAR

Ketika saya berbicara didepan peserta Upgrading Pengetahuan Umum/Mental Angkatan ke-III di Cepu pada tanggal 20 Pebruari 1967, antara lain saya menyatakan, bahwa tidak dapat disangkal, selama masa proloog peristiwa G.30.S/PKI sedikit-dikitnya telah mempengaruhi cara berpikir maupun pandangan hidup kita. Selama dalam masa periode tertentu kita telah sama-sama mengalami dan menyaksikan suatu penyimpangan daripada ideologi Negara. Suatu petualangan dalam lapangan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pendidikan dan telah berlaku secara besar-besaran dan hebat sekali. Apa sebab penyimpangan ideologi dan petualangan politik itu dikatakan hebat sekali ? Ialah karena telah dilaksanakan oleh satu ideologi politik yang besar serta kuat. Disamping itu, karena penyimpangan tersebut telah dilakukan secara berencana.

Penyimpangan atau penyelewengan ideologi dengan macam-macam dialektik dan teori untuk membelokkan Pancasila kepada Marxisme. Hal tersebut berpangkal kepada suatu keadaan dimana negara kita akan dimasukkan kedalam orbit komunisme.

Jelas bahwa tujuan itu telah direncanakan sejak lama dan untuk ini dipraktekkan semua pengalaman dan taktik yang telah berhasil baik dan mencapai tujuannya dibeberapa negara.

Demikian pula kejadiannya ditanah air kita sebagaimana kita persaksikan sendiri kehebatannya dan telah berlaku dengan rapi sekali. Kita semuanya satu persatu telah menjadi objek daripadanya dan telah mengalami akibatnya.

Maka, usaha Saudara R. Suhardi, Kepala Divisi Personalia & Organisasi Pertamina Pusat menyusun suatu risalah mengenai "Gerakan Perbum Dan Aspek-Aspeknya Dalam Industri Minyak di Indonesia" adalah tepat sekali. *Pertama,* karena risalah ini dikeluarkan dalam suasana peringatan "Hari Kesaktian Pancasila". Dus, akan mempunyai nilai sejarah yang tersendiri terutama dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan Nasional. *Kedua,* tidak banyak atau kalau tidak dikatakan belum ada, literatur yang secara khusus menyingkapkan bagaimana peranan, program dan taktik-taktik kaum komunis dalam usahanya untuk menguasai dunia perminyakan kita melalui mantel organisasi Perbum/SOBSI. *Ketiga,* risalah ini juga mencoba mengungkapkan latar-belakang gerakan perburuhan secara "Indonesia-wide", sehingga akan memudahkan kita untuk melakukan suatu comparative- study, agar kita dapat menentukan arah atau policy perburuhan yang paling tepat bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Disamping itu kiranya

Dipindai dengan CamScanner

kita perlu menyadari, bahwa setiap peristiwa sejarah adalah merupakan rentetan phenomena-phenomena yang akan berputar kembali, cepat atau lambat. Karenanya, dengan mengetahui gerakan Perbum yang penulisannya diusahakan secara autentik, kita akan dapat memawas diri agar "tidak kehilangan tongkat untuk kedua kalinya". Disinilah saya menekankan arti penting penulisan sejarah "gerakan Perbum" ini, untuk menjadi bahan studi bagi kita sekalian, dan juga bagi generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, risalah ini tidak saja berguna dibaca dikalangan Pertamina sendiri, tetapi kiranya juga oleh instansi-instansi lain terutama yang ada hubungannya dengan dunia perburuhan.

Dan akhirnya, kepada semua pihak yang telah ikut serta menyumbangkan pikiran dan saran-sarannya dalam penyusunan risalah ini, maka dengan ini teriring ucapan terima-kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 1 Oktober 1972

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
(P E R T A M I N A)

Direktur Utama,

Dr. H. IBNU SUTOWO
LETNAN JENDRAL TNI

PENDAHULUAN

Risalah ini dipersiapkan lebih kurang selama dua bulan, yaitu dalam bulan Agustus dan September 1972. Methode penelitian yang digunakan ialah observasi, interview dan kepustakaan. Khususnya dalam melakukan interview, tidak terbatas pada para pejabat perusahaan yang masih aktip dan dianggap mengetahui masalahnya. Tetapi juga melakukan interview dengan para pensiunan Pertamina yang dahulunya ikut berproses dalam masalah-masalah perburuhan. Untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih luas dilakukan interview dengan beberapa pejabat Departemen Tenaga Kerja, baik yang masih aktip maupun yang sudah pensiun. Disamping itu juga terhadap beberapa pemimpin atau ex-pemimpin gerakan buruh, terutama dibidang perminyakan. Seluruhnya berjumlah 33 orang. Adapun tempat-tempat atau unit-unit perminyakan yang diteliti ialah Plaju, Sei Gerong, Wonokromo, Surabaya, Cepu, Balikpapan, Banjarmasin dan Jakarta. Diseluruh Indonesia ada 28 organisasi tingkat Cabang Perbum. Jadi tidak semua tempat diteliti. Tetapi tempat-tempat atau unit yang diriset telah dipilih begitu rupa sehingga hasil riset ini dapat mencerminkan mengenai apa, bagaimana dan "siapa" Perbum itu. Pemilihan tempat-tempat riset diatas juga akan dapat menggambarkan aspek-aspek dan gejala-gejala umum sosial maupun politis dari perindustrian minyak di Indonesia dari awal perkembangan sampai meletusnya peristiwa G.30.S/PKI tahun 1965.

Apabila kita membicarakan masalah Perbum atau gerakan Perbum di Indonesia, maka bukan saja masalah-masalah sosial-ekonomi yang tersangkut didalamnya, tetapi juga akan menyangkut masalah-masalah politik. Sebagaimana diketahui, Perbum adalah organisasi mantel dari PKI dibidang industri minyak. Sebagai partai politik yang kuat, PKI pernah memainkan peranan penting di Indonesia. Oleh karena itu, mengetahui masalah PKI akan memudahkan jalan untuk mengetahui masalah Perbum.

Demikianlah, sekedar untuk mengetahui latar-belakang PKI dan peranannya dalam penentuan taktik dan strateginya dibidang politik — *secara kronologis* dicantumkan dalam Bab I.

Dan sudah tentu yang sangat erat hubungannya dengan pokok risalah ini ialah perihal gerakan perburuhan di Indonesia. Dalam Bab II dicoba untuk menggambarkan perkembangan gerakan perburuhan pada umumnya, sejak awal sampai tahun ini. Mengenai sikap Pemerintah Indonesia terhadap gerakan buruh dicantumkan

Dipindai dengan CamScanner

pada Bab III. Sedangkan mengenai "Perbum" dan aspek-aspeknya yang timbul dalam gejala industri minyak ditempatkan pada Bab IV.

Risalah ini tidak dimaksudkan untuk memberikan suatu hasil penelitian, analisa ataupun pandangan yang luas serta lengkap, tetapi sekedar memberikan gambaran mengenai "gerakan Perbum dan aspek-aspeknya dalam industri minyak di Indonesia". Tujuan sebenarnya ialah membantu para pembaca risalah ini dalam melakukan suatu "comparative study" dibidang perburuhan. Disamping itu penyajiannya dimaksudkan sebagai pengungkapan terhadap praktek dan sepak terjang Perbum selama ini, sehingga dengan demikian kita dimasa datang akan lebih dapat memawas diri mengenai gerakan komunis pada umumnya. Patut kiranya disinggung dalam pendahuluan ini pendapat David Galula dalam bukunya "Counter Insurgency Warfare", yang mengingatkan kita akan beberapa faktor mengapa perkembangan gerakan komunis menjadi pesat disuatu negara. Dari tulisan itu dapat disarikan sebagai berikut :

1. Adanya keyakinan dasar kaum komunis, bahwa perjuangan mereka untuk membentuk masyarakat komunis pasti tercapai.
2. Kondisi yang lemah dari suatu negara dimana mereka bergerak :
   a. lemah dalam sosial-ekonomi;
   b. terbelakang dalam pendidikan;
   c. belum bulatnya tujuan masa depan bangsa dan negara itu;
   d. kurangnya kematangan, kedewasaan dan ketabahan dari pemimpin-pemimpin;
   e. kurangnya pengetahuan tentang taktik dan strategi gerakan komunis.
3. Kondisi geographis suatu negara, misalnya ada tidaknya hutan-hutan, rawa-rawa atau gunung-gunung dan sebagainya yang mudah untuk persembunyian suatu "perang gerilya".
4. Bantuan dari luar, berupa bahan-bahan bacaan ataupun materiil, tenaga-tenaga ahli dan sebagainya.

Kiranya dengan adanya risalah ini akan menambah pengetahuan kita mengenai gerakan kaum komunis di Indonesia, terutama gerakan mereka dibidang perminyakan.

Dipindai dengan CamScanner

I

PROFIL PKI

1. Lahirnya PKI

Seorang sosialis Belanda bernama H.F.J.M. Sneevliet membawa bibit komunisme pada tahun 1914, dimulai dikota Semarang. Ia bersama-sama J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, P. Bergsma dalam bulan Mei tahun itu bertempat di Surabaya mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging). Pada tahun 1917, ia membangun suatu jaringan dilingkungan Sarekat Islam (berdiri tahun 1911) melalui Semaun sebagai Ketua Cabang SI Semarang, dan Darsono seorang wartawan SI. Kedua orang itu kemudian dijadikan anggota ISDV disamping masih berfungsi sebagai anggota dan pimpinan SI. Mereka merupakan "ikat pinggang" pertama yang menghubungkan gerakan Marxist di Barat dengan massa rakyat di Indonesia.

Pada tahun 1918 dalam SI timbul perpecahan menjadi dua aliran :

a. Aliran Islam, dibawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Abdul Muis dan lain-lain.
b. Aliran Marxisme, dibawah pimpinan Semaun, Darsono, Tan Malaka, Muso dan lain-lain. Semaun menamakannya "Golongan Revolusioner Sosial".

Pada tahun 1920 ISDV pecah :

a. Sayap kanan menjadi ISDP (Indische Sociaal Democratische Partij) atau SDAP (Sociaal Democratische van de Arbeid Partij) dibawah pimpinan Amir Dahlan (P.F. Dahler).
b. Sayap kiri ISDV bersama-sama sayap kiri dalam SI menjadi Sarekat Merah/Sarekat Rakyat.

Setelah adanya Komintern ke-III (Kongres Komunis Internasional) tanggal 5 Maret 1919 di Moskow, dan seruan Lenin agar semua aliran komunis didunia menggunakan nama Partai Komunis, maka di Indonesia lahirlah Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 23 Mei 1920 sebagai penjelmaan dari Sarekat Merah. Pertemuan yang bersejarah ini mengambil tempat digedung SI Cabang Semarang. Pimpinannya yang pertama ialah : Ketua Semaun, Wakil Ketua Darsono, Sekretaris Bergsma, Bendahara Dekker, dan Anggota Baars.

2. Pemberontakan ke-I PKI

Tanggal 12 Nopember 1926 PKI memberontak terhadap Pemerintah Hindia Belanda, tetapi gagal. Massa rakyat tidak berhasil

Dipindai dengan CamScanner

digerakkan. Lebih kurang 1300 orang dikirimkan ke Digul. Sejak kegagalan itu PKI bergerak illegal sampai tahun 1946. Para aktivisnya ada yang menginfiltrir pergerakan-pergerakan yang bersifat nasional seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan lain-lain, tetapi ada yang dibuang keluar negeri.

Setelah RI diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pimpinan dan kader PKI yang diluar negeri berdatangan kembali masuk Indonesia.

Seperti halnya di negeri muda yang baru muncul, maka perpecahan politik berlangsung dengan tajam. Selama dua tahun sejak RI berdiri sudah berganti lima kali pembentukan kabinet. Kabinet ke-V dibentuk pada tanggal 3 Juli 1947 dengan Perdana Menteri Mr. Amir Syarifuddin, yaitu satu-satunya kabinet RI dibawah pimpinan seorang komunis. Kabinet Amir Syarifuddin berhasil menciptakan :

a. TNI Masyarakat diluar Tentara Nasional Indonesia.
b. Mengirimkan Mr. Suripno kenegara Cekoslovakia (Praha) dalam rangka membuka hubungan konsuler dengan Uni Soviet.
c. Melahirkan perjanjian "Renville".

Kabinet Amir jatuh pada tanggal 17 Januari 1948 akibat hebatnya oposisi (terutama Masyumi cs.) dan diganti oleh Kabinet Hatta.

Tanggal 12 Pebruari 1948 Partai Sosialis pecah menjadi dua, yaitu :

a. Partai Sosialis pimpinan Mr. Amir Syarifuddin.
b. Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan Sutan Syahrir.

3. FDR lahir

Pada tanggal 26 Pebruari 1948 Front Demokrasi Rakyat (FDR) lahir sebagai gabungan dari sayap kiri yang terdiri dari P.K.I., Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis. FDR menjalankan oposisi terhadap Kabinet Hatta. Program rasionalisasi terhadap Angkatan Perang dari Kabinet Hatta dijadikan bahan agitasi untuk menarik simpati dan dukungan dari tentara. Pihak FDR sadar bahwa dengan program rasionalisasi itu, maka kaum komunis yang ada dalam TNI akan terkena rasionalisasi. Untuk menjatuhkan Kabinet Hatta dilancarkan demonstrasi-demonstrasi dan pemogokan-pemogokan. Pemogokan terbesar dilakukan oleh 20.000 buruh dan petani kapas di Delanggu dibawah pimpinan SOBSI [1]).

---

1) SOBSI = Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, selanjutnya lihat hal. 20.

Dipindai dengan CamScanner

FDR menyusun "4-program perjuangan"; salah satu diantaranya ialah melakukan nasionalisasi semua modal milik Belanda. SOBSI dan BTI [1]) adalah pendukung utama program FDR. Untuk mencapai maksudnya, FDR bertekad membangun Tentara Rakyat secara illegal.

4. Muso dan "Jalan Baru"-nya

Pada tanggal 21 Juni 1948 Hatta memanggil kembali Mr. Suripno dari Praha. Ia diikuti oleh seorang yang menyamar sebagai sekretaris. "Sekretaris" yang bernama Suparto ini tidak lain adalah Muso, yang tiba di Bukit Tinggi tanggal 3 Agustus 1948. Sejak tahun 1936 dia berada diluar negeri (Moskow). Muso adalah arsitek pemberontakan ke-I PKI tahun 1926 yang gagal.

Tanggal 13 Agustus 1948 Muso yang sudah diserahi memimpin FDR menemui Bung Karno, untuk menyampaikan kritiknya terhadap Kabinet Hatta.

Dalam waktu yang cukup singkat, Muso menfusikan partai-partai yang tergabung dalam FDR menjadi "PKI yang diperluas". Tanggal 1 September 1948 Politbiro PKI diumumkan. Sekretaris Jendral terdiri dari : Muso, Maruto Darusman, Tan Ling Jie, Ngadiman. Sekretaris Buruh : A. Cokronegoro, D.N. Aidit, Sutrisno.

Konsep Muso yang terkenal ialah "Jalan Baru Untuk Republik Indonesia" atau "Jalan Baru". Didalamnya antara lain disebutkan :

— tentara harus dipimpin oleh kader-kader yang progresip.

— front nasional atau front persatuan nasional harus segera dibentuk, karena merupakan senjata revolusi.

— kabinet Hatta harus segera diganti dengan Pemerintah Front Nasional.

Tanggal 3 September 1948 Muso menandaskan didepan rapat BTI Yogyakarta, bahwa dunia ini terbagi menjadi dua blok yang bertentangan. Blok imperialis dan anti-demokrasi dibawah pimpinan Amerika Serikat dan blok anti-imperialis dan demokratis dibawah Uni Soviet. Indonesia tidak dapat netral dan harus menentukan pilihannya.

Tanggal 5 September 1948 Muso menandaskan didepan rapat Federasi Mahasiswa Yogyakarta, bahwa "Indonesia yang sedang berjuang melawan imperialis tidak mungkin bisa hidup berdampingan dengan imperialis itu sendiri. Indonesia harus bersekutu dengan kekuatan yang berjuang melawan imperialisme, dan ini berarti bersekutu dengan Uni Soviet".

---

1) BTI = Barisan Tani Indonesia juga organisasi mantel PKI.

Dipindai dengan CamScanner

5. Pemberontakan ke-II PKI

Menjelang meletusnya peristiwa Madiun 18 September 1948, Muso telah mengadakan rapat keliling dikota-kota Sala, Madiun, Kediri, Jombang dan Bojonegoro. Tanggal 16 September 1948 ketika diadakan rapat umum di Cepu, "Lasykar Minyak" yang terdiri dari sebagian besar buruh minyak Cepu merupakan pasukan yang telah siap mendukung "komando terakhir" Muso.

Melalui corong "Radio Gelora Pemuda" Madiun, Muso mengemukakan idea-ideanya, antara lain ia berkata :

> "Pengalaman di Burma, Indo China, Republik Rakyat Tiongkok dan sebagainya, lebih meyakinkan saya, bahwa revolusi kami harus berada ditangan kaum proletar ..... Soviet Uni adalah pemimpin revolusi dunia, daripadanya revolusi kita lahir. Konsekwensinya, kita semua dipimpin oleh Soviet Uni....."

Dalam pada itu SOBSI yang menjadi tulang punggung kekuatan PKI melancarkan serangan kepada kabinet Hatta dengan "5-Anti"-nya melawan imperialis, yaitu :

1. Anti-imperialisme berarti kebebasan demokrasi, bebas menerbitkan surat-kabar, bebas berkumpul, bebas mengadakan demonstrasi-demonstrasi dan pemogokan-pemogokan.
2. Anti-imperialisme berarti lenyapnya korupsi.
3. Anti-imperialisme berarti ketahanan nasional ..... rakyat adalah tentara.
4. Anti-imperialisme berarti pembatalan perjanjian Linggarjati dan Renville.
5. Anti-imperialisme berarti pemerintahan yang bertanggungjawab, didukung oleh Front Nasional, menggantikan Kabinet Hatta [1]).

Sementara Muso dan Amir Syarifuddin melakukan kampanye keliling didaerah-daerah yang penduduknya banyak terdiri kaum komunis dan simpatisannya, maka pimpinan PKI yang terdiri dari Alimin, Sakirman, Tan Ling Jie dan Abdulmajid mendekati pimpinan Masyumi dan PNI untuk membentuk "Front Persatuan Nasional". Masyumi dan PNI menolak ajakan PKI tersebut. Kedua partai ini kemudian secara demonstratip di Yogyakarta menunjukkan dukungannya kepada kabinet Hatta.

Tanggal 18 September, di Madiun diletuskan 3 kali tembakan pistol sebagai tanda-dimulainya perjuangan PKI tidak melalui jalan parlementer. Gedung-gedung vital seperti Radio Madiun,

---

1) Arnold C. Brackman, INDONESIAN COMMUNISM a history, Cetakan ke-III 1963, halaman 90.

Dipindai dengan CamScanner

kantor pos dan telepon, pos polisi, bank dan termasuk Markas Komando Daerah Militer diduduki komunis. Bendera merah dikibarkan dibalai-kota. Muso memproklamirkan "Republik Soviet Indonesia".

Dikota Cepu, "Lasykar Minyak" menduduki Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN). Semua pimpinan paberik yang kelihatannya tidak mendukung pemberontakan Madiun dilucuti pakaiannya dan ditahan dalam paberik. Ada sebagian pimpinan yang ikut pasukan "LM", tetapi ada yang langsung dibunuhnya. Kota Cepu diduduki oleh pasukan komunis. Tetapi kurang dari satu hari sudah dapat direbut kembali oleh Batalyon Ronggolawe dibawah pimpinan Mayor Sudono.

Pemerintah RI bertindak cepat dan tegas. Tentara Republik yang setia dikerahkan dibawah pimpinan Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto. Dalam waktu singkat Madiun direbut kembali. Dalam pertempuran itu Muso tewas. Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi, kemudian ditembak mati di Sala.

6. Lahirnya CC-PKI pimpinan Aidit

Setelah gagal melakukan terror Madiun, PKI kembali bergerak dibawah tanah menyusun kekuatan baru. Sementara itu berdasarkan hasil perjanjian "Konperensi Meja Bundar" (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Indonesia dibawah Presiden Sukarno seluruhnya pindah ke Jakarta. Kehidupan politik dengan sendirinya kembali berpusat di Jakarta. Berbeda setelah gagal melakukan pemberontakan dalam peristiwa G.30.S tahun 1965, dimana PKI kemudian dibubarkan oleh Pemerintah, maka pada tahun 1948 itu PKI tidak dibubarkan. Usaha menyusun kekuatan baru tampaknya lambat laun berhasil. Pada awal bulan Januari 1951 PKI berhasil membentuk politbiro Central Committee (CC) baru dibawah pimpinan D.N. Aidit. Tugas pertama politbiro ini ialah melaksanakan "Jalan Baru"-nya Muso, yaitu supaya hanya ada satu partai klas buruh tipe Lenin, yaitu PKI. Oleh karena itu, resolusi pertama PKI pada waktu itu berbunyi : bubarkan Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia [1]).

Disamping itu CC-PKI dibawah pimpinan Aidit mempertegas kembali "program 4 pasal" yang disebutkan sebagai berikut [2]) :

1. Indonesia sekarang adalah negeri yang belum merdeka penuh dan masih setengah feodal. Musuh rakyat Indonesia yang pertama adalah imperialisme. Tadinya imperialisme Belanda, sekarang imperialisme Amerika Serikat.

---

1) Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia bersama-sama PKI adalah pembentuk FDR tahun 1948.

2) M. H. Lukman, dalam majalah "Bintang Merah", Tahun XX Maret 1964, hal. 10-12.

Dipindai dengan CamScanner

2. Perlunya mencapai kemerdekaan nasional yang penuh dan perubahan-perubahan demokratis untuk mendirikan suatu Pemerintah Demokrasi Rakyat yang mampu menghapuskan kekuasaan imperialisme dan sisa-sisa feodalisme. Membersihkan tuan tanah, kaum komprador dan kapitalis birokrat. Menghapuskan keadaan melarat, terbelakang dan pincang.
3. Pembentukan Front Persatuan Nasional atas dasar persekutuan klas buruh dan kaum tani untuk melawan musuh-musuh asing. Jalan keluarnya *terletak dalam membangkitkan, memobilisir dan mengorganisir massa,* terutama kaum buruh dan tani.

   Dalam Front Persatuan Nasional, klas buruh harus mempelopori dan memimpin perjuangan seluruh Rakyat. Untuk tujuan ini klas buruh harus "meningkatkan aktivitasnya, mendidik dirinya sendiri dan menjadi kekuatan yang besar dan sadar".
4. Melancarkan tuntutan-tuntutan minimum yang paling mendesak, yaitu kemerdekaan nasional yang penuh, hak-hak demokrasi, perbaikan nasib (kaum buruh, tani dan prajurit), perbaikan ekonomi, kemajuan kebudayaan dan perdamaian dunia.

Program tersebut diatas dinyatakan sebagai *"petunjuk dan pedoman"* bagi setiap komunis untuk melakukan kegiatannya sehari-hari dilapangan kerjanya masing-masing. Selanjutnya D.N. Aidit berseru kepada tiap-tiap anggota PKI untuk memenuhi "sembilan syarat", yaitu [1]) :

1. melaksanakan dengan baik semua tugas yang diberikan oleh partai.
2. menjaga diri agar tidak merosot menjadi pekerja politik yang berpikiran sempit, yang lupa pada tugas sejarah yang besar dan tenggelam mengurusi soal-soal tetekbengek yang tidak ada hubungannya dengan revolusi.
3. dalam memegang jabatan apa saja harus senantiasa menjadi tokoh politik dan tokoh negara tipe Lenin.
4. sebagai tokoh masyarakat harus bersikap tegas dan jelas, tidak plintat-plintut dalam membela kepentingan rakyat dan revolusi.
5. dalam keadaan bagaimanapun harus tetap bersemangat banteng merah, tidak takut menghadapi pertempuran dan tidak kenal ampun terhadap musuh-musuh rakyat.

---

1) D. N. Aidit, "Jadilah Komunis Yang Baik Dan Lebih Baik Lagi", Yayasan "Pembaruan", Jakarta 1964, halaman 13-14.

Dipindai dengan CamScanner

6. tidak mabok karena sukses, tidak panik menghadapi segala keruwetan dan bahaya, dan tidak putus-asa kalau mengalami pukulan-pukulan dan kegagalan-kegagalan.
7. bijaksana dan berhati-hati dalam memutuskan masalah-masalah yang banyak seluk-beluknya, yang menghendaki pandangan-pandangan yang dalam mengenai masalah-masalah itu.
8. lurus dan jujur terhadap partai dan rakyat.
9. cinta yang tidak ada taranya kepada rakyat.

Aidit menegaskan, bahwa dengan melaksanakan "sembilan syarat" tersebut diatas, maka setiap anggota PKI akan "menjadi komunis yang baik dan lebih baik lagi".

7. Sesudah tahun 1951

Menurut D.N. Aidit, seluruh proses sejarah PKI pada pokoknya dibagi dalam dua tingkat, yaitu *tingkat pertama* ialah *masa kanak-kanak* yang dimulai sejak lahirnya sampai pada awal tahun 1951; dan *tingkat kedua* ialah *masa dewasa* yang dimulai dari tahun 1951 dan seterusnya [1]).

Dari uraian diatas dapatlah kiranya digambarkan, bahwa psychologi yang diperlihatkan oleh pimpinan-pimpinan PKI sejak permulaan menunjukkan, bagaimana orang-orang komunis ini membangun partainya dari hari kehari, dari bulan kebulan, dari tahun ketahun, dengan penuh keuletan. Mereka menyusun batu-batu kecil, menghimpun kerikil-kerikil yang berserakan, mengumpulkan bata demi bata disertai semen dan beton, untuk dijadikan satu bangunan yang kuat, satu benteng. Kaum komunis mahir sekali dalam cara menyusun kekuatannya, mempergunakan frontman-frontman yang telah dibekali dengan *seribu satu semboyan,* yang nampaknya antara mereka satu dengan lain tidak ada hubungannya. Tetapi tujuan yang utama cukup terarah, yaitu mendirikan negara komunis Indonesia.

Usaha yang konspiratip seperti itu mereka lakukan dengan penuh dedikasi. Mereka didewasakan dan dibesarkan dalam semangat dan suasana persekongkolan menghancurkan setiap lawan politiknya. Puncak persekongkolan itu dilakukan dengan pembunuhan terhadap "7-Pahlawan Revolusi" di Lubang Buaya. Usaha PKI mendirikan negeri komunis di Indonesia kembali digagalkan oleh Angkatan Bersenjata RI dan Rakyat.

Namun demikian, pertanyaan yang sering kita dengar ialah "dapatkah konspirator-konspirator komunis berhasil kembali mem-

---

1) D. N. Aidit, ibid, halaman 33.

Dipindai dengan CamScanner

bangun partainya seperti telah mereka lakukan setelah gagal mengadakan pemberontakan tahun 1926 dan 1948" ?

Sebagai penutup bab ini, untuk menjawab pertanyaan diatas ada suatu pepatah yang menyatakan, yaitu : "agar dapat mematikan api, maka terlebih dahulu perlu diketahui sifat-sifat dari api".

Dipindai dengan CamScanner

II

GERAKAN BURUH INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

1. U m u m

Kelahiran dan perkembangan gerakan buruh Indonesia sampai dengan proklamasi 17 Agustus 1945 ditandai oleh kesadaran politik untuk melawan penjajahan. Pembentukan serikat buruh lebih cenderung berlatar-belakang politik daripada sosial ekonomis. Ia tumbuh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gejolak politik untuk merebut kemerdekaan. Gerakan buruh pada periode ini "timbul dan tenggelam" bersama-sama dengan romantikanya perjuangan politik. Ciri ini sama halnya dengan pertumbuhan gerakan buruh di Asia atau negeri-negeri yang pernah terjajah oleh bangsa lain. Perjuangannya banyak dipengaruhi oleh aspirasi nasional untuk mempertahankan martabatnya sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh.

Motive politik ini tampaknya semakin berpengaruh terhadap gerakannya sesudah proklamasi kemerdekaan.

Perpecahan yang timbul dikalangan partai politik berarti pula perpecahan dikalangan serikat buruh. Keadaan ini berlangsung demikian, karena sebagian besar pemimpin-pemimpin serikat buruh adalah juga sebagai pemimpin-pemimpin partai politik. Disini tampak, bahwa ideologi politik dari pimpinan buruh menjadi pula ideologi dari serikat buruh. Setiap saat kita mencatat perpecahan dikalangan pimpinan serikat buruh adalah akibat pula terjadinya perpecahan dikalangan partai politik.

Maka jika sekiranya disimpulkan, gerakan buruh di Indonesia sejak mula kelahirannya sampai perkembangannya dewasa ini — pada umumnya — berpola sebagai "tendential trade unionism".

Dalam sejarah gerakan buruh didunia, kita mengenal beberapa ciri, aliran atau pola gerakan buruh sebagai berikut :

a. *Trade Unionism :*

— ialah yang menempatkan diri pada suatu profesinya tersendiri. Dalam aliran ini, masalah-masalah yang berhubungan dangan masalah politik dianggap tidak menjadi tugas serikat buruh dan karenanya dihindari.

Dipindai dengan CamScanner

b. *Social Democratic Trade Unionism :*

— ialah yang berpendapat bahwa serikat buruh mempunyai kedudukan yang sejajar dengan partai politik. Meskipun demikian, gerakan buruh ini tidak secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam arti sebagai "power-politics".

c. *Anarcho Syndicalism :*

— ialah yang menempatkan dan menganggap pihak pengusaha ataupun pemerintah sebagai lawan yang harus dilumpuhkan apabila tuntutan-tuntutannya tidak dipenuhi. Aliran ini juga disebut "revolutionary unionism".

d. *Tendential Trade Unionism :*

— ialah gerakan buruh yang menempatkan dan mengikatkan diri kepada partai, golongan atau aliran politik tertentu. Karenanya ia menjadi "ikat-pinggang" dari kekuatan politik tersebut, dimana setiap saat siap menjalankan misi atau komando yang diberikan.

2. Zaman Penjajahan (1905 — 1945)

Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, Indonesia pernah mengalami penjajahan berturut-turut dari bangsa Portugis, Spanyol, Belanda (ke-I), Inggris, Perancis, Belanda (ke-II) dan Jepang. Sesudah proklamasi kemerdekaan, kita masih mengenal adanya penjajahan Belanda pada wilayah-wilayah tertentu Indonesia.

Adapun masa-masa yang mendahului sebelum timbulnya gerakan buruh yang pertama di Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa kedudukan kaum buruh hidup dalam perbudakan dan perhambaan. Organisasi kaum buruh yang pertama didirikan ialah *SS Bond* (Staatspoor Bond) pada tahun 1905. Dalam tahun ini pula didirikan *Post Bond.* Kemudian pada tahun 1907 pegawai-pegawai tinggi dan menengah dalam perkebunan mendirikan organisasi dengan nama *Cultuurbond.*

Sebelum Boedi Oetomo (BO) lahir sebagai organisasi kebangsaan yang pertama di Indonesia[1]), gerakan buruh yang ada pada hakekatnya adalah gerakan dari orang-orang Belanda sendiri yang di Indonesia ini memperoleh kedudukan-kedudukan penting atau

---

1) BO didirikan pada tahun 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo.

Dipindai dengan CamScanner

jabatan-jabatan tinggi. Bangsa Indonesia tidak dapat menjadi anggotanya. Kalaupun bisa, hanyalah sebagai "anggota luar biasa" yang tidak berhak memberikan suaranya dalam menentukan jalannya gerakan buruh tersebut. Gerakan buruh ini terpengaruh oleh gerakan buruh di Nederland yang mulai terorganisir pada tahun 1878.

Sesudah kelahiran Boedi Oetomo, gerakan-gerakan buruh yang ada mulai mendapat pengawasan yang khusus dari pemerintah kolonial Belanda, sebab anggota-anggotanya mulai dimasuki oleh beberapa buruh Boemipoetera yang sadar. Diadakanlah peraturan-peraturan yang mengikat. Pidato-pidato didalam vergadering atau rapat-rapat diadakan sensor dan sebagainya. Namun demikian, kekangan-kekangan atau ristriksi-ristriksi yang ada itu bahkan menambah semangat nasionalisme untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. VSTP (Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel) yang didirikan pada tahun 1908, mula-mula pimpinannya adalah terdiri dari orang-orang Belanda. Tetapi pada tahun 1912, pimpinan itu dapat direbut oleh Boemipoetera[1]) sehingga pegawai-pegawai tinggi Belanda (dan orang-orang yang pro Belanda) kemudian terpaksa mendirikan "Spoorbond" dan "SS Bond" baru.

Perebutan pimpinan ini dapat terjadi, terdorong oleh berdirinya "Sarekat Islam" pada tahun 1911 (yang sebelumnya bernama Sarikat Dagang Islam — berdiri tahun 1905), dimana dalam sejarah pergerakan nasional dinamakan sebagai induk dari kelahiran partai-partai politik. Sebab berbagai partai politik lainnya lahir dari SI, didirikan oleh orang-orang bekas anggota atau pimpinan SI[2]).

Setelah berdirinya SI ini, dikalangan buruhpun mulai bermunculan perserikatan-perserikatan seperti *PGHB* (Perserikatan Guru Hindia Belanda) dan *PGAS* (Perserikatan Guru Ambacht School) tahun 1912. *PPPB* (Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi-putera) tahun 1914. *ORB* (Opium Regie Bond) tahun 1915. *VIP-BOW* (Vereniging van Indische Personeel Burgerlijke Openbare Werken atau Serikat Pegawai Jawatan Pekerjaan Umum) tahun 1916. *PFB* (Personeel Fabrieks Bond) dan *PKBT* (Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani) tahun 1918. Sampai pada tahun 1920 diperkirakan terdapat 100 serikat buruh.

---

1) Ketua VSTP ialah Semaun, seorang tokoh sejarah yang banyak disebut namanya.

2) Drs. Soeroto, "Indonesia Di-tengah-tengah Dunia Dari Abad Keabad", jilid III, halaman 193, Cetakan ke-IV tahun 1966.

Dipindai dengan CamScanner

Persatuan yang pertama

Peta politik di Indonesia pada tahun 1919 ditandai oleh tiga aliran politik, yaitu : Islam, Marxisme dan Nasionalisme. Dalam aliran Islam terwakili oleh "Sarikat Islam" (SI) yang mempunyai anggota tersebar dan luas di Indonesia. Pimpinannya pada waktu itu ialah H.O.S. Cokroaminoto, H.A. Salim, Abd. Muis, R.M. Suryopranoto, Semaun, Darsono, Alimin, Muso, Tan Malaka dan Sosrokardono. Aliran Marxisme terwakili oleh "Indische Sociaal Democratische Vereniging" (ISDV) dan "Sociaal Democratische van de Arbeid Partij" (SDAP) dengan pimpinannya antara lain : Semaun, Darsono, Alimin, Muso, Bergsma, Baars, Hertogh. J.A. Dengah, H.W. Dekker dan P.F. Dahler. Sedangkan aliran nasionalisme terwakili oleh "Nationaal Indische Partij" (NIP) dan BO dengan pimpinannya antara lain : Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat dan R.M. Suryopranoto. Dari gambaran ini tampaknya jelas, bahwa kepemimpinan dari partai politik tersebut masih bersifat "campuran". Demikian juga mengenai keanggotaannya, satu orang bisa memasuki dan menjadi anggota dari ketiga perkumpulan politik ini, terutama yang sudah terkena pengaruh ajaran Marxisme. Dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu sudah mulai terangsang dengan keras adanya berbagai mithos politik yang masing-masing diperjuangkan oleh ketiga aliran ini.

Sementara itu, dalam kongres PPPB bulan Mei 1919 dikota Bandung, ketua PPPB Sosrokardono yang merangkap menjadi salah seorang pimpinan dalam Centraal SI menganjurkan agar semua perkumpulan sekerja bergabung dalam satu federasi yang kemudian membentuk satu "badan sentral" [1]). Pendapat ini lebih lanjut dibicarakan secara khusus dalam Kongres Nasional Centraal Sarikat Islam yang ke-IV di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 1919. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 300 orang yang meliputi wakil-wakil cabang SI diseluruh Indonesia dan wakil-wakil perhimpunan politik lainnya seperti NIP (Sarikat Hindia), ISDV, SDAP dan BO [2]). Dari pemerintah Hindia Belanda diwakili oleh Dr. Hazeu dan Gercke, dan juga pejabat-pejabat lainnya di Surabaya. Vergadering (sidang) ini dipimpin oleh Cokroaminoto sebagai ketua SI. Cokroaminoto membentangkan keadaan pergerakan nasional pada umumnya, dimana antara lain dikatakan semakin banyak pimpinan-pimpinan rakyat dipenjarakan dan dihukum didepan pengadilan karena dituduh melanggar undang-undang. Kemudian secara khusus ia menerangkan tentang maksud pimpinan-pimpinan buruh untuk mengadakan *satu badan sendiri* guna mengatur bagaimana sebaik-

---

1) A.K. Pringgopradigdo, 'Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia" hal. 27, tahun 1964.

2) Surat-kabar "Persatoean Hindia" No. 2/Tahun I, hari Sabtoe 15 Nopember 1919.

Dipindai dengan CamScanner

nya pergerakan kaum buruh itu. Ia mengatakan : "Pada ini waktu haruslah kita tak memikirkan pada beberapa isme-isme, tetapi haruslah kita mengejar kemerdekaan kita lebih dulu. Bagaimana kita bisa memperbaiki badan kita, sedang kita masih terinjak dari atas" ? Kemudian Cokroaminoto minta kepada semua wakil-wakil perhimpunan yang hadhir agar memberikan "urun bicara" berkenaan timbulnya idea persatuan dikalangan seluruh perkumpulan serikat buruh tersebut. Pembicara pertama sesudah Cokroaminoto adalah R.M. Suryopranoto (Ketua PFB) yang pada jamannya terkenal dengan julukan "de stakings koning" atau "raja pemogokan". Ia menerangkan tujuan dari Vaksentraal (VS) yang akan dibentuk, yaitu "melawan kapitalisme dan imperialisme". Ia menunjukkan "tiga jalan" untuk melakukan perlawanan tersebut, ialah pertama *vakactie* (perlawanan vak ditempat bekerja), kedua *politieke actie* (perlawanan politik), dan ketiga *co'operatie* (meningkatkan perbaikan ekonomi).

Pembicara-pembicara lainnya adalah mencerminkan semua unsur kekuatan politik dan sosial yang ada di Indonesia, baik dari wakil-wakil partai politik maupun dari wakil-wakil perserikatan buruh, pusat maupun lokal. Nama-nama pembicara itu antara lain H.A. Salim (SI), Soewardi Suryaningrat (Ketua NIP), Bergsma (ISDV), Alimin (SI/ISDV), Dengah (ISDV) dan lain-lainnya yang pada kesimpulan pembicaraannya masing-masing *menyatakan persetujuan* tentang pendirian Vaksentraal dan rencana atau konsep daftar pekerjaan (strijdprogram) vaksentraal tersebut[1]).

Pada hakekatnya, dalam pertemuan inilah tercetus "persatuan kaum buruh Indonesia yang pertama-kalinya", yang didukung oleh semua elemen dari kaum pergerakan kebangsaan pada waktu itu. Walaupun demikian, pada sidang ini sudah terdapat gejala perpecahan terutama mengenai *"nama"* dari vaksentraal tersebut[2]).

Perpecahan yang pertama

Untuk mempersiapkan pembentukan vaksentraal sebagai hasil Kongres ke-IV SI tersebut, dibentuklah suatu panitia persiapan yang terdiri dari Suryopranoto, Alimin, Subakat, Prawirosugondo,

---

1) Lihat lampiran No. I.

2) Timbul "dua blok" yang saling berbeda pendapat. Pertama dari kelompok Bergsma cs. yang mengusulkan agar nama vaksentraal ialah "Revolusioneir Socialistische Vakcentraal". Kelompok yang lain dari Suryopranoto/H. A. Salim cs. menyatakan, nama tersebut cukup dengan "Vaksentraal" saja agar tidak menimbulkan kekeruhan dalam menafsirkan arti "revolusioner".

Dipindai dengan CamScanner

Swandoro dan Semaun[1]). Panitia ini menunjuk Semaun untuk mempersiapkan konsep mengenai azas perjuangan (beginselverklaring), anggaran dasar (statuten) dan anggaran rumah tangga (huishoudelijke) reglement dari vaksentraal.

Pertemuan pendahuluan pembentukan vaksentral ini diadakan pada tanggal 25-26 Desember 1919 di Yogyakarta, dan dihadhiri oleh 44 serikat buruh dengan anggota seluruhnya berjumlah 45.112 orang. Dalam sidang ini titik-titik perpecahan mulai melanda "vakcentraal" yang akan dibentuk, terutama mengenai soal "nama". Ada yang setuju dengan perkataan "revolusioner". Tetapi ada yang tidak setuju, bahkan menolak. Perdebatan sengit berlangsung dan berlarut-larut. Disatu pihak memberikan arti, bahwa "revolusioner" hendaklah menjadi pegangan dan doktrin kaum buruh yang hendak membangun atau membongkar dari masyarakat kapitalistis menjadi masyarakat sosialistis. Kekuasaan imperialis harus direbut dan ditumbangkan, diganti menjadi kekuasaan kaum socialistisch-democraten. Alasan lain yang dikemukakan mengapa tidak setuju dengan perkataan "revolusioner" ialah, pertama mungkin kata "revolusioner" pada vaksentraal hanyalah sekedar sebagai reklame saja, dan kedua, bahwa gerakan buruh haruslah hanya memperhatikan kepentingan vak-bond saja, sedangkan soal-soal pemerintahan ataupun cara-cara "pembalikan dunia" dan lain-lainnya diserahkan kepada perkumpulan-perkumpulan politik. Selain mengenai istilah "nama" yang berlarut-larut dibicarakan dalam pertemuan itu, juga mengenai perkataan "memungsuh kekuasaan modal didalam semua sifatnya" seperti diajukan oleh Semaun dalam konsep anggaran dasar vaksentraal.

Kemudian, setelah sidang berjalan berlarut-larut, maka Semaun mengusulkan, agar vaksentraal itu memakai nama "Melayu" saja (maksudnya bahasa Indonesia) dengan sebutan *"Persatuan Pergerakan Kaum Buruh" disingkat PPKB*. Usul ini diterima oleh sidang. R.M. Suryopranoto tidak bersedia menjadi ketua PPKB, dan H. Agus Salim mengusulkan agar Kongres Vaksentraal diadakan secepatnya.

Sidang menyetujui kongres itu direncanakan bulan April 1920. Kemudian dibentuk "pengurus sementara" (voorlopig bestuur) berkedudukan di Semarang, sebagai berikut : Ketua — Semaun, Sekretaris — Nayoan, Bendahara — P. Bergsma, Komisaris-

---

1) Bergsma mengusulkan Semaun duduk dalam panitia ini, dan juga mengusulkan agar pembentukan Vaksentral menunggu keluarnya Semaun dari penjara (tanggal 22 Nopember 1919).

Dipindai dengan CamScanner

komisaris terdiri dari Soetadi, Cokromijoyo dan Soegeng. Pengurus ini praktis direbut oleh "kaum Semarangan" [1]), yang mempopulerkan semboyan/komando "Links richt U" ! (lihatlah kekiri).

Pada tanggal 1 Agustus 1920 diadakan Kongres ke-I VS di Yogyakarta, yang kemudian terbentuk susunan pengurus VS sebagai berikut : Ketua — Semaun, Bendahara — P. Bergsma, Wakil Ketua — R.M. Suryopranoto, Sekretaris H. Agus Salim, Komisaris — Tejomartoyo. Dalam kongres ini tampaknya terjadilah suatu "kompromi" seperti terlihat dalam susunan pengurus VS tersebut.

Sementara itu titik-titik perpecahan semakin menggelembung besar, tatkala dengan sengitnya Darsono melancarkan kritik terbuka kepada Ketua Centraal SI H.O.S. Cokroaminoto. Kritik Darsono ini lebih banyak ditujukan kepada pribadi Cokroaminoto [2]). Hal ini menimbulkan "kemarahan yang hebat" dari para pendukungnya yang setia dalam SI. Pada mulanya serangan kaum komunis ini ditujukan kepada wakil-wakil SI dan NIP dalam Volksraad yang dituduhnya sebagai "kaum komprador". Kaum komunis yang masih duduk sebagai pimpinan SI melancarkan pula kritiknya kepada BO dan NIP sebagai berikut :

> "SI harus menutup pintu buat perhimpunan-perhimpunan BO dan NIP, karena dua badan ini bukan perhimpunan rakyat kromo. Dua badan ini tidak menghendaki hilangnya kapitalisme, tetapi malah menyuburkan kapitalisme. Lain halnya dengan PKI. SI tidak perlu melarang, tetapi malah wajib memberikan jalan pada lid-lidnya [3]) agar menjadi lid-lid PKI dan lid-lid PKI masuk menjadi lid-lid SI — sebab PKI adalah perhimpunan politik kaum kromo yang hendak membinasakan kaum kapital diatas tanah Hindia" [4]).

Sementara itu PKI menyebut H. Agus Salim dan Suwardi Suryaningrat sebagai "kaum gelap". "Apa yang dicita-citakan kaum gelap ini untuk cinta Tanah Air dan cinta Kemerdekaan hanyalah omongan angin saja" [5]).

Kritik-kritik kaum komunis yang ditujukan kepada lawan-lawan politiknya ini tepat pada saat-saat krisis yang berat menekan kehidupan di Indonesia, dan khususnya kehidupan kaum buruh sebagai akibat Perang Dunia Pertama (1914 — 1918). Dalam situasi ini kaum komunis semakin kuat melakukan infiltrasi kedalam tubuh

---

1) Sebutan terkenal bagi "grup komunis" pada saat itu.

2) Kritik semacam ini dilakukan juga oleh Sumaryo Legowo (Perbum) kepada pribadinya J. A. Datuk Raja Bangun (PBM/FBMI) — lihat halaman 51.

3) Lid = anggota.

4) "Soeara Ra'yat" No. 15/16 Tahun ke-III, tanggal 16 dan 30 Oktober 1920, hal. 1-7.

5) Ibid, No. 1-2, Tahun ke-IV, tanggal 16 dan 31 Januari 1921.

Dipindai dengan CamScanner

SI, dimana anggotanya sebagian besar terdiri dari kaum buruh dan tani miskin serta para pedagang kecil.

Kritik Darsono dan kawan-kawannya kepada pimpinan SI dan NIP menjadikan sebab :

a. pecah-belahnya pikiran sebagian rakyat di Hindia Belanda.
b. pro dan kontra terhadap kritik tersebut.
c. perpecahan yang sulit dipersatukan.

Adalah mudah dipahami, apabila kemudian dikalangan perserikan buruh juga terjadi perpecahan yang parah. Polemik yang berlangsung disurat-surat kabar diantara pimpinan-pimpinan partai, terutama antara SI dan PKI, membawa pengaruh kedalam paberik-paberik atau jawatan-jawatan, dimana pimpinan serikat buruh adalah juga merupakan pimpinan dari partai SI atau PKI. Pihak komunis menuduh, bahwa perpecahan yang ada pada gerakan buruh, dalam hal ini Vaksentraal, disebabkan oleh "komplotan Salim". Sebaliknya Suryopranoto menuduh, bahwa kaum komunis selalu ingin jadi "inspecteurnya pergerakan Hindia".

Dalam pada itu, pada tanggal 18-19 Juni 1921 bertempat di Yogyakarta diadakan Kongres VS oleh Semaun dan kawan-kawan. Keputusannya membentuk "VS-baru yang direvisi" dengan nama *"Revolusioner Vaksentral"* dengan mengeluarkan "Manifest Revolusioner Vaksentraal". Susunan pengurusnya antara lain Semaun (ketua), Budisucitro (sekretaris), Bergsma (bendahara), Tan Malaka (redaktur).

Pada tanggal 20 September 1921, R.M. Suryopranoto dischors oleh "konperensi PFB" yang diprakarsai oleh Soemodiharjo (Sekretaris PFB) dan kawan-kawannya. Schorsing tersebut dengan alasan: PFB selama dalam pimpinan Suryopranoto mengalami "kekendoran organisasi".

Aksi-aksi radikal

Adapun masa-masa sekitar tahun 1920-1927 merupakan kecenderungan pada gerakan-gerakan radikal. VSTP yang merupakan organisasi paling militan pada periode itu melancarkan "pemogokan besar" di Sumatra Utara pada tanggal 5 September 1920, menuntut kenaikan gaji sebesar 50%. Pada bulan Juni 1923, Semaun memaklumkan pemogokan buruh kereta-api seluruh Jawa. Gerakan-gerakan radikal ini lebih bertendens politik. Akan tetapi pemogokan-pemogokan yang terjadi selalu dapat ditindas oleh Pemerintah Hindia Belanda. Semaun, Tan Malaka dan P. Bergsma yang menjadi arsitek dari gerakan-gerakan radikal ini ditangkap dan dibuang keluar negeri. Terhadap kaum buruh dikenakan larangan untuk berkumpul. Kepada yang sengaja mengadakan

Dipindai dengan CamScanner

propaganda pemogokan dinyatakan sebagai tindakan kriminil. Tindakan-tindakan keras dari pemerintah kolonial ini menyebabkan aksi-aksi dan perlawanan dibawah tanah. Dalam tahun 1926 terjadi pemberontakan komunis yang dapat digagalkan oleh Pemerintah Hindia. Akhirnya kemerdekaan berkumpul, menyatakan pendapat dibatasi, dan segala kegiatan yang berbau revolusioner, misalnya gerakan buruh dinyatakan terlarang.

"Masa tenang"

Pergerakan buruh pada masa tahun 1927 — 1945 dapat disebutkan sebagai "masa tenang". Para pimpinan buruh mulai merenungkan kembali cara-cara perjuangan buruh yang paling mungkin disesuaikan dengan keadaan.

Pada masa pendudukan fasis Jepang tahun 1942 — 1945, semua organisasi politik, serikat buruh dan sebagainya dibubarkan. Sebaliknya Jepang mendirikan organisasi-organisasi yang aktivitas-aktivitasnya diharuskan membantu Pemerintah Jepang untuk kepentingan propaganda "Perang Asia Timur Raya".

Pimpinan-pimpinan pergerakan politik maupun serikat buruh yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang mengadakan perlawanan dibawah tanah. Keadaan ini berlangsung sampai berkumandangnya Proklamasi 17 Agustus 1945.

3. Zaman Kemerdekaan

Pada zaman ini kita dapat membagi pergerakan buruh dalam 3 periode, yaitu :

A. Periode Tahun 1945 — 1950.

B. Periode Tahun 1950 — 1965.

C. Periode Tahun 1965 — sekarang.

Pembagian periode tersebut diatas adalah berdasarkan asumsi, bahwa peristiwa atau intensitas yang ada dalam pergerakan buruh menunjukkan beberapa "graduisasi" yang berbeda, meskipun "perbedaan" ini tidaklah begitu tajam.

A. Periode Tahun 1945 — 1950

1. BBI (Barisan Buruh Indonesia)

Diantara para pemimpin pergerakan buruh mengadakan pertemuan pada tanggal 19 September 1945 di Jakarta untuk membentuk *Barisan Buruh Indonesia* (BBI). Mula-mula belum mempunyai suatu program mengenai soal perburuhan. Tujuannya yang pertama ialah ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan R.I. Semua golongan buruh dianggap sebagai anggota BBI, dan pada tiap-tiap perusahaan merupakan cabang BBI. Untuk

Dipindai dengan CamScanner

kepentingan pertahanan, oleh BBI disusun *"Lasykar Buruh Indonesia"*. Diperusahaan-perusahaan tambang minyak yang dikuasai oleh R.I. didirikan *"Lasykar Buruh Minyak"*.

2. PBI

Sejak berdirinya BBI, dikalangan pimpinannya sudah ada dua golongan. Pihak yang satu ingin menggabungkan gerakan buruh dengan gerakan politik, sedangkan pihak yang lain ingin tetap memisahkan diri dari pengaruh politik.

Untuk memperdebatkan kedua keinginan itu, pada tanggal 7 Nopember 1945 di Solo diadakan Kongres pertama BBI. Golongan yang ingin mempersatukan gerakan buruh dengan gerakan politik akhirnya memperoleh kemenangan suara, sehingga BBI dijelmakan menjadi *Partai Buruh Indonesia* (PBI), dibawah pimpinan Syamsu Harya Hudaya.

3. GASBI

Golongan yang tidak setuju penjelmaan BBI menjadi PBI, mengadakan Kongres kedua BBI pada tanggal 21 Mei 1946 dikota Madiun. BBI berusaha menjadikan dirinya sebagai pusat (sentral) dari semua persatuan-persatuan buruh di Indonesia dan hanya bergerak dilapangan sosial-ekonomi. Maka BBI diubah struktur dan namanya menjadi : *Gabungan Serikat Buruh Indonesia* (GASBI).

4. GSBV

Berhubung adanya "Juli Affair" dalam tahun 1946, maka GASBI pecah menjadi dua. Pada waktu itu GASBI dituduh terlibat dalam "Juli Affair". Hal ini menyebabkan beberapa golongan tidak puas dan keluar dari organisasi, kemudian mendirikan : *Gabungan Serikat Buruh Vertikal* (GSBV), dibawah pimpinan Suryono dari Serikat Buruh Minyak (SBM).

Sejak peristiwa ini, maka benih perpecahan dikalangan serikat buruh sesudah proklamasi sulit dihindari, dan hanya semakin memperlemah gerakan buruh itu sendiri.

5. SOBSI

Pada tanggal 29 Nopember 1946 di Yogyakarta, atas usaha Alimin [1]) dari PKI, kedua organisasi GASBI dan GSBV yang sedang berselisih dapat digabungkan menjadi satu organisasi yaitu : *Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia* (SOBSI). Pimpinannya terdiri dari Drs. Setiajid, Haryono, Asraruddin, Nyono, Suryono, Oey Gee Hwat.

---

1) Ia meninggalkan Indonesia sejak tahun 1926. Ia berkeliling dinegeri-negeri sosialis. Sesudah satu tahun kemerdekaan RI ia muncul kembali di Yogyakarta.

Dipindai dengan CamScanner

Pada tanggal 17-18 Mei 1947, SOBSI mengadakan kongresnya yang pertama dikota Malang. Keputusan-keputusan kongres ini antara lain menetapkan :

a. *Dasar perjuangan SOBSI* ialah : *pertentangan kelas dan melaksanakan usaha-usaha perjuangan yang revolusioner.*

b. *SOBSI masuk menjadi anggota WFTU* (World Federation of Trade Unions) atau GSS (Gabungan Serikat Buruh Seluruh Dunia) [1].

c. *SOBSI menyetujui "perjanjian Linggarjati"* [2].

Meskipun keputusan-keputusan kongres SOBSI tersebut banyak golongan buruh yang tidak setuju, dan ada yang mengajukan protes, tetapi pimpinan SOBSI yang sudah condong berkiblat ke Komunisme International bahkan semakin memperkuat organisasinya. Organisasi-organisasi buruh vertikal atau lokal yang sesudah kemerdekaan tumbuh bagaikan "jamur dimusim hujan", satu persatu bergabung kepada SOBSI. Serikat Buruh yang cukup mempunyai potensiil seperti *SBG* (Serikat Buruh Gula — berdiri 3 Maret 1946), *SBKA* (Serikat Buruh Kereta Api — berdiri 13 Maret 1946), *SBM* (Serikat Buruh Minyak — berdiri 23 Juni 1946), *SERBUPRI* (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia — berdiri 17 Pebruari 1947), *SEBDA* (Serikat Buruh Daerah Autonom — berdiri Juni 1947) dan lain-lain dengan cepatnya berada dalam barisan komando SOBSI.

Ketika terjadi "Madiun Affair" tanggal 18 September 1948, SOBSI terang-terangan melibatkan diri dan ikut aktip melakukan pemberontakan. Setelah Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, dan menjelang tahun baru 1950, SOBSI muncul kembali dibawah pimpinan Nyono. Sejak itu SOBSI menempatkan diri sebagai tulang-punggung PKI. Selanjutnya dalam kongresnya yang kedua di Jakarta tanggal 9 — 20 Januari 1955,

---

1) WFTU sebelumnya bernama International Federation of Trade Unions (IFTU) berpusat di London. Keanggotaannya terdiri dari Serikat Buruh Nasional dari sesuatu negara. Tugasnya antara lain memberikan data dan informasi mengenai segala sesuatu yang menyangkut perburuhan. Pada tahun 1945 IFTU dibubarkan, dan kemudian dibentuk WFTU. Baik IFTU ataupun WFTU pada mulanya adalah organisasi buruh international yang independent. WFTU mula-mula berkedudukan dikota Paris, dan pada tahun 1947 dipindahkan kekota Wina. Menjelang tahun 1948, policy dan program WFTU berpaling kepada "communist oriented". Dari golongan yang non & anti-komunis kemudian pada akhir tahun 1949 membentuk ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions).

2) Perjanjian ini antara pemerintah RI dan Belanda, dimana isinya dibidang ekonomi mewajibkan RI mengembalikan semua perusahaan swasta kepada pemiliknya semula.

Dipindai dengan CamScanner

SOBSI mempertegas "Program Umum"-nya, antara lain sebagai berikut :

> "Didalam perjuangan melawan kekuasaan modal monopoli asing dan kaki-tangannya, kaum buruh Indonesia menghadapi reaksi yang kejam. Reaksi itu terutama berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah jajahan yang memperkosa hak-hak demokrasi. Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah jajahan itu sampai sekarang sebagian besar masih terus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.
>
> Keadaan ini masih terus berlangsung karena Indonesia sekarang belum merdeka penuh dan masih merupakan negeri setengah jajahan.....
> Untuk mencapai kemerdekaan nasional yang penuh, pertama-tama tugas kaum buruh yang penting adalah terus-menerus memperluas dan memperkuat front persatuan buruh. Didalam menggalang kerja-sama dengan golongan lainnya, kaum buruh harus mengambil bagian yang aktip dalam front persatuan nasional, yaitu persatuan dari kaum buruh, tani, intelektuil, pengusaha kecil, pengusaha nasional dan semua elemen anti-imperialis.
>
> Perjuangan untuk perbaikan nasib dan untuk kemerdekaan nasional tidak bisa dipisahkan daripada perjuangan mencegah perang dunia baru yang disiapkan oleh kaum penghasut perang yang dipelopori oleh imperialis Amerika Serikat.....
>
> Teranglah, bahwa karena perjuangan kaum buruh Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kaum buruh seluruh dunia untuk menggagalkan perang imperialis dan membela perdamaian, maka SOBSI menggabungkan diri pada Gabungan Serikat Buruh Sedunia (GSS). Dan ini adalah jaminan untuk mewujudkan solidaritas internasional..... [1]).

Pada jamannya, sebelum dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966, SOBSI merupakan organisasi buruh yang terkuat di Indonesia, organisasi yang militan dan terorganisir secara rapi.

6. GASBRI

Setelah dengan terang-terangan SOBSI menganut faham komunis internasional, maka golongan-golongan yang tidak puas terhadap SOBSI kemudian mendirikan : *Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia* (GASBRI), *Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia* (HISSBI), dan *Gabungan Serikat Buruh Indonesia* (GSBI).

7. SBII

Beberapa pimpinan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), antara lain Harun Al Rasyid, Mr. M. Dalyono dan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo pada tanggal 27 Nopember 1947 dikota Sala mendirikan *Serikat Buruh Islam Indonesia* (SBII), satu tahun sesudah SOBSI berdiri. SBII pada mulanya adalah organ dari Masyumi, sampai dilepaskan ikatan politiknya pada tahun 1960.

---

1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SOBSI, cetakan ke-I tahun 1955, halaman 6-15.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam sidang Majelis Nasional yang pertama pada tanggal 5 — 7 Nopember 1961 di Jakarta, nama SBII diubah menjadi *GASBIINDO* (Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia), sebagai perubahan struktur dari bentuk unitaris menjadi bentuk federatip. GASBIINDO menggabungkan diri kepada *ICFTU* (International Confederation of Free Trade Unions) [1]).

Melihat pertumbuhan serikat buruh sampai pada akhir tahun 1950, gerakan mereka tercermin dalam tiga organisasi, yaitu : SOBSI, SBII dan GSBI.

B. Periode Tahun 1950 — 1965

1. Menjelang Pemilu pertama

Setelah pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949, kehidupan politik dalam negeri masih belum stabil. Ternyata setiap waktu timbul partai-partai politik sebagai penjelmaan hasrat politik dari sebagian kelompok masyarakat untuk berlomba memimpin negara yang masih muda. Untuk mendukung cita-cita politik tadi kemudian timbullah berbagai-macam serikat buruh. Terutama menjelang berlangsungnya pemilihan umum yang pertama di Indonesia pada tahun 1955, maka sebagian besar partai politik yang ikut berlomba dalam pemilu tersebut masing-masing telah "mempunyai" serikat buruh. Gerakan buruh yang mempunyai cukup pengaruh dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu — selain SOBSI dan SBII — ialah *SOBRI* (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia, berdiri tanggal 9 Pebruari 1951 di Bandung, organ Partai Murba); *KBSI* (Kongres Buruh Seluruh Indonesia, berdiri di Bandung tahun 1952, organ Partai Sosialis Indonesia); *KBKI*[2]) (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia berdiri tanggal 10 Desember 1952 di Surabaya, organ Partai Nasional Indonesia).

2. Keadaan sesudah pemilu pertama sampai tahun 1965

Sampai menjelang peristiwa G.30.S/PKI, bermunculan organisasi-organisasi buruh antara lain sebagai berikut : IB Pancasila [3]) (Ikatan Buruh Pancasila, didirikan tanggal 15 Mei 1955); *SARBUMUSI* (Serikat Buruh Muslimin Indonesia, didirikan tanggal 10

---

1) ICFTU adalah pecahan dari WFTU, didirikan akhir tahun 1949 dikota London. Dewasa ini merupakan organisasi internasional yang terbesar jumlah anggotanya.

2) Organisasi ini pada tahun 1963 melepaskan diri dari PNI. Oleh PNI nama KBKI diubah menjadi "Kesatuan Buruh Marhaenis" (KBM), dan disyahkan oleh Pemerintah pada tanggal 17 Januari 1964.

3) = SOB Pancasila (Sentral Organisasi Buruh Pancasila) suatu gabungan dari Serikat² Buruh yang kebanyakan anggotanya beragama Katholik.

Dipindai dengan CamScanner

September 1955, organ partai Nahdlatul 'Ulama); *GOBSI-INDONESIA* (Gabungan Organisasi Buruh Serikat Islam Indonesia, organ Partai Syarikat Islam Indonesia); *KESPEKRI* (Kesatuan Pekerja Kristen Republik Indonesia); *KBIM* (Kongres Buruh Islam Merdeka, berdiri tanggal 4 Desember 1956 di Jakarta); *SOKSI* [1]) (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia); *PORBISI* (Persatuan Organisasi-organisasi Buruh Islam Indonesia, berdiri tanggal 5 Maret 1959); *KUBU PANCASILA* (Kesatuan Organisasi Buruh Pancasila, berdiri tanggal 7 Juli 1961 di Jakarta, organ partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia); *GERBUMI* (Gerakan Buruh Muslimin Indonesia, organ Partai Islam Perti); *IKM* (Ikatan Karyawan Muhammadyah).

3. PSPN

Pada tanggal 20 Nopember 1960 di Jakarta berdiri *PSPN* (Pusat Serikat Pegawai Negeri) yang keanggotaannya merupakan gabungan dari sepuluh organisasi pegawai negeri sebagai berikut : *PGRI* (Persatuan Guru Republik Indonesia); *SKDN* (Serikat Karyawan Dalam Negeri); *SS PTT* (Sarekat Sekerja Post dan Telekomunikasi); *PBKA* (Persatuan Buruh Kereta Api); *SSDP* (Sarekat Sekerja Direktorat Pajak); *PDKI* (Persatuan Juru Kesehatan Indonesia); *IKDAM* (Ikatan Karyawan Departemen Agama); *IK DEPSOS* (Ikatan Karyawan Departemen Sosial); *SB PEGADAIAN* (Sarekat Buruh Pegadaian); *PERSATUAN PENSIUNAN*, dan *SPBT* (Sarekat Pegawai Bea dan Cukai) sebagai simpatisan.

4. BKS — BUMIL

Setelah Indonesia secara sepihak memutuskan perjanjian KMB pada tahun 1956, terjadilah gelombang aksi dari kaum buruh untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda. Agar aksi-aksi buruh ini terkoordinir dengan tertib, dibentuk *Badan Kerja-Sama Buruh dan Militer* (BKS-BUMIL), dengan Ketuanya yang pertama Mayor Harahap dan terakhir adalah Overste Amir Murtono. Program BKS-BUMIL :

a. mengamankan perusahaan-perusahaan milik modal Belanda.
b. ikut-serta aktip dalam pelaksanaan pengembalian Irian Barat.

Adanya BKS-BUMIL ini merintis jalan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 45/1960 tentang "Pem-

---

1) Setelah SOKSI merupakan "induk" dari berbagai jenis profesi seperti pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, maka pada tanggal 26 Juni 1968 khusus untuk profesi buruh dibentuk *KONGKARBU* (Konsentrasi Golongan Karya Buruh).

Dipindai dengan CamScanner

bentukan Dewan Perusahaan" pada perusahaan-perusahaan vital yang dikuasai oleh Negara [1]).

Anggota organisasi buruh dalam BKS-BUMIL ialah KBKI, SOBSI, KBSI, SBII, HISSBI, SOBRI dan GOBSI-Indonesia.

5. OPPI

Untuk mempersatukan semua kekuatan kaum buruh, Presiden Sukarno melontarkan ideanya didepan rapat Vaksentral-vaksentral yang ada pada tahun 1959, agar dibentuk : *"Organisasi Persatuan Pekerja Indonesia"* (OPPI). Pihak SOBSI mensinyalir, bahwa idea OPPI ini adalah datang dari Ahem Erningpraja, Menteri Perburuhan yang merangkap menjadi Ketua Umum KBKI. Adalah suatu ironi, bahwa SOBSI yang sering melontarkan idea pembentukan "front persatuan buruh" menolak gagasan pembentukan OPPI. Dalam kongresnya yang ke-III bulan April dikota Solo, dimana pada waktu itu hadhir Menteri Perburuhan Ahem Erningpraja, pihak SOBSI menyatakan : "Kita setuju gagasan OPPI, tapi SOBSI-lah yang menyelenggarakan". Pada prinsipnya SOBSI hanya menghendaki adanya "front persatuan buruh", asalkan SOBSI yang dominant.

6. SEKBER — BURUH

Setelah idea pembentukan OPPI dapat digagalkan oleh SOBSI, maka atas inisiatip Menteri Perburuhan Ahem Erningpraja dibentuk : *"Sekretariat Bersama Perjuangan Buruh Pelaksana Trikora"* pada tanggal 27 Desember 1961. Pembentukan SEKBER-BURUH ini dilaksanakan sesudah 1 minggu Presiden Sukarno mencetuskan "Tri Komando Rakyat" pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Program Sekber-Buruh ialah melancarkan aksi-aksi buruh dalam rangka pengembalian Irian Barat. Ketua Sekber Buruh dijabat oleh Menteri Perburuhan. Anggotanya terdiri dari : KBKI, SOBSI, HISSBI, GASBIINDO, SOBRI, GOBSI-Indonesia, SARBUMUSI, SOKSI, KESPEKRI, GSBI dan KUBU PANCASILA. Ketika awal tahun 1965 Partai Murba dibubarkan, SOBRI tidak lagi menjadi anggota Sekber Buruh.

C. Periode Tahun 1965 — sekarang (1972)

Sesudah peristiwa G.30.S/PKI terdapat dua peristiwa penting dalam dunia pergerakan buruh di Indonesia, yaitu pembentukan *KABI* (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia) dan *MPBI* (Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia).

---

1) Bekas perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil alih.

Dipindai dengan CamScanner

1. KABI

Tujuan pembentukan KABI ialah bersama-sama dengan kekuatan Orde Baru lainnya menumbangkan kekuatan Orde Lama. KABI yang dibentuk pada tahun 1966 adalah merupakan pendukung pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Jendral Suharto. Program perjuangan KABI sepenuhnya adalah bersifat politis, sedangkan masalah-masalah yang bersifat sosial-ekonomis pada waktu itu diselesaikan oleh Sekber Buruh yang keanggotaannya minus SOBSI, GSBI dan HISSBI. Sedangkan keanggotaan KABI ialah terdiri dari GASBIINDO, GOBSI-INDONESIA, KBIM, KESPEKRI, KONGKARBU-SOKSI, KUBU PANCASILA, SARBUMUSI dan SOB PANCASILA.

Tampaknya KABI kurang dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan stabilisasi politik dan ekonomi yang diciptakan oleh Pemerintah Orde Baru, sehingga lambat-laun pada tahun 1968 dapat dikatakan "hidup segan, matipun tidak mau".

Demikian juga keadaannya dengan Sekber Buruh yang kurang cepat mengambil langkah-langkah dibidang konsepsi perburuhan, menyebabkan existensinya mengalami banyak frustasi.

Pada bulan Oktober 1968, ketiga anggota ICFTU di Indonesia yaitu GASBIINDO, KBIM dan GOBSI-Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan KABI, dengan alasan bahwa existensi KABI telah tidak diperlukan.

2. MPBI

Terdorong oleh hasrat Pemerintah untuk menyehatkan kehidupan gerakan buruh di Indonesia, maka pada tanggal 20 Juni 1968 Menteri Tenaga Kerja Laksamana Muda Mursalin Daeng Mamangun mengadakan pertemuan silaturahmi dengan anggota-anggota Sekber Buruh [1]). Dalam kesempatan ini Menteri mencetuskan gagasan untuk membentuk Wadah Perjuangan Buruh Indonesia.

Pada tanggal 25 Oktober 1968, bertempat di Departemen Tenaga Kerja 21 organisasi buruh termasuk diantaranya Pimpinan Sekber Golongan Karya (Golkar) mengeluarkan ikrar bersama menyetujui gagasan Menteri tersebut. Atas undangan Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 13 Maret 1969 diadakan sidang yang pertama untuk membicarakan suatu konsepsi mengenai peraturan dasar wadah perjuangan buruh tersebut dengan nama : Majelis Buruh Indonesia (MBI). Sidang yang pertama ini dipimpin oleh Suryanatakusuma, Direktur Pembinaan Hubungan Perburuhan. Organisasi-organisasi buruh yang hadhir ialah :

---

1) Keanggotaan Sekber Buruh pada tahun 1968 terdiri dari 9 Vaksentraal, yaitu : KBM, Sarbumusi, Gobsi-Indonesia, Gasbiindo, Sob Pancasila, Kespekri, Kubu Pancasila, Kongkarbu-Soksi dan KBIM.

Dipindai dengan CamScanner

1. Gasbiindo
2. Kubu Pancasila
3. PGRI
4. Kongkarbu
5. Gobsi-Indonesia
6. KBM
7. Sarbumusi
8. KBIM
9. SS PTT
10. Perkabi [1])
11. Kespekri
12. FBI Indonesia [1])
13. Porbisi
14. KBKI
15. Sob Pancasila
16. SOBRI
17. Gerbumi
18. GSBI
19. IKM
20. KBSI
21. Kekarbu MKGR [1])

Pada tanggal 25 Maret 1969 ke 21 organisasi buruh tersebut diatas membentuk "Panitia 9" [2]) yang bertugas merumuskan Peraturan Dasar Wadah Perjuangan Buruh Seluruh Indonesia, dengan berpedoman kepada konsepsi peraturan dasar yang diajukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Panitia ini berhasil merumuskan Mukaddimah Peraturan Dasar dan dalam mukaddimah itu wadah perjuangan buruh seluruh Indonesia diberi nama : *Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia* (MPBI).

Pada tanggal 1 Nopember 1969, bertempat di Istana Negara, Presiden Suharto dengan disaksikan oleh Menteri Tenaga Kerja Mursalin meresmikan berdirinya MPBI.

Kemudian pada tanggal 8 Nopember 1968 sidang MPBI memilih Badan Pimpinan Harian Sementara (BPHS) yang susunannya ter-

---

1) Perkabi = Persatuan Karyawan dan Buruh Indonesia (berdiri tanggal 1 Januari 1968, organ KOSGORO) ; FBI Indonesia = Federasi Buruh Islam Indonesia (berdiri tahun 1968) ; Kekarbu MKGR = Kesatuan Karyawan Buruh Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (berdiri tanggal 1 Januari 1960).

2) "Panitia 9" terdiri dari : Sarbumusi, Gasbiindo, KBM, Kongkarbu, KBIM, SS. PTT, PGRI, Kubu Pancasila dan Kekarbu MKGR.

Dipindai dengan CamScanner

diri dari 11 organisasi sebagai berikut : Gasbiindo, Kubu Pancasila, PGRI, Kongkarbu, Gobsi, KBM, Sarbumusi, KBIM, SS PTT, Perkabi dan Kespekri.

Adapun azas MPBI ialah UUD '45 dan Pancasila. Sedangkan tujuan MPBI sebagaimana disebut dalam Pasal 6 Peraturan Dasarnya adalah sebagai berikut :

a. Tercapainya penghidupan dan kehidupan materi-il dan spirituil yang layak sesuai dengan jiwa Pasal 27, 28 dan 33 U.U.D. 1945 bagi kaum Buruh beserta keluarganya khususnya dan Rakyat Indonesia umumnya.

b. Menghimpun serta mempersatukan seluruh Organisasi-Organisasi Buruh Indonesia kedalam satu wadah-persatuan dengan tidak mengurangi kebebasan dan kedaulatan anggauta-anggautanya dalam kesatuan Organisasinya.

c. Menciptakan kehidupan dan penghidupan perburuhan yang selaras dan serasi dengan jalan membela dan mempertahankan hak dan kepentingan, menegakkan ke-adilan dan kebenaran serta terlaksananya tertib-sosial, tertib-hukum dan tertib demokrasi.

d. Terwujudnya rasa setia-kawan diantara sesama kaum buruh.

e. Meng-amalkan Pancasila serta terlaksananya Undang-Undang Dasar 1945 didalam seluruh kehidupan Bangsa dan Negara menuju tercapainya Masyarakat Adil dan Makmur, materiil dan spirituil, yang diridho'i Tuhan Yang Maha Esa.

Selama dalam perkembangannya sampai sekarang (tahun 1972), MPBI dirasakan masih belum mampu menanggulangi masalah-masalah yang menyangkut bidang perburuhan. Hal ini mungkin disebabkan terutama masih lemahnya struktur organisasi dan kepemimpinan MPBI. Namun demikian, satu langkah maju yang ditunjukkan oleh MPBI ialah mengenai kesediaan dan tekadnya untuk menjadikan gerakan buruh di Indonesia sebagai organisasi yang independent, demokratis, kuat dan bertanggungjawab [1]), dan tidak menjadi bagian dari kekuatan politik manapun.

---

1) Ikrar Bersama MPBI pada tanggal 26 Mei 1972.

Dipindai dengan CamScanner

III

SIKAP PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP GERAKAN BURUH

1. Sebelum Tahun 1965

Sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap pertumbuhan gerakan buruh berlainan dengan sikap Pemerintah Hindia Belanda. Jika Pemerintah Hindia Belanda sangat curiga dan khawatir terhadap tumbuhnya gerakan buruh pribumi, maka Pemerintah Indonesia memberikan bantuan dan dorongan kepada gerakan buruh, sehingga banyak sekali tuntutan-tuntutan buruh yang dapat terlaksana. Tetapi patut disayangkan, bahwa tindakan-tindakan buruh yang memperoleh perlindungan dan bantuan pemerintah itu sering kali dilakukan kurang bijaksana, sehingga akibat-akibatnya sering merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Banyak sekali pemogokan-pemogokan dilancarkan semata-mata hanya karena bertendens kepada kepentingan politik tertentu. Dizaman Kabinet Natsir (tahun 1951) terjadilah pemogokan-pemogokan yang begitu hebat dan sering sekali terjadi; lebih-lebih yang dilakukan oleh anggota-anggota SOBSI, sehingga bukan saja jalannya roda perekonomian negara menjadi terganggu, tetapi juga karena itu kesejahteraan dan keamanan terasa sangat terancam.

Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951

Karena pemogokan-pemogokan buruh akibat-akibatnya sering sangat membahayakan terpeliharanya kesejahteraan umum bagi rakyat, maka pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang tujuannya untuk melindungi kesejahteraan umum tadi. Tindakan-tindakan pemerintah yang demikian adalah sudah semestinya, sebab tugas pemerintah yang pertama ialah menjaga dan memelihara keamanan serta kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat dan negara.

Maka dalam bulan Pebruari 1951 oleh Menteri Pertahanan, atas nama Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang dinamakan : "Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951". Isi pokok peraturan tersebut ialah :

a. Untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan perburuhan diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang dinyatakan vital dibentuk *Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan* (P4), baik Tingkat Pusat (P4P) ataupun Tingkat Daerah (P4D).

Dipindai dengan CamScanner

b. Selama perselisihan-perselisihan itu ditangan P4, maka pemogokan ataupun penutupan diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan lainnya yang dinyatakan vital dilarang.

Sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut, semua perselisihan-perselisihan perburuhan diselesaikan oleh pihak pengusaha dan buruh sendiri, mengingat belum adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan.

Mudah dimengerti, bahwa lebih-lebih gerakan buruh dibawah SOBSI sangat tidak setuju dengan peraturan kekuasaan militer tersebut diatas. Pihak SOBSI menamakannya : "Peraturan Larangan Mogok", "tidak demokratis", dan "hanya memihak serta melindungi kepentingan modal asing terhadap tuntutan-tuntutan pihak buruh yang layak dan adil".

Walaupun secara prinsipiil Pemerintah pada waktu itu sangat kuat kedudukannya didalam mengeluarkan dan melaksanakan peraturan kekuasaan militer (Pusat) No. 1/1951, tetapi terdesak oleh tindakan-tindakan yang dilancarkan oleh serikat-serikat buruh (SOBSI), maka terpaksalah Pemerintah menjanjikan untuk menarik kembali peraturan itu, segera setelah rancangan undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan diterima oleh parlemen. Pemerintah Natsir sendiri tidak sempat memenuhi janjinya itu, karena terburu menyerahkan mandatnya kembali.

Undang-Undang Darurat No. 16/1951

Dalam praktek ternyata bahwa peraturan kekuasaan militer No. 1/1951 baru berhasil mengatasi sebagian saja dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam lapangan perburuhan.

Berhubung dengan itu, maka Pemerintah pada bulan September 1951 sebagai usaha yang kedua dalam daya-upayanya untuk memecahkan kesulitan-kesulitan perburuhan secara lebih memuaskan telah memaklumkan Undang-undang Darurat No. 16/1951. Meskipun Undang-Undang ini belum sempurna, tetapi sudah merupakan perbaikan banyak, bila dibandingkan dengan peraturan terdahulu.

Dalam sejarah selama kurang lebih lima tahun Undang-Undang Darurat dapat menyelesaikan hampir semua perselisihan-perselisihan perburuhan besar dan kecil. Jumlah pemogokan dapat berkurang dan kerugian yang diakibatkannya dalam lapangan produksi bertambah kecil.

Akan tetapi hasil-hasil dari Undang-Undang Darurat itu menjadi kurang artinya, karena Undang-Undang tersebut masih kurang disenangi oleh buruh maupun majikan.

Kabinet Ali-Wongso yang menggantikan Kabinet Wilopo dalam penjelasan didepan Dewan Perwakilan Rakyat antara lain menge-

Dipindai dengan CamScanner

mukakan [1]) : "Telah dimaklumi oleh Pemerintah bahwa Undang-undang Darurat No. 16/1951 mengenai perselisihan perburuhan tidak disenangi oleh sebagian dari buruh.

"Hal ini ternyata dalam praktek bahwa ada sebagian buruh dan sebagian pengusaha yang tidak mau berunding dan menyerahkan saja penyelesaiannya kepada P4.

"Hal yang demikian itu tidak menambah pengertian yang baik antara buruh dan pengusaha. Maka karena itu Pemerintah akan mengajukan rancangan Undang-undang baru dengan dasar-dasar baru, antara lain mewajibkan buruh dan pengusaha terlebih dahulu merundingkan masak-masak perselisihan mereka terlebih dahulu sebelum memajukan perselisihan itu kepada instansi Pemerintah.

Berhubung dengan adanya keberatan-keberatan baik dari pihak buruh maupun dari pihak pengusaha [2]) dan Pemerintah (c.q. Kementerian Perburuhan) terlalu menjadi bulan-bulanan dari segala kritik, maka pada 8 April 1957, ditetapkanlah Undang-undang No. 22/1957 tentang "Penyelesaian Perselisihan Perburuhan".

Tentang perbedaan atau perubahan antara Undang-Undang Darurat No. 16/1951 dengan Undang-Undang No. 22/1957, dalam undang-undang terakhir ini dinyatakan :

a. Perundingan yang diwajibkan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang berselisih sebelum diajukan ke P4 (Pasal 2, jo. Pasal 6, ayat 4).

b. Keanggotaan P4 mencerminkan unsur Tripartite (sebelumnya hanya duduk wakil-wakil Pemerintah).

c. P4-Daerah dalam hal-hal tertentu berhak memberikan keputusan yang mengikat (Pasal 8, ayat 3).

d. Semua keputusan-keputusan P4-Pusat bersifat mengikat (Pasal 13).

e. Hak veto berada pada Menteri Perburuhan/Tenaga Kerja.

f. Anggota-anggota wakil Pemerintah di P4-Pusat tidak lagi terdiri dari Menteri-menteri, tetapi dari wakil-wakil lima Kementerian/Departemen (Perburuhan/Tenaga Kerja, Perekonomian/Perindustrian, Keuangan, Pertanian dan Perhubungan).

---

1) Penjelasan UU No. 22/1957 tentang "Penyelesaian Perselisihan Perburuhan".

2) Pihak buruh tidak jarang melontarkan tuduhan, bahwa P4 memihak golongan majikan. Sebaliknya pihak majikan sering menuduh P4 karena terlalu lemah terhadap tuntutan-tuntutan buruh.

Dipindai dengan CamScanner

PMP No. 90/1955

Salah satu ketentuan Pemerintah yang sangat penting artinya bagi tumbuhnya gerakan buruh di Indonesia ialah tercermin dalam "Peraturan Menteri Perburuhan" (PMP) No. 90/1955. Peraturan ini mewajibkan pendaftaran Serikat Buruh kepada Kepala Jawatan Hubungan Perburuhan. Pendaftaran tersebut dapat ditolak atau dihapuskan, antara lain apabila suatu serikat buruh :

"tidak sesuai dengan difinisi/batasan sebagai serikat-buruh" [1]).

Tetapi dalam PMP No. 90/1955 ini belum ditegaskan mengenai syarat-syarat tentang *pengakuan* (recognation) suatu serikat buruh, sehingga karenanya pula setiap saat terjadi pendirian atau pembentukan serikat buruh baru, dengan mudah memperoleh nomor-pendaftaran yang dimaksud. Berdasarkan statistik Departemen Tenaga Kerja R.I. [2]), jumlah Vaksentraal (Federasi) dan Serikat Buruh pada akhir tahun 1968 adalah sebagai berikut :

1. Vaksentraal	=	19
2. SB yang tergabung dalam Vaksentraal	=	288
3. P S P N	=	1
4. SB anggota PSPN	=	11
Jumlah :		319

Sebagaimana diketahui, keadaan SB diatas sudah berkurang dengan SOBSI dan afiliasinya, sementara itu belum semua Vaksentraal yang ada diperoleh keterangan mengenai jumlah SB afiliasinya.

2. Sesudah Tahun 1965

Sejalan dengan program Pemerintah dibidang stabilisasi politik dan ekonomi, maka dibidang perburuhanpun mengalami dasar-dasar pembaharuan yang cukup fundamentil. Keadaan yang objektip dari zaman sebelum dan sesudah tahun 1965 telah membawa kepada sesuatu sikap bahwa "status-quo" gerakan buruh dan organisasi-organisasi buruh dewasa ini tidak menguntungkan kepentingan pembangunan dalam jangka panjang dan tidak menguntungkan buruh pula.

---

1) Dalam Pasal 1, ayat c, PMP No. 90/1955. SB dinyatakan : "organisasi atau gabungan organisasi buruh yang dibentuk secara sukarela oleh buruh-buruh di Indonesia, dengan tujuan terutama untuk memperbaiki atau mempertahankan kedudukan buruh dalam hubungan kerja".

2) Dikeluarkan oleh Sub Seksi Organisasi Pembinaan Tenaga Kerja, tanggal 13 Maret 1969.

Dipindai dengan CamScanner

Maka dalam usaha mencari tracee baru untuk menciptakan kondisi perburuhan yang sehat, sejak mulai tahun 1966 Pemerintah telah mengemukakan idea tentang :

— Hubungan Perburuhan Pancasila, dan

— Penyederhanaan Serikat Buruh.

Idea tersebut diatas dewasa ini sedang dalam tahap penciptaan perumusannya.

Hubungan Perburuhan Pancasila

Pada prinsipnya, Pemerintah menekankan, bahwa perlu diciptakan suatu hubungan perburuhan yang dalam semua aspeknya selalu didasarkan kepada setiap sila dari Pancasila, yaitu ke-Tuhan-an Yang Maha Esa; Perikemanusiaan; Kesatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Penyederhanaan Serikat Buruh

Pemerintah menekankan, bahwa fungsi utama dari organisasi-organisasi buruh dan karyawan ditingkat perusahaan, sektor dan ditingkat nasional adalah menggalang partisipasi kaum buruh secara bertanggung-jawab dalam proses pembangunan ekonomi dan masyarakat. Ini berarti, bahwa serikat-serikat buruh harus mampu membandingkan kepentingan khusus dan kepentingan umum, dan dimana perlu senantiasa bersedia mendahulukan kepentingan umum.

Dalam pada itu pemerintah selalu mendorong dan meyakinkan serikat-serikat buruh agar pertama-tama melepaskan dirinya dari ikatan politik dari sesuatu golongan politik, dan kedua agar menyederhanakan struktur perserikat - buruhan ini menjadi suatu "industrial trade union" sehingga akan tercipta "one union in one industry" (satu SB dalam satu lapangan industri).

Dipindai dengan CamScanner

IV

GERAKAN PERBUM

1. Perkembangan yang paralel

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan buruh dalam industri minyak adalah paralel dengan gerakan buruh umum di Indonesia. Jika dikalangan buruh umum masalah persatuan dan perpecahan merupakan hal-hal yang terjadi secara "routine", maka dikalangan gerakan buruh minyak begitu pula keadaannya. Seperti halnya dikalangan gerakan buruh umum, maka juga dikalangan gerakan buruh minyak soal politik dan ideologi merupakan faktor-faktor penting yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Berkali-kali dicoba oleh pemimpin-pemimpin buruh minyak untuk menggalang suatu persatuan atau kerja sama yang teguh. Tetapi sampai sekarang semua usaha-usaha itu masih tetap gagal. Dengan begitu maka dikalangan perusahaan minyak terdapat beberapa macam serikat buruh, yang satu sama lain bekerja sendiri-sendiri menurut keyakinan masing-masing.

Sebelum tahun 1950, ditempat-tempat perusahaan minyak sudah terdapat serikat buruh yang masing-masing berdiri sendiri. Tempat-tempat itu adalah sebagai berikut :

Kalimantan

1937 Di *Balikpapan* pada tahun 1937 oleh Abdulmuntalib, klerk N.V. BPM didirikan "Persatuan Kita" yang anggota-anggotanya terdiri dari kaum buruh minyak. Organisasi ini tidak lama berdiri, karena segera ditindas oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tanggal

1946 7 Juli 1946 oleh S. Mewengkang didirikan *SKB* (Serikat Kaum Buruh) sebagai penunjang dari INI [1]). Organisasi inipun segera bubar karena Mewengkang ditahan oleh Belanda. Setelah pemerintah Republik Indonesia Serikat berdiri, Mewengkang mendirikan kembali Organisasi buruh dengan nama *SKBM* (Serikat Kaum Buruh Minyak). Pada tahun 1950 di Balikpapan juga didirikan *Perbum* (Persatuan Buruh Minyak) sebagai cabang Perbum dari Perbum Plaju. Pendiri cabang Perbum Balikpapan ini antara lain Agus Jalaluddin (golongan PNI), Agus Notokusumo, M. Watung (golongan Murba), Nur Jali dan Moh. Ideham (PSII).

---

1) Ikatan Nasional Indonesia, sebuah partai yang berdiri di Kalimantan Timur dan berpusat dikota Balikpapan.

Dipindai dengan CamScanner

Di *Tarakan* pada tahun 1946 oleh Sudiarto didirikan *PKB*
1949 (Persatuan Kaum Buruh). Pada tahun 1949 organisasi ini diubah namanya menjadi Persatuan Buruh Minyak (PBM) yang merupakan cabang dari PBM yang berpusat di Jakarta.

1950 Di *Sanga-sanga* pada tahun 1950 oleh Ning Usman didirikan *SERBUMI* (Serikat Buruh Minyak). Di *Tanjung* berdiri *PBI* (Persatuan Buruh Industri) oleh Jaswadi, Zainal Arifin dan Moh. Syurie.

Jawa

1946 Pada tanggal 23 Juni 1946 diadakan kongres ke-I buruh minyak seluruh Indonesia di Madiun. Yang hadhir hanya wakil-wakil buruh Jawa, mengingat kesulitan komunikasi. Keputusannya ialah membentuk *SBM* (Serikat Buruh Minyak) dengan ketua Suryono. SBM diusahakan sebagai organisasi minyak diseluruh Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta. SBM masuk Vaksentral GASBI. Setelah GSBV berdiri (sebagai pecahan dari GASBI), maka SBM masuk GSBV. Kemudian SBM masuk menjadi anggota SOBSI (peleburan antara GASBI dan GSBV).

1948 Tanggal 8 Pebruari 1948 SBM mengadakan kongres ke-II di Cepu, dimana pengurus SBM seluruhnya direbut oleh golongan komunis.

1949 Pada tanggal 11 September 1949 di Jakarta didirikan PBM (Persatuan Buruh Minyak) oleh J.A. Datuk Raja Bangun. PBM masuk vaksentral "Sin Min Lao Kung Hui" yang kemudian diubah namanya menjadi : *POB* (Pusat Organisasi Buruh). Sementara itu di Surabaya berdiri SERBUMISI (Serikat Buruh Minyak Seluruh Indonesia) [1].

1950 Tanggal 11 — 15 Juni 1950 di Semarang diadakan konperensi buruh minyak Jawa/Madura, yang kemudian terbentuk SBTMI (Serikat Buruh Tambang Minyak Indonesia) [2] dan berkedudukan di Surabaya. Pengurus SBTMI antara lain Marlan. Belum lama berselang berdiri, SBTMI pecah, ada yang berpusat di Jakarta dibawah pimpinan J.A. Datuk Raja Bangun. Tanggal 10 Desember 1950 diadakan konperensi SBTMI di Surabaya antara lain keputusannya meroyer J.A. Datuk Raja Bangun.

---

1) Terdiri dari pegawai-pegawai SVSC.

2) Terdiri dari pegawai-pegawai BPM.

Dipindai dengan CamScanner

1944 Pada waktu Jepang mengalami kekalahan-kekalahan perang di Pasific, kemudian pada tahun 1944 di Sei Gerong dibentuk persatuan dikalangan buruh minyak dengan nama : HTLM (Himpunan Tenaga Lasykar Minyak.) Tujuan HTLM ialah :

a. mempersatukan potensi pegawai minyak.

b. memperlancar komunikasi antara pegawai dengan pengusaha minyak Jepang (Sisetzuka Neniocho).

Keanggotaan HTLM meliputi seluruh Indonesia dan Singapore dan dipusatkan di Sei Gerong. Ketuanya ialah Raden Salam Faiman. Pada zaman pendudukan Jepang, HTLM belum ada kegiatan yang nyata. Pada

1945 tanggal 25 Agustus 1945 di Plaju, sesudah proklamasi kemerdekaan, merubah bentuknya menjadi *PPM* (Persatuan Pegawai Minyak). Ketuanya ialah Dr. Moh. Isa (waktu itu menjabat Residen di Palembang). Tugas PPM yang pertama ialah mengambil alih perusahaan minyak dari Jepang dan menyerahkan kepada Pemerintah.

Pada pertengahan Agustus 1946 PPM mewakili seluruh pegawai minyak yang bekerja pada N.V. BPM untuk merundingkan syarat[2] kerja dan jaminan sosial dengan pimpinan BPM. Pada waktu itu dicapai persetujuan mengenai pemberian 9 bahan kebutuhan pokok sehari-hari [1]) kepada setiap pegawai minyak. Pada bulan Oktober 1946, pimpinan BPM mulai aktif masuk Plaju. PPM mulai berfungsi sebagai serikat-buruh (trade union). Bulan Januari 1947 pimpinan PPM masuk kepedalaman (gerilya) dan di Plaju dibentuk komisariat PPM yang terdiri dari M. Hutabarat, Abdullah Thohir dan H. Nasution.

1948 Pada tanggal 1 Desember 1948 PPM diubah namanya menjadi *PERBUM* (Persatuan Buruh Minyak). Pimpinan Sekretariat Pusat Perbum ialah Baay Salim [2]) dan berkedudukan di Kota Palembang. Di Plaju dibentuk Cabang Perbum yang dipimpin oleh H. Sitompul dan A. Thahir. Juga di Prabumulih dibentuk cabang Perbum

---

1) = beras, gula, minyak goreng, terigu, ikan-asin, garam, telor, tekstil, kacang-hijau.

2) Baay Salim ialah adik H. Agus Salim.

Dipindai dengan CamScanner

dengan pengurusnya antara lain R.P. Situmeang [1]), Saibun dan Yusuf Wijayana.

Di Palembang pada tahun 1950 juga didirikan *SBU* (Serikat Buruh Umum) pimpinan H.H. Nanguning dan Arifin.

Di Jambi dibentuk Cabang Perbum dengan pengurusnya antara lain G. Nainggolan dan A. Murad. Di Sumatra Utara berdiri SBM sebagai perwakilan dari SBM Yogyakarta. Pimpinan SBM Sumatra Utara antara lain Riphat. Pada tahun 1950 dikantor BPM Medan didirikan PPM cabang Medan.

Sulawesi

1950 Pada tahun 1950 di Makassar didirikan *SEBUMI* (Serikat Buruh Minyak). Para pendirinya ialah Abd. Gani, Bachmid, Sanger dan Nio Hiong Boeng. Sebumi mempunyai cabang-cabang di Pare-Pare, Menado dan Ambon.

2. Infiltrasi SOBSI

SOBSI yang dibangun kembali sesudah pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949, mengkonsolidir dirinya dengan berusaha merebut massa kaum buruh terutama yang bekerja disektor perkebunan, pelabuhan, transport dan minyak. Untuk menguasai buruh minyak yang bekerja pada perusahaan BPM/NIAM, Stanvac, Caltex dan lain-lain di Sumatera Selatan/Jambi, ditugaskan Yusuf Wijayana, yang mengaku berasal dari Cepu, tetapi kadang-kadang mengatakan dari Wonokromo atau Jombang. Sementara itu, Plaju mulai diinfiltrir dengan membina H. Gultom, H. Syahran dan A. Majid Thahir yang duduk dalam pengurus Cabang Perbum. Sebagai "koordinator" cabang-cabang Perbum diwilayah Sumatera Selatan dibentuk "Komisaris Daerah" (KD) yang dipimpin oleh Pieter Simanjuntak. Melalui K.D. inilah instruksi-instruksi dari SOBSI yang berpusat di Jakarta disebar-luaskan dikalangan massa buruh. Tugas utama aktivis-aktivis yang telah dibina oleh Yusuf Wijayana ialah menggeser pimpinan-pimpinan Perbum yang non-SOBSI.

Serikat buruh-serikat buruh minyak di Jawa sejak permulaan berdirinya sudah didalam orbit SOBSI (Marlan dan Suparjan cs.). Di Jakarta mula-mula sebagian besar pegawai BPM dibawah pimpinan Datuk Raja Bangun. Tetapi kelompok SOBSI mendirikan

---

1) R.P. Situmeang adalah pegawai BPM Plaju, Bagian Geology. Untuk membangun organisasi Perbum ia pindah ke Prabumulih, dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian Cabang. Disini ia agaknja mulai dengan kariernja sebagai tokoh Perbum dan sekaligus tokoh SOBSI.

Dipindai dengan CamScanner

SBMI (Serikat Buruh Minyak Indonesia), sebagai imbangan dari PBM.

3. KABM

Langkah pertama pimpinan SOBSI untuk merebut massa buruh minyak ialah dengan menyelenggarakan Konperensi Buruh Minyak seluruh Indonesia pada tanggal 7 — 13 Nopember 1950 bertempat di Hotel "Houmman" Bandung. Dalam kongres ini hadhir semua wakil-wakil serikat buruh minyak yang bekerja di unit/lapangan milik BPM.

Yang menyelenggarakan konperensi ini adalah Perbum (pusatnya di Palembang), sedangkan semua pembiayaan ditanggung oleh BPM atas usul Perbum. Ada dua masalah yang pada waktu itu menjadi tuntutan Perbum kepada BPM, yaitu "keseragaman mengenai peraturan gaji/upah dan cuti antara buruh bulanan dan buruh harian"

Sementara itu di Jambi pada tanggal 19 Juli 1950 terjadi pemogokan yang menuntut pada pihak BPM agar perbedaan upah antara pegawai-pegawai NIAM Jambi dengan BPM di hapuskan.

Mengingat tuntutan-tuntutan buruh yang bekerja pada perusahaan pada umumnya berkisar pada kedua masalah tersebut (upah dan cuti), maka untuk memudahkan perundingan, pihak majikan mendukung idea diadakannya satu koordinasi dari serikat-serikat buruh yang tempatnya terpencar-pencar. Dalam konperensi ini disepakati keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Membentuk Kesatuan Aksi Buruh Minyak (KABM).
2. Menyusun pengurus KABM Pusat, antara lain Baay Salim sebagai Ketua Badan Delegasi KABM dan menunjuk R.P. Situmeang sebagai Sekretaris Umum.
3. Membentuk Panitia Kongres Buruh Minyak Seluruh Indonesia, dengan Ketuanya Suparjan (Ketua SBM).
4. Menetapkan "Tuntutan Umum" [1]) Buruh Minyak Indonesia.

Selama konperensi ini berlangsung, bibit-bibit pengaruh politik mulai timbul. Meskipun belum sampai kepada suatu keputusan, tetapi pembahasan mengenai "setuju atau tidak setuju pengembalian modal milik asing" telah membawa hangatnya suasana konperensi. Tetapi dalam gelagatnya lebih-kurang 80% dari peserta yang hadhir menolak pengembalian modal milik asing tersebut. Sebagaimana

---

1) "Tuntutan Umum" ini juga disebut "Tuntutan Bandung", lihat lampiran No. II

Dipindai dengan CamScanner

semboyan SOBSI sejak berdirinya, maka semboyan "sita modal asing" juga mendengung dalam konperensi ini.

4. Kongres Fusi Perbum

Sebagai "realisasi" dari hasil konperensi serikat-serikat buruh minyak di Bandung, pada tanggal 20 - 27 Juli 1951 diadakan kongres buruh minyak bertempat digedung "Komidi" Jakarta. Kongres ini dihadhiri oleh organisasi-organisasi buruh :

1. S.B.M.
2. SERBUMI
3. SB-Minyak Pacific (Pakanbaru)
4. Perbum
5. SBTMI
6. SERBUMISI
7. S.B.M.I.

Dalam kongres ini tampak adanya dominasi golongan SOBSI, sehingga keputusan-keputusan kongres adalah sesuai dengan konsep yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan persiapan-persiapan yang matang, antara lain termasuk penunjukan delegasi yang datang dari daerah-daerah yang sebagian besar sudah dalam pembinaan SOBSI sangat memudahkan untuk menguasai jalannya sidang. Sebelum "kongres fusi" ini berlangsung, sekretaris umum KABM R.P. Situmeang aktip mengadakan kunjungan kedaerah terutama ke Balikpapan. Sementara itu golongan yang non-SOBSI seperti organisasi buruh PBM dibawah pimpinan Datuk Raja Bangun tidak diundang dalam kongres. Oleh golongan SOBSI, kongres ini disebut sebagai *"Kongres Fusi"* Buruh Minyak seluruh Indonesia.

Keputusan penting yang diambil ialah :

1. Menyatakan *Perbum* (Persatuan Buruh Minyak) sebagai satu-satunya serikat buruh dilapangan industri minyak diseluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
2. Dasar perjuangan Perbum adalah *perjuangan klas,* sebagai akibat daripada kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antara klas buruh dan kaum modal.
3. Sendi organisasi Perbum adalah *sentralisme-demokrasi,* dimana pimpinan pusat dapat menggerakkan seluruh instansi organisasi, dibawah satu disiplin yang kuat.
4. *Mengakui SOBSI* sebagai satu-satunya gabungan serikat-serikat buruh Nasional yang konsekwen anti-imperialis.
5. *Mengakui* WFTU sebagai satu-satunja gabungan serikat-serikat buruh sedunia yang anti-imperialis, dan karenanya

Dipindai dengan CamScanner

membenarkan dan memperkuat keanggotaan SOBSI didalam WFTU.

6. Memberantas penyakit *Trade Unionism,* dan tidak membenarkan perjuangan buruh yang hanya bersifat sosial-ekonomis saja, tetapi harus berjuang untuk perbaikan hidup disegala lapangan, yaitu politik, ekonomi dan kebudayaan.
7. Bersatu dengan semua Rakyat yang cinta damai dalam *Front Nasional* anti-imperialis, melawan segala usaha persiapan perang kaum imperialis, dan memperjuangkan segala usaha kearah terlaksananya perdamaian dunia.
8. Memperjuangkan sepenuhnya terbentuknya satu negara *Demokrasi Rakyat Indonesia* sebagai tingkat perjuangan dalam negara jajahan dan setengah jajahan, menuju masyarakat sosialis.

Kongres ini sepenuhnya berakhir dengan kemenangan dipihak kaum komunis. Kata demi kata, atau kalimat demi kalimat dari keputusan kongres ini adalah merupakan "kalimat klise" yang biasa dilontarkan oleh kaum komunis dalam rapat-rapat, diskusi ataupun siaran-siaran/bulletin. Dalam kongres inipun hadhir D.N. Aidit, sebagai lobbyist dari CC-PKI. Dengan rajin ia mengadakan approach dengan para delegasi yang sekiranya tidak setuju atau ragu-ragu terhadap keputusan kongres tersebut.

Kongres ini berhasil pula menyusun pengurus pusat Perbum yang terdiri dari : R.P. Situmeang dan Sugiri (Sekretaris Umum), R.S. Wijaya Sastra dan Hadi Sudarjo (Sekretaris organisasi), Slamet Wijaya dan Usup Munandar (Sekretaris Penerangan), Suparjan dan A. Arja (Sekretaris Perburuhan/Upah), Azis Anggawati Wibowo (Sekretaris Keuangan).

Sesudah Kongres Fusi

Setelah berlangsungnya "Kongres Fusi", yang sepenuhnya dalam penguasaan SOBSI, maka didaerah-daerah terjadi perpecahan, ada yang pro dan anti.

Reaksi pertama datang dari Pengurus Besar PBM, yang merasa bahwa anggota-anggotanya didaerah terganggu oleh opensip Perbum atau SOBSI. Sewaktu "kongres fusi" ini tengah berlangsung, dari pengurus besar PBM Jakarta dikeluarkan surat edaran yang berjudul : *"Siapa yang Memegang Rol Terpenting Dalam Kongres Fusi Buruh Minyak" ?* Dalam siaran ini antara lain ditulis sebagai berikut :

> "Dalam sejarah buruh minyak di Indonesia tercatat suatu kejadian penting, yang tidak dapat dilupakan, berkenaan dengan diadakannya kongres fusi di Jakarta pada tanggal 20-27 Juli 1951.
>
> "Tetapi alangkah sayangnya, dalam kongres ini tidak semua organisasi buruh diundang, bahkan sebaliknya banyak yang diisolir.

Dipindai dengan CamScanner

"Tidaklah heran, karena semua konsepsi dan prosedure kongres disusun oleh Sekretariat KABM (baca SBM) yang menghendaki agar segala-galanya dapat diterima begitu saja oleh kongres, dan tidak menghendaki suara-suara yang tidak setuju yang mungkin akan dikeluarkan oleh organisasi-organisasi lain yang tidak diundang.

"Organisasi buruh adalah *BUKAN PARTAI POLITIK*, itulah sebabnya maka organisasi buruh yang anggotanya terdiri dari bekas atau belum/tidak bekerja dalam satu perusahaan sebetulnya *tidaklah mempunyai hak suara*. Dalam kongres ini nyata sekali, bahwa anggota SBM yang kebanyakan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan minyak (atau sudah non-aktip) merupakan lebih separoh jumlahnya dari yang hadhir.

"Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pihak yang tertentu tidak menghendaki bertambahnya suara-contra, karena mereka akan gagal dalam melaksanakan "maksudnya", jika semua organisasi minyak diundangnya.

Dalam akhir siaran tersebut dinyatakan :

"Tahukah para kongresisten, dengan kesalahan langkah untuk "MENFORCEER" fusi dengan tidak adanya pengertian yang sehat dalam sebahagian kongres tersebut, bukanlah nanti akan mewujudkan persatuan, tetapi menambah perpecahan yang lebih besar".

Kemudian melalui statemennya tanggal 25 Juli 1951, Pengurus Besar PBM menyatakan *"tidak mengakui sah, bahwa Kongres Fusi tersebut diselenggarakan dengan menggunakan atas nama Buruh Minyak seluruh Indonesia, yang nyata-nyata dipergunakan untuk mencapai maksud sesuatu golongan/partai politik"*.

Sementara itu, beberapa delegasi yang tergabung dalam Perbum Sumatra Selatan yang non-SOBSI merasa "terpukul", apalagi jika diingat bahwa merekalah sebenarnya yang pertama-tama mendirikan dan membina Perbum. Baay Salim, misalnya, yang merupakan Ketua yang pertama dari Pimpinan Pusat Perbum, sejak Kongres ini mengundurkan diri. Abdullah Thohir dan kawan-kawannya sekembalinya dari kongres berusaha mempertahankan nama "Persatuan Buruh Minyak" Plaju. Sedangkan Dr. A.K. Gani dan kawan-kawan pada tanggal 25 Agustus 1951, bertempat di Palembang mendirikan : *GPM* (Gerakan Perbum Merdeka), yang kemudian diubah namanya menjadi: *OBM* (Organisasi Buruh Minyak).

Di Surabaya, terjadi perpecahan baik dalam SBTMI maupun Serbumisi.

Di Sanga-Sanga, Serbumi tidak menggabungkan diri kepada Perbum, tetapi "hanya bekerja sama" dengan Perbum.

Di Balikpapan pada tanggal 17 September 1951 Perbum direbut oleh pengurus yang terdiri dari Kartono, A. Syahbaruddin dan Tan Siang Long anggota SOBSI.

Di Sulawesi, SEBUMI pecah, menjadi Perbum dan PBM.

Dipindai dengan CamScanner

"Tidaklah heran, karena semua konsepsi dan prosedure kongres disusun oleh Sekretariat KABM (baca SBM) yang menghendaki agar segala-galanya dapat diterima begitu saja oleh kongres, dan tidak menghendaki suara-suara yang tidak setuju yang mungkin akan dikeluarkan oleh organisasi-organisasi lain yang tidak diundang.

"Organisasi buruh adalah *BUKAN PARTAI POLITIK*, itulah sebabnya maka organisasi buruh yang anggotanya terdiri dari bekas atau belum/tidak bekerja dalam satu perusahaan sebetulnya *tidaklah mempunyai hak suara*. Dalam kongres ini nyata sekali, bahwa anggota SBM yang kebanyakan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan minyak (atau sudah non-aktip) merupakan lebih separoh jumlahnya dari yang hadhir.

"Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pihak yang tertentu tidak menghendaki bertambahnya suara-contra, karena mereka akan gagal dalam melaksanakan "maksudnya", jika semua organisasi minyak diundangnya.

Dalam akhir siaran tersebut dinyatakan :

"Tahukah para kongresisten, dengan kesalahan langkah untuk "MENFORCEER" fusi dengan tidak adanya pengertian yang sehat dalam sebahagian kongres tersebut, bukanlah nanti akan mewujudkan persatuan, tetapi menambah perpecahan yang lebih besar".

Kemudian melalui statemennya tanggal 25 Juli 1951, Pengurus Besar PBM menyatakan *"tidak mengakui sah, bahwa Kongres Fusi tersebut diselenggarakan dengan menggunakan atas nama Buruh Minyak seluruh Indonesia, yang nyata-nyata dipergunakan untuk mencapai maksud sesuatu golongan/partai politik"*.

Sementara itu, beberapa delegasi yang tergabung dalam Perbum Sumatra Selatan yang non-SOBSI merasa "terpukul", apalagi jika diingat bahwa merekalah sebenarnya yang pertama-tama mendirikan dan membina Perbum. Baay Salim, misalnya, yang merupakan Ketua yang pertama dari Pimpinan Pusat Perbum, sejak Kongres ini mengundurkan diri. Abdullah Thohir dan kawan-kawannya sekembalinya dari kongres berusaha mempertahankan nama "Persatuan Buruh Minyak" Plaju. Sedangkan Dr. A.K. Gani dan kawan-kawan pada tanggal 25 Agustus 1951, bertempat di Palembang mendirikan : *GPM* (Gerakan Perbum Merdeka), yang kemudian diubah namanya menjadi: *OBM* (Organisasi Buruh Minyak).

Di Surabaya, terjadi perpecahan baik dalam SBTMI maupun Serbumisi.

Di Sanga-Sanga, Serbumi tidak menggabungkan diri kepada Perbum, tetapi "hanya bekerja sama" dengan Perbum.

Di Balikpapan pada tanggal 17 September 1951 Perbum direbut oleh pengurus yang terdiri dari Kartono, A. Syahbaruddin dan Tan Siang Long anggota SOBSI.

Di Sulawesi, SEBUMI pecah, menjadi Perbum dan PBM.

Dipindai dengan CamScanner

Kongres "Tandingan"

Atas inisiatip dari Pengurus Besar PBM Jakarta, pada tanggal 4 - 11 Oktober 1951 bertempat dihotel "Salak" Bogor diadakan kongres yang dihadhiri oleh serikat-serikat buruh minyak yang non-SOBSI/non-Perbum, yaitu :

1. PBM Jakarta
2. SBTMI Surabaya
3. Serbumisi Surabaya
4. SKBM Balikpapan
5. PBM Tarakan
6. SBM Langkat
7. "Persatuan Buruh Minyak" Plaju
8. SBM Perlak.

Kongres ini adalah merupakan "spontanitas" dari buruh-buruh minyak yang non-komunis untuk mempertahankan existensinya sebagai gerakan buruh yang merdeka.

Keputusan-keputusan penting yang diambil dalam kongres ini ialah :

1. Membentuk FBMI (Federasi Buruh Minyak Indonesia).
2. Menetapkan "Tuntutan Umum" Konperensi Buruh Minyak di Bandung bulan Nopember 1950 sebagai "Tuntutan Umum" FBMI.
3. Menyusun Pimpinan Pusat FBMI, berkedudukan di Jakarta.

Jika diteliti periode antara tahun 1950 — 1951, dikalangan buruh minyak terjadi pertumbuhan, persatuan dan juga perpecahan. Sebagai gambaran bagaimana keadaan atau perimbangan keanggotaan buruh minyak yang bekerja di BPM antara Perbum/SOBSI dan non-Perbum (FBMI) pada pertengahan tahun 1952, adalah sebagai berikut [1]) :

Lokasi	*Anggota*	
	Perbum	*FBMI*
1. Kantor Pusat Jakarta	100	500
2. Kantor Jakarta	1.500	300

1) *Keterangan :*

(*) Sumber dari : "Arbeidszaken NV. De BPM Indonesia" tanggal 1 Januari 1953.

(*) Khusus Sanga-Sanga sejumlah 1.375 pegawai dinyatakan "neutral" (anggota Serbumi).

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi	*Anggota*	
	Perbum	*FBMI*
3. Bandung	125	60
4. Cirebon	60	—
5. Semarang	250	270
6. Lain-lain daerah di Jawa Tengah	—	280
7. Wonokromo	850	150
8. Surabaya	800	120
9. Lain-lain daerah di Jawa Timur	—	240
10. Cepu/Kawengan	1.250	—
11. Plaju	3.000	2.000
12. Prabumulih	1.800	60
13. Mangunjaya	250	—
14. Jambi	1.100	—
15. Palembang	300	10
16. Pangkal Pinang	40	—
17. Kantor Medan	—	475
18. Balikpapan	2.850	2.250
19. Tarakan	—	1.200
20. Bunyu	—	300
21. Samboja	140	30
22. Tanjung	410	—
23. Banjarmasin	80	—
24. Pontianak	50	—
25. Makasar	380	75
Jumlah :	15.335	8.320

Angka diatas menunjukkan dengan jelas, bahwa Perbum lebih unggul keanggotaannya dibandingkan dengan FBMI.

5. Keanggotaan dan kepemimpinan Perbum

Keanggotaan Perbum, dan juga serikat buruh lain sering mengalami perpindahan ataupun pergeseran dari satu SB ke SB yang lain. Pergeseran ini mungkin karena alasan-alasan yang sifatnya prinsipiil, tetapi juga karena alasan-alasan taktis.

Kalau diteliti mengenai keanggotaan Perbum, maka secara garis besarnya akan dapat digolongkan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. *Ideologis*

— pada umumnya telah menjadi anggota, calon anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka masuk menjadi anggota Perbum karena kesadaran terhadap ideologi komunis. Mereka ini pada umumnya menempati posisi kunci dalam kepemimpinan Perbum.

b. *Avonturir/ambisius*

— oknum yang menggunakan gerakan Perbum sebagai "batu loncatan" untuk mencapai jabatan atau carier yang lebih tinggi dalam pekerjaan, atau ingin memperoleh "nama" dalam lingkungan pekerjaan atau masyarakatnya. Pada type ini, ternyata dengan mudah masuk kedalam perangkap siasat-siasat Perbum. Mudah diperalat oleh Perbum untuk kepentingan politik yang telah digariskan oleh PKI.

c. *Mencari perlindungan*

— sebagai pegawai yang merasa lemah dalam posisinya, mencari perlindungan untuk mengurus kepentingan dirinya.

d. *Simpatisan*

— ia tidak terang-terangan menyatakan menjadi anggota Perbum. Tetapi setiap ada kegiatan Perbum ia ikut serta didalamnya atau juga memberikan bantuan berupa dana atau fasilitas tertentu.

e. *Ikut-ikutan*

— oknum ini resmi menjadi anggota Perbum. Mungkin keanggotaannya ini karena dalam keadaan terpaksa. Kadang-kadang ia sadar, bahwa keanggotaannya dalam Perbum tidak sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Tetapi karena ditempat/dilingkungan kerjanya mayoritas sudah menjadi anggota Perbum, kemudian ia menyatakan diri masuk sebagai anggota karena dalam keadaan "terpaksa".

Diluar lingkungan kerja ia mungkin menjadi anggota dari sesuatu organisasi massa lain yang azasnya berbeda atau berlainan dengan Perbum.

f. *Plin-plan*

— Type ini dapat terbagi menjadi dua kelompok :

Dipindai dengan CamScanner

Pertama : sebenarnya ia tergolong orang yang "mengerti" akan adanya "aliran" dalam sesuatu serikat buruh. Tetapi untuk mencari "selamat" ia juga memasuki serikat buruh yang lain, kadang-kadang keanggotaannya lebih dari 2 SB. Pada type ini dapat juga termasuk golongan avonturir.

kedua : bahwa ia tergolong orang yang sedang "bimbang". Sulit untuk menentukan pilihannya, karena itu ia juga masuk menjadi anggota SB yang lain.

Berdasarkan peraturan dasar Perbum yang diterima menjadi anggota Perbum ialah :

a. kaum buruh yang bekerja disegala bagian-bagian perusahaan minyak atau yang bekerja disemua badan/perusahaan lainnya yang kepentingan pekerjaannya tergantung dari perusahaan minyak.
b. pensiun buruh minyak.
c. orang-orang yang tenaganya dibutuhkan oleh organisasi.

Suatu syarat bagi seorang buruh minyak dapat diterima menjadi anggota Perbum apabila ia sudah menyatakan persetujuannya terhadap peraturan dasar Perbum. Dan sesuai dengan Pasal 3, ayat d. peraturan dasar Perbum, maka setiap anggota Perbum adalah juga anggota SOBSI.

Selanjutnya setiap anggota Perbum dinilai mengenai keaktipannya masing-masing, digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu anggota yang relatip aktip, sedang dan terbelakang. Kepada anggota yang relatip aktip diberikan perhatian yang terus-menerus, dididik (antara lain mengenai Marxisme) dan diorganisir sehingga mereka bisa menjadi "inti pimpinan" dikalangan massa anggota. Unsur "inti pimpinan" ini biasa disebut kader organisasi. Sedangkan dalam tingkatan kader inipun masih diadakan pembagian kedalam tiga kelompok, yaitu : *top kader* (kader tingkat tinggi), *mid kader* (kader tingkat menengah) dan *massa kader*. Pentahapan kaderisasi ini merupakan peristiwa penting, bahkan dianggap sebagai "paling penting" dalam roda organisasi Perbum. Karena kader-kader inilah yang sebenarnya sebagai penanggung-jawab utama terhadap "hidup atau mati"nya organisasi. Adanya tingkatan-tingkatan kepengurusan dalam Perbum sebenarnya hanya merupakan suatu formalitas belaka. Sebab, pengurus-pengurus ini sepenuhnya selalu dalam "kontrol dan komando" dari para kader organisasi, terutama dari top kadernya. Sedangkan mid-kader dan massa-kader mempunyai tugas terutama untuk menghimpun dan memobilisir anggota-anggota dari tingkatan sedang dan terbelakang.

Dipindai dengan CamScanner

Dibawah ini adalah struktur organisasi Perbum, yang menggambarkan jenjang-jenjang kepemimpinan dalam organisasi ini dari tingkat pusat sampai ketingkat bawah.

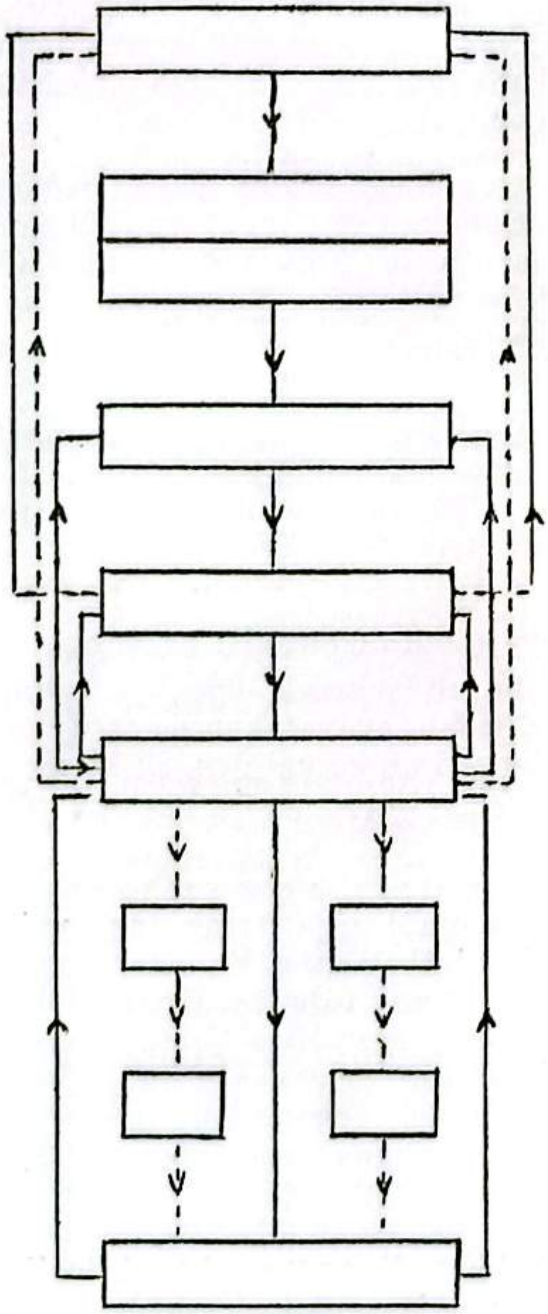

= *Kongres*

= *Pimpinan Pusat* (PP)

= *Dewan Pimpinan Pusat* (DPP)

= *Pimpinan Daerah* (PD)

= *Pimpinan Cabang* (PC)

= *Pimpinan Basis/Sektor* (PS)

= (Ressort)

= (Kelompok)

= *Anggota*

Keterangan singkat :

1. **Kongres**
   - adalah pimpinan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dari seluruh organisasi Perbum.
   - diadakan 3 tahun sekali, dihadhiri oleh utusan-utusan dari cabang-cabang dan atau sektor-sektor yang tidak mempunyai cabang.

Dipindai dengan CamScanner

2. **Dewan Pimpinan Pusat (DPP)**

* adalah kekuasaan tertinggi sesudah kongres.
* anggota-anggota DPP dipilih oleh kongres.
* menetapkan anggota Pimpinan Pusat (PP) dari antara anggota DPP.
* sekretaris umum PP adalah sebagai Ketua DPP.

3. **Pimpinan Pusat**

* adalah pelaksana keputusan-keputusan kongres dan keputusan-keputusan DPP serta keputusan-keputusan Dewan Nasional SOBSI.
* memberi petunjuk, mengontrol dan memimpin kegiatan organisasi bawahannya.
* mengesahkan berdirinya Perbum Daerah dan Cabang.
* mengatur hubungan dengan sekretariat DN Sobsi dan Trade Department WFTU.

4. **Pimpinan Daerah (PD)**

* adalah pelaksana keputusan-keputusan konferensi daerah (dihadhiri oleh pimpinan basis/sektor) dan keputusan-keputusan badan pimpinan Perbum dan Sobsi atasannya.
* memberi petunjuk-petunjuk, mengontrol dan memimpin kegiatan organisasi bawahannya.
* mengatur hubungan dengan Sobsi daerah.
* PD Perbum dibentuk untuk daerah Kalimantan, Jawa, Sumatra Selatan dan Sumatra Utara.

5. **Pimpinan Cabang (PC)**

* pelaksana keputusan-keputusan konperensi cabang (dihadhiri organisasi-organisasi basis/sektor).
* memberi petunjuk-petunjuk, mengontrol dan memimpin kegiatan organisasi bawahannya.
* mengatur hubungan dengan Sobsi cabang, mengunjungi rapat-rapat sektor dan rapat-rapat kerja yang diadakan oleh PD dan atau Sobsi cabang setempat.
* PC dibentuk pada tempat yang mempunyai lebih dari satu organisasi basis.

Dipindai dengan CamScanner

6. **Pimpinan Basis/Sektor (PS)**

* pelaksana keputusan-keputusan rapat-rapat sektor dan keputusan-keputusan badan-badan pimpinan organisasi Perbum dan Sobsi atasannya.
* memimpin langsung anggota-anggota dan kegiatan organisasi dibasis (jika terdapat anggota atau tempat yang luas dapat dibentuk ressort sampai ke kelompok-kelompok).
* menarik uang iuran, uang pangkal dan fonds perjuangan dan sebagainya.
* PS didirikan ditiap-tiap pemusatan tenaga kerja.

Periodisasi Kepemimpinan Perbum

Sesuai dengan ketentuan kongres Perbum, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Pimpinan Pusat (PP) dipilih tiap-tiap 3 tahun sekali. Sejak "kongres fusi" tahun 1951, pimpinan pusat Perbum sudah didominir oleh orang-orang SOBSI. Keadaan dalam pengurus Perbum di daerah-daerah sampai tahun 1953 masih terdapat adanya golongan lain, terutama dari golongan Murba yang masih bertahan dalam Perbum. Sedangkan dari golongan sosialis lebih cenderung untuk memperkuat FBMI, yang lambat laun dalam kongresnya di Salatiga tahun 1956 meleburkan diri kedalam satu serikat-buruh dengan nama SKBM [1]). Buruh minyak dari golongan Islam mulai memperkuat SBII, begitu pula dari golongan nasionalis mulai memperkuat KBKI. Dalam periode ini (1951 - 1953) pimpinan pusat Perbum melukiskan tugas utamanya antara lain sebagai berikut : "memelihara organisasi dari serangan-serangan keji pihak reaksi, berlawan gigih mencegah usaha reaksi yang hendak menghancurkan persatuan yang telah digalang dalam kongres fusi dengan segala ancaman-ancaman dan tindakan-tindakan fasistis seperti Undang-Undang Larangan Mogok Natsir, razzia Agustus Sukiman, peristiwa 17 Oktober dan sebagainya. Disamping itu tugas utama yang lain ialah "bersifat mempertahankan dan menghilangkan rasa ketakutan dari kaum buruh terhadap Perbum dan SOBSI ....." [2]).

Dalam pada itu, DPP Perbum pada tanggal 26 Mei 1952 mengirimkan penghargaan pada perayaan hari ulang tahun ke-32 PKI

---

1) Dalam tubuh SKBM inipun tampaknya masih terdapat pergeseran-pergeseran ideologis. Disatu pihak berusaha menjadikan SKBM menjadi anggota KBSI dibawah bendera PSI. Tetapi dilain pihak berusaha tetap mempertahankan sebagai SB yang independent.

2) Laporan Umum DPP Perbum dalam Kongres ke-III Perbum di Semarang, tanggal 10 s/d 16 September 1956.

Dipindai dengan CamScanner

berupa sehelai bendera merah, sebuah palu dan sebuah lampu bertanda palu-arit [1]).

Dengan demikian, nyatalah kiranya, bahwa meskipun dalam Peraturan Dasar Perbum tidak satu ayatpun yang menegaskan hubungan antara Perbum dan PKI, tetapi dalam tingkah laku politiknya nyata-nyata bahwa Perbum adalah merupakan mantel organisasi PKI.

Ketika dalam bulan September 1953 diadakan kongres ke-II Perbum di Surabaya, maka golongan-golongan yang non-SOBSI mulai tersingkir dalam pimpinan tingkat pusat dan tingkat daerah. Sedangkan ditingkat cabang, golongan non-SOBSI hanya menduduki bagian-bagian yang kurang penting. Baru pada tahun 1956 yaitu menjelang dilangsungkannya pemilihan umum pertama di Indonesia dan menjelang kongres ke-III Perbum di Semarang, kepengurusan Perbum sampai ketingkat cabangnya sama sekali telah bersih dari orang-orang yang bukan merupakan pilihan atau "saringan" dari SOBSI. Meskipun untuk menjadi pengurus Perbum harus dilakukan pemilihan secara "bebas dan demokratis", tetapi siapa yang telah diprojektir oleh SOBSI, sudah dapat dipastikan akan menduduki pos-pos atau seksi-seksi kepengurusan. Pada periode ini (sekitar 1956) usaha-usaha untuk merongrong Perbum sulit untuk berhasil karena garis konsolidasi SOBSI/PKI sudah lebih rapi. Hal ini juga sejalan dengan semakin rapinya jaringan-jaringan PKI ditanamkan pada lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk jaringan-jaringan didalam tubuh Angkatan Perang R.I. Disamping itu, suhu politik menjelang pemilu pertama semakin meruncing, dan ini berpengaruh luas pada setiap unit-unit industri minyak. Golongan-golongan dari Masyumi, PNI dan Murba meninggalkan organisasi Perbum secara diam-diam dan memperkuat organisasi buruh yang berinduk kepada masing-masing partai tersebut. Maka mulai kelihatan aktivitas Seksi Minyak SBII (Masyumi), Seksi Minyak KBKI (PNI), Sarikat Buruh Minyak Indonesia disingkat Saribumi (Partai Murba).

Dengan demikian, sejak tahun 1956 pengaruh Masyumi, Murba dan PNI sudah hilang dalam tubuh Perbum. Untuk kesekian kalinya Pimpinan Perbum berhasil mengkonsolidir organisasinya. Keanggotaannya semakin luas. Juga beberapa anggota pimpinan (staff) mulai masuk memperkuat organisasi ini. Misalnya dengan masuknya Martin Turangan dan Ishak Muklar di Balikpapan atau Kho Hok Liong di Surabaya menambah tenaga-tenaga terdidik dalam Perbum. Tenaga-tenaga seperti ini oleh Perbum disebut "grup intelektuil", yang dipandang dapat mempermudah program perluasan keanggotaan dikalangan pegawai pimpinan.

---

1) Bunyi selengkapnya surat penghargaan Perbum kepada PKI dicantumkan pada lampiran No. III.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya pada periode sesudah kongres ke-IV di Cepu tahun 1961, konsolidasi Perbum seluruhnya dijuruskan pada aksi-aksi yang bersifat politis. Hal inipun sejalan dengan perluasan program dan tuntutan-tuntutan PKI dibidang politik.

Jika dihubungkan pola kepemimpinan Perbum dengan SOBSI dan PKI, maka secara singkat dapat diikhtisarkan seperti dibawah ini :

PKI	=	*penentu/pemegang* strategi politik.
SOBSI	=	*pembagi* strategi politik PKI.
PERBUM	=	*pelaksana* strategi politik PKI.

6. Merebut Massa

Setelah Perbum sepenuhnya berada dibawah panji-panji SOBSI, maka semua masalah perburuhan dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik PKI. Sebagaimana diketahui, CC-PKI telah menetapkan "program 4 pasal" sebagai "petunjuk dan pedoman" bagi setiap komunis untuk melakukan kegiatannya sehari-hari dilapangan kerjanya masing-masing. Salah satu program itu menyatakan, bahwa untuk melawan musuh-musuh asing jalan keluarnya terletak dalam membangkitkan, memobilisir dan mengorganisir massa terutama kaum buruh dan tani. Bagi SOBSI, dan juga bagi Perbum, setiap majikan baik nasional ataupun asing atau baik modal dalam negeri maupun luar negeri kesemuanya dinyatakan sebagai kekuasaan kaum penindas dan penghisap darah kaum buruh yang harus dihadapi dan sedapat mungkin dihancurkan. Teori ini yang lazimnya disebut teori "pertentangan kelas" ditawarkan kepada kaum buruh Indonesia yang keadaan sosial-ekonomisnya masih sangat lemah. Demikianlah bagi Perbum, teori perjuangan ini agaknya lebih menguntungkan untuk memperoleh massa anggota yang sebesar-besarnya berkenaan lawan yang dihadapinya selalu dengan majikan-majikan minyak asing yang secara populer dinyatakan sebagai kaki-tangan kapitalisme dan imperialisme internasional. Sementara itu para petugas Perbum atau Sobsi yang telah terlatih dan memperoleh gelar massa kader dalam membela kepentingan anggotanya tidak segan-segan menunjukkan sikap yang agresip,

Dipindai dengan CamScanner

militant dan disertai penuh keuletan. Sikap atau tingkah laku seperti ini memungkinkan memperoleh pengaruh dan simpati dikalangan buruh yang selain keadaan sosial-ekonomisnya masih lemah juga dipandang dari segi pendidikan pada umumnya belum tinggi. Adapun cara yang populer bagi Perbum untuk memperoleh massa anggota ialah dengan mengajukan tuntutan-tuntutan dibidang upah, syarat-syarat kerja dan jaminan sosial lainnya kepada pihak majikan. Tuntutan-tuntutan ini selalu lebih banyak atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tuntutan dari SB-SB lainnya. Setiap tuntutan yang diajukan oleh Perbum selalu disertai dengan agitasi, intimidasi dan ancaman mogok. Ancaman, intimidasi ataupun agitasi tersebut tidak saja ditujukan kepada pihak majikan, tetapi juga ditujukan kepada lawan-lawan politik Perbum baik sebagai pribadi, sebagai pejabat serikat buruh ataupun sebagai pejabat Pemerintah.

Ketika Perbum baru saja dalam orbit SOBSI, maka yang menjadi sasaran bulan-bulanan ialah organisasi buruh PBM dibawah pimpinan J.A. Datuk Raja Bangun dan Menteri Perburuhan Tejasukmana. Dapat dipahami, mengingat kedua tokoh ini masing-masing dikenal sebagai orang PSI dan Partai Buruh yang juga merupakan lawan-lawan politik PKI. Untuk mempengaruhi massa kaum buruh agar masuk menjadi anggota Perbum, Sumaryo Legowo yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Propaganda/Penerangan Perbum Cabang Jakarta mengeluarkan siaran dengan judul "Rol Tuan Datuk Raja Bangun Sebagai Agen Majikan" [1]).

Dengan bahasa yang khas digunakan oleh kaum komunis, Sumaryo melancarkan caci-maki kepada Datuk Raja Bangun yang pada waktu itu mempunyai pengaruh cukup besar dikalangan buruh-buruh minyak. Pola caci-maki seperti ini sama halnya ketika Darsono melancarkan kritik kepada HOS Cokroaminoto yang pada waktu itu berpengaruh dikalangan sebagian besar rakyat Hindia Belanda. Dalam siaran itu antara lain ditulis sebagai berikut :

> "Penggabungan kawan-kawan buruh minyak anggota PBM kepada Perbum yang kian hari kian bertambah dan masih terus bertambah, adalah salah satu diantara banyak bukti bahwa kaum buruh minyak sudah sadar akan klasnya dan tidak sudi lagi dipecah-belah oleh agen-agen kaum kapitalis. Kesadaran ini makin dipertinggi lagi oleh tindakan-tindakan dan sikap tuan Datuk sendiri, yang karena telah ditinggalkan oleh sebagian besar anggota-anggotanya lalu berdaya upaya untuk memecah kembali buruh minyak yang telah bergabung dalam barisan Perbum, walaupun dengan jalan yang hina dan busuk, yang sebenarnja tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai Pemimpin Besar PBM.

---

1) Tertanggal Jakarta, 28 Maret 1952.

Dipindai dengan CamScanner

"Kali ini kawan-kawan buruh minyak membuka lagi suatu kenyataan, bahwa tuan Datuk tidak lain hanya agen kaum modal monopoli (majikan) minyak yang bertugas memecah belah barisan buruh minyak yang anti penindasan/penghisapan, dan mendirikan organisasi buruh yang lunak yang bisa untuk selama-lamanya ditindas dan dihisap, yaitu PBM.

"Kita masih ingat persetujuan tuan Datuk dengan majikan tentang upah pokok Rp. 6,— persetujuan tentang perlop tahunan dan penghapusan perlop panjang ..... yang kesemuanya itu seolah-olah merupakan hasil perjoangan tuan Datuk, tetapi yang sebenarnya ialah suatu persesongkolan antara majikan dengan begundalnya (tuan Datuk), untuk mematahkan tuntutan Perbum yang lebih tinggi. Persesongkolan antara kaum modal monopoli dengan agen-agennya semacam itu memang dibenarkan oleh tuan Tejasukmana (ketua II Partai Buruh) yang kebetulan menjadi Menteri Perburuhan.

"..... inilah sebab-sebabnya, mengapa kaum majikan dengan begundal-begundalnya seperti tuan Datuk itu selalu merintangi perjoangan kita. Dan inilah sebabnya, mengapa segala putusan-putusan P4-Pusat yang diketuai oleh tuan Tejasukmana itu selalu merugikan bagi buruh....."

Di Kalimantan Timur, yang dijadikan sasaran kritik dan caci-maki ialah SKBM dibawah pimpinan S. Mewengkang. Ketika misalnya pada tanggal 25 Nopember 1951 diadakan persetujuan antara SKBM dengan pihak BPM mengenai "tunjangan keluarga", maka Perbum Tanjung dan Serbumi Sanga-Sanga mengadakan serangan kepada pihak SKBM dan menuduhnya sebagai "reformis yang memperlemah gerakan kaum buruh minyak, dan sebaliknya memperkuat kedudukan kaum majikan monopoli asing". Juga di Sumatra Selatan dan lain-lain tempat diperusahaan minyak, pihak Perbum selalu melancarkan kritik atau caci-maki dan tidak segan-segan menjadikan "kambing hitam" bagi lawan-lawan yang dianggapnya merupakan penghalang bagi cita-cita perjoangannya. Tetapi pada suatu keadaan tertentu, Perbum juga dengan lihay sekali merangkul lawan-lawan politiknya tadi seraya dengan halusnya melakukan adu-domba diantara mereka.

Aksi-aksi massa

Untuk memobilisir massa, disetiap cabang Perbum dibentuk "Komando Aksi". Aparat ini tidak hanya bertugas mengkoordinir aksi-aksi buruh minyak, tetapi juga termasuk dikalangan keluarga mereka. Aksi-aksi ini selain untuk memperkuat tuntutan-tuntutan Perbum kepada pihak majikan juga ditujukan untuk menaikkan semangat dan solidaritas dikalangan massa anggota dan keluarganya. Misalnya jika terjadi persoalan mengenai pembagian susu kaleng/bubuk, maka isteri-isteri anggota Perbum yang mempunyai bayi dikerahkan untuk mendatangi pimpinan perusahaan. Sambil menggendong bayi, mereka beramai-ramai memasuki ruang kerja pimpinan, dan diantara ibu-ibu ini ada yang meletakkan bayinya diatas meja pimpinan perusahaan tersebut sambil mengatakan : "mana susu untuk bayi saya ....." !

Dipindai dengan CamScanner

Jika Perbum melakukan perundingan dengan pihak pengusaha, pertama-tama pihak delegasi Perbum minta kepada wakil pengusaha yang hadhir dalam pertemuan itu untuk membuka pintu selebar-lebarnya. Apabila terdapat jendela dalam ruang perundingan juga diminta untuk dibuka. Dengan demikian, para anggota yang dikerahkan oleh "Komando Aksi" dapat melihat jalannya perundingan tersebut. Setiap wakil Perbum berbicara selalu diberikan applause, dengan meneriakkan yel-yel atau tepukan tangan. Tetapi sebaliknya jika wakil pengusaha yang berbicara, maka pada momentum tertentu dilakukan ejekan atau sisisme, misalnya dengan tertawa. Cara berunding seperti ini selain untuk melemahkan mental wakil pengusaha, disamping itu, dan ini tampaknya yang lebih penting ialah untuk memperluas pengaruh Perbum.

Semua tuntutan-tuntutan ini yang selalu disertai dengan ancaman mogok merupakan alat yang sangat populer untuk menarik massa buruh. Selain ancaman-ancaman mogok yang dilakukan oleh Perbum untuk menunjang tuntutannya, maka cara-cara lain yang biasa digunakan ialah dengan mengadakan panflet, poster, coret-coret, seruan-seruan, desakan-desakan, aksi-kumbang [1]), mengirim delegasi beramai-ramai secara bergelombang, mengirim petisi dan sebagainya.

Satu hal lain yang sangat menarik ialah, bahwa semua tuntutan atau kegiatan Perbum tersebut selalu disiarkan melalui bulletin atau surat-edaran Perbum atau dimuat dalam surat-kabar beraliran komunis, terutama "Harian Rakyat". Sampai-sampai tuntutan yang dilakukan oleh ressort atau basis Perbum dimuat dalam harian-harian ini. Dengan demikian, merekapun dengan sadar melaksanakan sebaik-baiknya salah satu ajaran Karl Marx yang meyatakan, bahwa fungsi utama surat-kabar ialah sebagai "organisator massa". Dan merebut massa sebanyak-banyaknya adalah termasuk pekerjaan yang harus dijalankan oleh mantel-mantel setiap partai komunis. Doktrin mereka menyatakan ..... "tujuan politik yang benar daripada Partai hanya bisa dicapai dengan kekuatan massa yang luas. Kita harus berhubungan erat dengan massa. Kita harus memimpin massa maju kemuka .....".

Setelah bekerja dengan sangat tekun dan sungguh-sungguh, maka pada permulaan tahun 1965, Perbum dapat merebut ± 44% dari seluruh jumlah buruh minyak. Perincian pada masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut [2]) :

---

1) Aksi ini dilakukan dengan melalui telpon, berbicara berulang-ulang dengan pihak pengusaha ; atau pada saat-saat tertentu, 4 — 5 orang massa kader Perbum berjalan kaki atau naik sepeda didepan rumah para pejabat pimpinan perusahaan sambil berteriak "Hidup Perbum", dan sebagainya.

2) Selanjutnya lihat lampiran IV/1.

Dipindai dengan CamScanner

— Permina : 0 — 3 %
— Pertamin : 50 — 60 %
— Permigan : 90 — 95 %
— PT Shell : 60 — 70 %
— PT Stanvac : 55 — 65 %
— PT Caltex : 50 — 60 %

Sedangkan perbandingan dari jumlah pegawai yang menjadi anggota serikat buruh pada unit-unit Pertamina dan perusahaan minyak asing lainnya pada saat proloog dan epiloog G.30.S/PKI dapat terlihat pada Lampiran No. IV/2.

7. Perbumisasi PN PERMIGAN

"Dari Cepu dimulai kemenangan kaum buruh minyak dan diakhirinya modal monopoli asing", demikian pernyataan pimpinan Perbum ketika menyambut pelantikan Sumaryo Legowo menjadi Presiden Direktur PN Permigan. Dalam pidato serah terima jabatan pada tanggal 7 Nopember 1964, Sumaryo Legowo antara lain menyatakan :

> "Sebagai wakil Ketua II Pimpinan Pusat Perbum saya diangkat oleh Pemerintah menjadi Presiden Direktur PN. Permigan, menggantikan Saudara Nirwono Yudo SH. Sudah terang pengangkatan ini merupakan suatu kehormatan dan sekaligus beban dan tanggung-jawab yang besar dan berat, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi organisasi saya, yaitu Perbum ....."

Peristiwa ini merupakan rangkaian sejarah minyak Indonesia, dimana setelah melakukan perjuangan yang berliku-liku, gigih dan tekun akhirnya Perbum dapat menguasai salah satu perusahaan negara yang mempunyai kedudukan strategis dan vital. Banyak kalangan berpendapat, bahwa "jatuhnya" Permigan kedalam penguasaan pimpinan Perbum lebih banyak terdorong karena adanya "bargaining power" dikalangan kaum politisi, jelasnya antara Pemerintah disatu pihak dengan PKI dilain pihak. Politik "nasakomisasi disegala bidang" dimanfaatkan oleh PKI. Dalam hubungan ini bukan saja usaha mereka sebagian dapat berhasil dibidang perminyakan, tetapi juga sudah berhembus dalam kepemimpinan Angkatan Perang RI. Sukses Perbum dalam menguasai PN Permigan juga dapat dipandang setelah melalui suatu proses pembinaan yang dimulai sejak tahun 1945. Melalui organisasi SBM yang didirikan pada tahun 1946, kaum komunis berusaha memperluas pengaruhnya dikalangan perusahaan minyak milik Belanda yang dijadikan Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN). Setiap usaha pengembalian PTMN kepada pemiliknya semula ditentangnya dengan gigih. Pembentukan "Lasykar Minyak" yang sebenarnya berfungsi sebagai pengawal dan penjaga keamanan perusahaan ternyata dapat

Dipindai dengan CamScanner

dipengaruhi oleh kaum komunis, dimana pada tahun 1948 pasukan ini ikut terlibat melakukan pemberontakan melawan RI. Demikian juga misalnya ketika dibentuk "Dewan Perusahaan" PN Permigan, dari 5 orang yang diangkat, 3 diantaranya yang mewakili unsur buruh semuanya dari Perbum. "Dewan Perusahaan" ini dijadikan alat oleh Perbum untuk menguasai jalannya roda perusahaan. Perbum dengan gigih menolak setiap usaha dari serikat buruh atau golongan lain menjadi anggota "Dewan Perusahaan" dengan alasan bahwa serikat buruh yang lain ini keanggotaannya kurang dari 30% dari jumlah buruh yang ada [1]).

Dari kenyataan-kenyataan ini dengan sendirinya memberikan petunjuk, bahwa sejak permulaan berdirinya PTMN sampai statusnya yang terakhir menjadi PN Permigan tahun 1961, pengaruh golongan komunis tampak kuat sekali. Banyak bagian-bagian yang pada umumnya bersangkutan dengan para pegawai dipegang oleh aktivis Perbum. Bagian keamanan perusahaan dikepalai oleh Kasbani yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang Perbum. Sedangkan Kasbani sendiri adalah sebagai Koordinator Organisasi Basis Perbum Cepu. Kepala bagian angkutan dan hubungan masyarakat masing-masing dipegang oleh Rakhmat dan Sarjono, keduanya adalah pimpinan cabang Perbum, yang juga sebagai anggota Dewan Perusahaan.

Pada tanggal 14 Juli 1962 dilingkungan PN Permigan oleh Direksi dibentuk OBOR (Organisasi Budaya dan Olahraga) dimana para pengurus organisasi ini sepenuhnya terdiri dari orang-orang Perbum. Tenaga-tenaga seperti R.M.M. Kusumo Utoyo, R. Widya Maladi Yusuf, Tuku W. Basuki yang sering menempati jabatan-jabatan atau team-team khusus adalah merupakan konspirator gerakan komunis dalam Permigan.

Sebagai puncak sukses kaum komunis menguasai PN Permigan ialah ketika Sumaryo Legowo dan R.M.M. Kusumo Utoyo pada tanggal 27 Agustus 1964 masing-masing diangkat sebagai Presiden Direktur dan Direktur PN Permigan. Dalam hubungan ini Sumaryo Legowo dalam pidato serah terima jabatan dari Nirwono Yudo menjelaskan mengenai kepemimpinannya sebagai berikut :

> "Mungkin ada yang menganggap, bahwa peristiwa ini sangat luar biasa, yaitu seorang pemimpin buruh diangkat menjadi pemimpin perusahaan. Tetapi apabila kita mengikuti, apalagi ikut serta secara aktip dalam perjoangan menyelesaikan Revolusi, maka tidaklah ada alasan bagi timbulnya anggapan bahwa

---

1) Berdasarkan Pasal 4, ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 45/1960, setiap wakil SB harus didukung oleh sedikitnja 30% dari jumlah buruh yang bekerja dalam perusahaan. Pada tahun 1964, PN. Permigan mempunyai jumlah pegawai ± 2150 orang, dari jumlah mana lebih dari 2000 orang menjadi anggota Perbum.

Dipindai dengan CamScanner

peristiwa ini luar biasa. Mungkin pula ada yang menganggap luar biasa dari segi kenyataan, bahwa saya bukanlah akademisi [1]). Tetapi didalam Revolusi, inipun bukan sesuatu yang luar biasa, seperti telah ditegaskan oleh P.Y.M. Presiden Sukarno dalam pidato TAVIP-nya.

"Ditinjau dari hukum-hukum Revolusi, peristiwa ini hanyalah merupakan salah satu perwujudan dari dialektikanya Revolusi, yaitu perpaduan antara Revolusi dari bawah dan dari atas seperti disebut dalam MANIPOL....."

Dalam kutipan pidato Sumaryo diatas kiranya memberikan penjelasan, bahwa segala sesuatu peristiwa itu dapat serba mungkin terjadi apabila kesemuanya didasarkan pada "hukum-hukum Revolusi". Tidak terkecuali ia sebagai pemimpin buruh, yang juga merangkap sebagai pemimpin suatu perusahaan.

Dominasi politik

Demikianlah jika diteliti lebih lanjut pidato atau pernyataan-pernyataan Sumaryo Legowo selama ia menjabat Presiden Direktur PN Permigan akan memberikan kesan bahwa kepemimpinannya itu tidak berbeda dengan pimpinan suatu partai politik. Dalam pidatonya pada halal-bihalal PN Permigan tanggal 12 Pebruari 1965 di Cepu, ia mencanangkan bahwa minyak sebagai emas-cair mempunyai peranan menentukan, baik dipandang dari ekonomi maupun dari segi politik. "Minyak bumi memegang peranan penting, dan sekarang seluruh dunia terbakar oleh politik minyak. Ini semua membuktikan betapa pentingnya dan betapa jelasnya bahwa persoalan minyak adalah soal prinsip .....", katanya. Selanjutnya ia berkata sebagai berikut : "Kita tidak menutup mata dan menipu diri, bahwa keadaan ekonomi kita terasa parah. Tetapi kita bantah sekerasnya, bahwa keadaan ekonomi yang gawat ini adalah karena kita berkonfrontasi dengan "malaysia", karena kita menjalankan aksi-aksi melawan imperialis. Sebaliknyalah, untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi ini, kita harus dengan tegas dan berani berkonfrontasi dengan "malaysia", dengan imperialis Inggris, dengan imperialis Amerika Serikat dan didalam negeri melawan dan menyingkirkan kaum dinasti-ekonomi dan kaum kontra revolusi lainnya .....".

Membela politik PKI

Ketika pada awal tahun 1965 kaum komunis Indonesia melancarkan aksi-aksi sepihak diantaranya melakukan penyerobotan

---

1) Sumaryo Legowo dilahirkan di Purworejo, pernah memasuki Schakelschool, tetapi tidak tamat. Sebagai pemuda yang hidupnya mengalami kesusahan, ia mula-mula bekerja pada perusahaan sabun. Karena mungkin kurang puas, kemudian ia pindah ke Surabaya dan bekerja sebagai montir radio. Sekitar tahun 1950 ia pindah ke Jakarta, bekerja pada sekretariat SOBSI. Pada tahun 1952 ia mulai membina Perbum Jakarta Raya, dan pada tahun 1953 menjabat sebagai Ketua Perbum Jakarta Raya. Pada tahun 1956 — 1962 ia mewakili SOBSI sebagai anggota pengganti P4-Daerah Jakarta. Pada tahun 1963 ia diangkat menjadi anggota "Dewan Perusahaan" PN. Permina.

Dipindai dengan CamScanner

tanah, atau menuntut penggantian pejabat ini dan itu, maka dalam kesempatan pidatonya tanggal 17 Maret 1965 dengan judul "Satukan Pikiran dan Satukan Tindakan", Sumaryo Legowo menuduh lawan-lawan politiknya "..... melampiaskan segala nafsu sisa-sisa kekuatannya untuk menimbulkan kekacauan-kekacauan, memecah-belah persatuan nasional dan melakukan terror-terror biadab, baik didesa-desa maupun dikota-kota seperti di Yogya, Malang dan lain-lain daerah. Kaum kontra revolusi ini, unsur-unsur bekas partai terlarang Masyumi/PSI/Murba, unsur-unsur DI/TII, bersekutu dengan kaum dinasti-ekonomi dan kapitalis birokrat tidak saja menjalankan insinuasi, provokasi dan intimidasi-intimidasi, tetapi sudah berbuat nekad dengan praktek-praktek terror konform pola DI/TII .....". Pada saat menjelang peristiwa G.30.S/PKI, Soemaryo Legowo membentuk "Team Tetap Indoktrinasi PN Permigan" yang mempunyai tugas untuk mengindoktrinasi para pejabat dan pegawai PN Permigan dan PT Shell Indonesia[1]), baik ditingkat Direksi, maupun sampai didaerah-daerah/unit perusahaan terendah dari kedua perusahaan tersebut. Ditegaskan oleh Sumaryo Legowo bahwa dalam pembangunan mental, tidak kalah pentingnya adalah indoktrinasi politik, dimana diharapkan timbulnya suatu pandangan yang lebih luas mengenai kemasyarakatan dan revolusi — dengan mana phobi terhadap NASAKOM akan dapat dikikis. "Hal ini akan sangat membantu bukan saja untuk menciptakan iklim yang harmonis dalam perusahaan, akan tetapi lebih jauh akan sangat membantu bagi perjuangan penyelesaian revolusi", katanya menambahkan. Berkenaan dibentuknya pasukan-pasukan sukarelawan dalam menghadapi "Malaysia", dilingkungan PN Permigan juga dibentuk sukarelawati-sukarelawati yang tidak saja terdiri dari pegawai-pegawai wanita saja, tetapi juga terdiri dari isteri-isteri pegawai. Pada tanggal 1 Juli 1965, ketika diadakan peringatan ulang tahun ke-IV berdirinya PN Permigan, Sumaryo antara lain menyatakan : "Dan mengingat situasi yang makin gawat, kita bermaksud untuk meningkatkan jumlah sukarelawan-sukarelawan dan memperbanyak latihan-latihan kemiliteran. Memang kita sebagai pegawai-pegawai dan buruh-buruh tidak hanya harus pandai dalam pembangunan perusahaan, akan tetapi juga harus pandai ikut serta mempertahankan tanah air dari serangan musuh. Berhubung dengan itu, maka gagasan adanya Angkatan ke-V dalam rangka mengganyang nekolim adalah perlu segera direalisir .....". Pidato penting Sumaryo Legowo ini adalah bertepatan dengan semakin kerasnya desakan RRC (Republik Rakyat Cina) kepada Bung Karno untuk membentuk Angkatan ke-V, disamping Angkatan Bersenjata RI. Dalam masya-

---

1) Sesuai dalam perjanjian "kontrak karya", maka PT. Shell adalah merupakan "partner" PN. Permigan.

Dipindai dengan CamScanner

rakat, desakan RRC ini disalurkan melalui PKI dan Panglima Angkatan Udara Omar Dhani — yang dalam pernyataan-pernyataannya ikut menuntut dipercepatnya persenjataan kaum buruh dan tani untuk mengganyang "nekolim dan musuh-musuh revolusi".

Demikianlah sampai meletusnya peristiwa G.30.S/PKI, dapatlah disimpulkan bahwa PN Permigan berada sepenuhnya dalam kekuasaan kaum komunis. Dan barulah pada tanggal 25 Oktober 1965, ketika dikeluarkan surat-keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi [1]) pimpinan PN Permigan dapat dibebaskan dari pengaruh golongan komunis, dengan dibentuknya Direksi Sementara yang terdiri dari Mayor Jenderal TNI Dr. Ibnu Sutowo sebagai Ketua, Ir. Sutan Assin, Letnan Kolonel R. Sudarsono dan R.P. Suhardi masing-masing sebagai Anggota.

8. Proloog G.30.S/PKI

Aksi-aksi politik Perbum dibidang perminyakan sejalan dengan aksi-aksi politik PKI dibidang yang lain. Sesuai dengan program umum SOBSI, yang juga menjadi program umum Perbum, bahwa "perjuangan untuk perbaikan nasib sehari-hari tidak bisa dipisahkan dari perjuangan politik" [2]), maka aksi-aksi politik yang dilakukan oleh Perbum dihubungkan dengan setiap issue politik baik yang terjadi di Indonesia ataupun diluar negeri. Kita bisa mencatat, misalnya issue mengenai "kabinet kaki-empat", "demokrasi terpimpin", "nasakom", "dekon", "terusan Zues", "perang Vietnam" dan sebagainya, oleh Perbum dijadikan issue untuk memperkuat strategi politik PKI dibidang perminyakan.

Ketika pada tahun 1960 Pemerintah Kuba mengambil-alih kongsi minyak Amerika "Texaco", "Standard Oil Company" serta "Shell", maka pimpinan Perbum mengirimkan surat dukungannya kepada gabungan buruh minyak Kuba. Dalam surat Perbum ini dinyatakan bahwa penolakan kongsi-kongsi tersebut untuk memasak minyak mentah yang dibeli oleh Pemerintah Kuba dari Uni Soviet bukanlah alasan komersiil, melainkan "mempunyai latar belakang untuk mensabot perkembangan ekonomi nasional Kuba dan kerjasama Kuba dengan Uni Soviet". Juga dinyatakan oleh Perbum dalam suratnya itu, bahwa "tujuan kaum buruh Kuba dengan kaum buruh Indonesia adalah sama, yaitu mengusir kolonialisme dan imperialisme dari permukaan bumi".

Pada waktu pengiriman kapal induk "Karel Doorman" ke Irian Barat sewaktu terjadi "konfrontasi total" antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda, maka dengan serta merta Perbum mendukung

---

1) SK. No. 145/M/Migas/1965.

2) "Garis perjuangan Perbum", halaman 3, tahun 1956.

Dipindai dengan CamScanner

pernyataan SOBSI yang mendesak tindakan tegas Pemerintah untuk mengambil alih semua saham-saham Belanda dalam perusahaan campuran dan melakukan protes kepada Pemerintah Amerika Serikat dengan disertai tindakan ambil-alih semua perusahaan Amerika Serikat di Indonesia. Dalam pernyataannya ini Perbum berkeyakinan bahwa langkah-langkah tegas tersebut adalah sesuai dengan Manifesto Politik RI dan pasti akan memperkuat kedudukan RI kedalam dan keluar serta pasti pula mendapat dukungan penuh dari seluruh Rakyat Indonesia dan solidaritas Rakyat-rakyat dan negara-negara didunia yang cinta kemerdekaan dan anti imperialis. Selanjutnya Perbum menolak penanaman modal minyak asing baru dalam bentuk apapun juga datangnya serta menuntut dibatalkannya undang-undang penanaman modal asing [1]). Satu tahun kemudian, yaitu dalam tahun 1961, Perbum mendesak kepada Pemerintah untuk mempercepat pengambil-alihan perusahaan minyak BPM, Stanvac dan Caltex berdasarkan "Manipol-Usdek dan demi kelancaran pelaksanaan rencana 8 tahun pembangunan nasional semesta berencana" [2]).

Aksi-aksi Perbum pada tahun 1963 semakin tampak meningkat. Dalam melakukan aksi-aksi politik ini, Perbum dengan tekun membina "front persatuan" diantara organisasi buruh lain. "Front Persatuan" seperti KABM, KSOBM [3]), BKSBM [4]), Front Nasional dan lain-lainnya digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai strategi umum PKI, yaitu menguasai Indonesia. Di Balikpapan, misalnya, pada tanggal 16 September 1963 dilancarkan aksi "Ganyang Malaysia" dalam bentuk corat-coret disemua objek bangunan (termasuk rumah-rumah) atau kendaraan milik PT Shell dan "tidak bicara atau melayani" orang-orang Inggris. Dalam aksi corat-coret itu dilakukan penulisan pada semua bangunan gedung yang sifatnya berbentuk slogan-slogan seperti "ganyang malaysia", "usir imperialis", "sita modal asing". Tetapi corat-coret itu ada yang bersifat intimidasi dan bersifat pribadi, misalnya dengan menuliskan "ganyang kaki-tangan asing" pada beberapa rumah yang didiami oleh senior staff bangsa Indonesia. Sedangkan dalam aksi "tidak bicara dan melayani" orang-orang asing, aksi Perbum yang disalurkan dengan menggunakan alat KSOBM dan melibatkan Front Nasional dapat dikatakan mencapai maksudnya. Suasananya begitu mencekam, sehingga tidak satupun orang Indonesia yang berani berbicara apalagi melayani (termasuk memberikan minuman dan

---

1) Harian Rakyat, 27 Juli 1960.

2) Ibid, 9 Januari 1961.

3) Kerja Sama Organisasi Buruh Minyak, didirikan di Balikpapan.

4) Badan Kerja Sama Buruh Minyak, didirikan di Surabaya.

Dipindai dengan CamScanner

sebagainya) terhadap orang asing. Keadaan yang mencekam ini berlangsung sampai tiga bulan lamanya. Pada akhir tahun 1963 terjadilah pengungsian besar-besaran, sehingga tidak ada seorang asingpun yang masih bekerja diperusahaan Shell di Balikpapan.

Sementara itu tampaknya terjadi perundingan antara Pemerintah dengan Pemerintah Inggris. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Balikpapan, maka tenaga-tenaga asing yang berkebangsaan Inggris digantikan oleh tenaga-tenaga dari Amerika Serikat, Perancis, Swiss, Italia, Amerika Latin, Jerman Barat, Skandinavia dan lain-lainnya. Tetapi belum reda suasana ketegangan ini, maka pada tanggal 20 Januari 1964, dengan menggunakan alat KABM, Perbum mengambli alih kantor pusat Shell di Jakarta. Bendera Shell diturunkan, diganti dengan bendera buruh dan Merah Putih. Kendaraan-kendaraan perusahaan dan tembok-tembok kantor ditulisi "Milik RI". Kemudian pada tanggal 23 Januari 1964, Shell Plaju dan Balikpapan secara serentak diambil-alih atas nama KABM, sedangkan Shell Surabaya diambil-alih atas nama BKSBM. Di Semarang, Perbum dan SBMSI/GSBI menyatakan telah mengambil alih perusahaan Shell dan menyerahkan kepada Gubernur Jawa Tengah [1]).

Menghadapi aksi-aksi yang dilancarkan oleh KABM, BKSBM ataupun KSOBM yang dipelopori oleh Perbum ini, Presiden/Panglima Tertinggi mengeluarkan radiogram yang ditujukan kepada para Panglima Daerah/Maritim/Regional/Udara/Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, semua Kepala Polisi dan Jaksa Tinggi mengenai larangan ambil-alih perusahaan-perusahaan milik Inggris (termasuk PT Shell Indonesia). Kemudian tanggal 5 Maret 1964, keluar suratedaran Wakil Perdana Menteri III yang ditujukan kepada para Menteri, yang isinya menegaskan kembali bahwa :

1. Khususnya mengenai Perusahaan Minyak PT Shell Indonesia harus dicegah usaha ambil-alih oleh siapapun juga, kecuali berdasarkan perintah Presiden/Panglima Tertinggi, sedangkan management oleh pihak PT Shell Indonesia dipertahankan.
2. Pemerintah tetap melaksanakan politik perminyakan sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Prp. tahun 1960 dan Undang-Undang Perjanjian Karya tentang perminyakan.
3. Ikut sertanya buruh/karyawan dalam penyelesaian program Indonesianisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri-menteri Perindustrian Dasar Pertambangan dan Perburuhan.

---

1) Gubernur menyatakan "tidak dapat menerima dan akan melaporkan kepada Pemerintah Pusat".

Dipindai dengan CamScanner

Sekalipun demikian, aksi-aksi buruh minyak yang disponsori Perbum semakin meningkat, hal ini tampaknya disesuaikan dengan "aksi-aksi sepihak" PKI/SOBSI/BTI disektor-sektor industri lainnya. Berbagai fragmentasi dilakukan untuk mempengaruhi pendapat umum guna menyudutkan posisi Indonesia didunia Internasional, dan sebaliknya mendorong-dorong agar Indonesia berada dalam orbit negeri-negeri komunis. Juga berlakunya sistim "konsesi" minyak berdasarkan kontrak "5A" telah digunakan bahan agitasi merusakkan image Indonesia dalam menempuh jalan yang sebaik-baiknya. Perbum menggunakan momentum ini untuk "mematangkan situasi politik" didunia perminyakan dengan statementnya yang berbunyi : "Perjanjian-Karya harus ditinjau kembali dalam rangka melaksanakan Dwikora dan berpegang pada prinsip 'berdikari' dibidang ekonomi".

Pada tanggal 12 Mei 1964, atas inisiatip Perbum dikeluarkan "SERUAN KABM" yang berbunyi : "Pakailah Bahasa Indonesia dalam pekerjaan saudara pada segala segi, percakapan sehari-hari, surat-menyurat, laporan dan lain-lain dan tidak memakai bahasa asing lainnya". Seruan ini dilampiri dengan panflet-panflet (ada juga yang ditulis dalam bahasa Inggris), antara lain berbunyi :

— "Cinta Bangsa — Cinta Bahasa"
— "Sita Shell — Dwikora Sukses"
— "Go Home — British"

Aksi-aksi Perbum menjelang peristiwa G.30.S/PKI sulit dibendung oleh Pemerintah, sehingga SB-SB lainnya tidak dapat mengimbanginya dan banyak mengalami pukulan-pukulan berat. Bahkan sementara serikat buruh seperti SKBM, KBKI dan Serbumit dituntut bubar karena "tidak progresip revolusioner" dan "bersikap memusuhi revolusi Indonesia". Sementara itu beberapa top pimpinan PKI ikut duduk dalam pucuk pimpinan Pemerintah RI dan jabatan-jabatan penting pada Departemen Perburuhan, terutama didaerah-daerah berada dalam cengkeraman PKI.

Alas dunia perminyakan menghadapi rongrongan PKI dan mantel-organisasinya yang dalam banyak hal telah memiliki kekuatan dan legalitas untuk bergerak.

9. Epiloog G.30.S/PKI

Setelah G.30.S/PKI dalam usaha merebut kekuasaan di Indonesia mengalami kegagalan total, maka ketika dilakukan penelitian, terbukti bahwa infiltrasi mereka pada tubuh perusahaan minyak sudah merupakan penyakit kanker yang sangat berbahaya.

Pembentukan "KABM-gaya-baru" minus Perbum, SBMSI/GSBI dan BM/KBM yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 1965 banyak

Dipindai dengan CamScanner

membantu dalam menormalisir suasana kerja yang pada waktu itu telah kacau sama sekali.

Pembentukan "KABM-gaya-baru" ini disertai suatu statement yang antara lain mendesak kepada Presiden untuk membubarkan Orpol/Ormas yang mendukung/simpati dengan "G.30.S", termasuk PERBUM.

Pada tanggal 23 Oktober 1965 KABM Pusat menginstruksikan kepada echelon bawahannya agar diunit-unit kerja dibentuk KABM yang siap mengikuti garis Orde Baru.

Sebelumnya, pada tanggal 10 Oktober 1965 dikeluarkan suatu statement pengutukan terhadap PKI, tetapi statement ini tidak ikut ditanda-tangani oleh Pimpinan Pusat Perbum, SBMSI/GSBI dan BM/KBM [1]). Sementara itu Perbum Pusat menyebut bahwa "G.30.S" itu adalah merupakan persoalan intern Angkatan Darat. Di Surabaya masih tampak kegiatan Perbum untuk melakukan ambil-alih PT Shell di Wonokromo. Mula-mula SOBSI Surabaya mengajak KBM dan Sarbumusi, tetapi kedua organisasi ini menolaknya. [2]) Pada tanggal 5 Oktober 1965 pimpinan Perbum yang terdiri dari Marlan dan kawan-kawan menyerahkan naskah pengambil-alihan PT Shell Indonesia di Wonokromo kepada pimpinan Cabang Shell, tetapi usaha ini ditolak dan dinyatakan tidak sah.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965, dengan surat No. 149, 151/Migas/65 Menteri Urusan Minyak & Gas Bumi membekukan sementara Perbum/SOBSI dan ormas-ormas tergabung dalam GSBI dan memberhentikan pejabat-pejabat yang memperoleh kedudukannya karena/asal dari ormas-ormas tersebut. Pada hari yang bersamaan, dikantor pusat papan-papan pengumuman Perbum dan SBMSI/GSBI diturunkan.

Pada tanggal 27 Oktober 1965 dengan surat No. Kep/40/1965 Penguasa Perang Daerah (Peperda) Jaya menetapkan untuk menghentikan semua kegiatan SOBSI dan semua organisasi yang tergabung/bernaung didalamnya. Pada tanggal yang sama KABM Pusat mengirimkan surat kepada semua Direksi perusahaan minyak di Indonesia yang isinya menyebutkan :

1. Agar tidak melayani atau mengikut sertakan wakil-wakil Perbum/Sobsi dan SBMSI/GSBI dalam suatu perundingan apapun yang menyangkut masalah-masalah perburuhan.

---

1) Sikap BM/KBM ini dapat dimaklumi, mengingat peristiwa intern PNI pada waktu itu.

2) Jumlah pegawai di PT. Shell Wonokromo pada bulan Agustus 1965 = 354 orang. Terdiri dari Perbum = 298, KBM = 18, Sarbumusi = 15, SKBM = 11, SBMSI = 2 dan Non-SB = 10 orang.

Dipindai dengan CamScanner

2. Agar tidak mengikut sertakan langsung ataupun tidak langsung wakil-wakil dari Perbum dan SBMSI dalam suatu panitia yang sejenis dengan itu yang mungkin dibentuk dalam perusahaan minyak.

Sementara itu, gelombang protes dari SB-SB minyak dilancarkan untuk menuntut segera dilakukannya pembersihan total disetiap unit kerja dari unsur-unsur Perbum dan simpatisannya.

Dan pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dibubarkan. Kemudian diikuti oleh instruksi Presiden No. Instr. 09/KOGAM/5/1966 tertanggal 13 Mei 1966 yang memberikan pedoman mengenai kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penertiban/pembersihan personil, sehubungan dengan pembubaran PKI dan ormas-ormas yang seazas/bernaung/berlindung dibawahnya, sebagai partai dan ormas-ormas terlarang. Termasuk didalamnya adalah PERBUM.

Dalam rangka menjamin penggunaan aparatur Negara agar terhindar dari pengaruh yang tidak sehat dari oknum-oknum G.30.S/bekas anggota PKI dan ormas-ormasnya, serta untuk menciptakan kegairahan/pendayagunaan kerja bagi seluruh pegawai/karyawan dalam lingkungan Dirjen Minyak dan Gas Bumi, dengan surat No. 237/D.D/Migas/1967 tertanggal 22 Juli 1967, Direktur Jendral Migas menginstruksikan kepada semua Direksi Perusahaan Minyak untuk mengambil kebijaksanaan sebagai berikut :

1. meniadakan kenaikan pangkat/golongan bagi yang bersangkutan (sesuai dengan Instr. 09/KOGAM/5/1966 tanggal 13 Mei 1966).
2. tidak memberikan jabatan pertama pada kedinasannya/tugas pekerjaannya bagi yang bersangkutan.
3. meniadakan segala fasilitas untuk mendapatkan promosi bagi yang bersangkutan.
4. mengadakan pengawasan khusus terhadap yang bersangkutan.

Akhirnya, dalam usaha penertiban dan pembersihan personil terhadap fakta-fakta yang hidup dilingkungan Perusahaan, Direktur Utama Pertamina dalam instruksi No. 249/DR/DU/68 tanggal 18 Juni 1968 mengenai personil security antara lain menegaskan :

— Supaya diintensipkan penyelidikan/pengawasan terhadap oknum-oknum yang pernah mendapat latihan anggota SB-SB/organisasi yang bernaung dibawah orpol PKI.

— diusahakan penerangan-penerangan yang intensip kedalam, dalam rangka pembinaan mental dan kekompakan karyawan/buruh, untuk menghadapi segala kemungkinan atas moril para karyawan khususnya dan Personalia pada umumnya.

Dipindai dengan CamScanner

Jika sejenak kita memperhatikan kembali sepak terjang Perbum dalam perusahaan minyak di Indonesia, dapatlah kita simpulkan bahwa gerakan Perbum sejak dari masa persiapannya sampai dengan meletusnya peristiwa G.30.S/PKI tahun 1965 selalu terlibat dalam aksi politik yang digariskan oleh PKI. Tentunya sebagaimana telah kita lihat, mungkin dengan pengaruhnya yang luas seolah-olah kaum komunis akan dengan mudah menguasai Indonesia.

Seluruh usahanya pada waktu itu hebat, dan mereka telah berhasil membina suatu jaringan pengaruh yang luas baik dikalangan pemerintahan, ketenteraan dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya maupun dikalangan pemuda, wanita, seniman, buruh, tani dan sebagainya.

Tetapi proses sejarah agaknya menentukan lain. Tuhan telah menyelamatkan Indonesia. Dunia perminyakan Indonesia terhindar dari malapetaka yang buruk.

* * *

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA DAFTAR PEKERJAAN *)

A. GERAKAN UMUM

1. Supaya mendapat pemerintahan Rakyat ditanah Hindia.
2. Supaya dikemudiannya segala kerajinan, perdagangan, bank-bank, rumah-rumah, perusahaan dan perdagangan angkutan yang mendatangkan untung menjadi kepunyaan Rakyat atau milik umum maka lebih dulu terpaksalah buat sementara tempo perusahaan dan barang-barang di dijatuhkan ditangan Pemerintah.
3. Pemberian pekerjaan dan pembahagian pekerjaan itu menjadi tanggungannya Pemerintah, dan azasnya sebagai dibawah ini :
   a. Isteri atau lelaki dianggap sama kekuatannya dalam pekerjaan sebagai buruh, hanya saja isteri dan lelaki masing-masing diberi pekerjaan yang pantas baginya.
   b. Larangan menyuruh bekerja kanak-kanak yang kurang dari 13 tahun, buat orang tua lebih dari 45 tahun dan buat orang perempuan 6 bulan sebelumnya dan sesudahnya beranak.

B. AKSI BUAT BURUHAN (UPAHAN)

1. Adapun buruhan (upahan) harus ditentukan banyaknya menurut kebutuhan kaum buruh dan orang seisi rumahnya.
2. Batasnya upahan yang paling rendah harus ditetapkan oleh wet.
3. Melawan pemberian gaji yang tingginya luar dari biasa.

C. AKSI BUAT BERHENTINYA PEKERJAAN

Hari bekerja tidak lebih dari delapan jam, dengan ketetapan bahwa penghabisan ialah sore pukul enam; buat makan sedikitnya 1 jam; tujuh hari sekali 1 hari vrij; saban tahun diberikan verlof 14 hari (ditetapkan dengan wet).

D. AKSI BUAT HAKNYA

1. Upahan sedikitnya dan banyaknya dan juga kenaikannya harus diatur.

---

*) dikutip sesuai dengan bunyi aselinya dari surat-kabar "Persatoean Hindia", No. 3, hari Sabtoe, 22 Nopember 1919, tahun ke-I.

Dipindai dengan CamScanner

2. Diadakan hakim pemisah, dimana kaum buruh dan kaum uang diwakili dengan sama kekuasaannya; maka pemisah ini memutuskan paling penghabisan segala perselisihan antara kaum uang dan kaum buruh.
3. Supaya mendapat bayaran tiga bulan jika dilepas tidak dengan permintaan, dan jika tidak dengan mufakatnya hakim pemisah.

* * *

Dipindai dengan CamScanner

TUNTUTAN UMUM *)
KONFERENSI BURUH MINYAK INDONESIA
DI BANDUNG

I. Petunjuk-petunjuk umum untuk penentuan upah/status buruh.

a. Buruh-buruh dibagi menjadi 3 kelompok :
   1. Buruh-buruh yang tidak ber-ketrampilan (Unskilled Labour).
   2. Buruh-buruh yang ber-ketrampilan (Skilled Labour).
   3. Buruh-buruh yang ber-ketrampilan tinggi (High-skilled Labour).

   Pembagian ini didasarkan kepada pendidikan, pengalaman dan prestasi kerja, tanpa membedakan kebangsaan (nasionalitas), aliran, jenis kelamin dan agama, dan diarahkan menuju Indonesianisasi.

b. Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.

c. Masih dibutuhkan suatu sistim mengenai cara pembayaran upah, termasuk hak-hak dari buruh-buruh yang bekerja diperusahaan itu; dengan kata lain hanya dibedakan penjenisan buruh atau pekerja "pegawai bulanan".

d. Berdasarkan sifat pekerjaan dapat diterima buruh-buruh lepas, akan tetapi sesudah lebih dari 3 bulan bekerja, buruh-buruh lepas ini akan diangkat menjadi buruh bulanan.

e. Semua jabatan/tingkatan terbuka untuk semua buruh, berdasarkan sub a.

f. Upah dan jaminan-jaminan lain dari buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang langsung melayani BPM, tidak boleh menerima upah kurang dari upah yang diterima pada BPM itu sendiri.

g. Upah terendah harus dapat menjamin kehidupan yang layak (upah basis minimum Rp. 7,50 sehari).

h. Upah terendah (peraturan pengupahan) untuk berbagai jenis pekerdjaan.

i. 1. Kenaikan upah minimum tahunan sebagai dimaksud pada huruf h.
   2. Setiap enam bulan sekali akan diadakan peninjauan upah berdasarkan kapasitas kerja.

Dipindai dengan CamScanner

j. Politik perburuhan dari perusahaan harus dengan persetujuan serikat buruh.

k. Secepat mungkin mengusahakan terbentuknya suatu Komisi yang terdiri dari wakil-wakil serikat buruh dan perusahaan, dengan maksud :

1. Mengawasi pelaksanaan dari pada segala sesuatu yang telah disetujui bersama.
2. Mempelajari masalah-masalah perburuhan dan menyampaikan nasehat-nasehat kepada sarikat buruh dan perusahaan.
3. Menghilangkan adanya kesalahan-kesalahan pembayaran upah yang tidak semestinya/kurang wajar dan tenaga-tenaga yang kurang ternilai (atau menetapkan ketentuan-ketentuan tentang hal ini berdasarkan keadaan setempat oleh Komisi bersama.

II. **Peraturan tentang kerja lembur.**

a. Semua buruh berhak atas pembayaran kerja lembur.

b. Kerja lembur antara jam 06.00 sampai jam 20.00 dibayar berdasarkan tarif 2.

c. Kerja lembur sesudah jam 20.00 dibayar berdasarkan tarif 3.

d. Untuk sopir-sopir dan mereka yang melayani motor-motor bergerak (mesin tumbuk, disel, katrol dan lain-lain) kerja lembur antara jam 06.00 sampai jam 18.00 dibayar berdasarkan tarif 3.

e. Disamping upah lembur buruh-buruh tersebut akan diberi juga jaminan-jaminan lain (makan cuma-cuma, dan pembelian-pembelian berdasarkan keinginan menurut perbandingan jumlah jam lembur sampai sebanyak 160 jam).

III. **Tunjangan-tunjangan**

1. Tunjangan kemahalan 80% dari upah basis dengan minimum Rp. 200,—
2. Tunjangan lokal 30% dari upah basis dengan minimum Rp. 75,—
3. Tunjangan anak 10% dari upah basis dengan minimum Rp. 25,— per anak.
4. Tunjangan sewa rumah 20% dari upah basis dengan minimum Rp. 50,—
5. Tunjangan ke pemimpinan 3% setiap hari dari upah sebulan.
6. Tunjangan Detasering 3% setiap hari dari upah sebulan.

Dipindai dengan CamScanner

7. Tunjangan keluarga terpisah 30%.
8. Uang makan : separo x upah sehari, dengan nilai serendah-rendahnya Rp. 4,— (jatah makan) untuk buruh-buruh yang sore hari tidak dapat pulang, kecuali memang karena sifat tugasnya tidak dapat pulang.
9. Tunjangan deklarasi/uang jalan sekurang-kurangnya 2 x upah sehari dengan minimum Rp. 15,— sehari yang berlaku juga untuk para istri/suami untuk setiap anak satu kali upah sehari dengan minimum Rp. 7,50 sehari.

IV. Premi

Akan ditetapkan suatu peraturan premi untuk :

a. kelompok montir-montir, kelompok tukang bor, kelompok ahli bangunan/menara dan lain-lain.
b. Bagian ketel (panas).
c. mengecat dan menegakkan pipa-pipa tinggi.
d. para penyelam.
e. tempat-tempat yang mengandung racun (gas, belerang dan asam belerang dan lain-lain).
f. uang berlayar (premi berlayar) sebesar 3% dari upah sebulan untuk setiap harinya.
g. uang k.m. untuk para sopir dan pembantu-pembantunya. Untuk setiap lebih dari 150 k.m. Rp. 0,01 per k.m.
h. uang tonage untuk para sopir dan pembantu-pembantunya. Untuk truck-truck diatas 3 ton Rp. 0,05 per ton.
i. premi tanggungjawab untuk para sopir dan pembantu-pembantunya.
y. premi prestasi-prestasi lainnya serta keamanan.

V. Perumahan

a. untuk buruh-buruh yang telah kawin/berkeluarga disediakan 2 kamar.
b. untuk buruh-buruh yang telah kawin dengan 3 orang anak disediakan 3 kamar.
c. untuk buruh-buruh yang telah kawin dengan 4 orang anak atau lebih disediakan 4 kamar.
d. sistim tangsi dihapuskan dan disesuaikan dengan No. V sub a, b dan c.

Dipindai dengan CamScanner

e. rumah-rumah yang akan dibangun berdasarkan rencana harus memuat ruang duduk, ruang tidur, ruang makan, dan lain-lain dengan mengingat kebersihan/kesehatan.

f. kolam renang terbuka segera harus diberi pagar.

g. taman-taman, dan kebun-kebun peristirahatan dibangun didalam kompleks-kompleks perumahan itu, yang dijamin kebersihan serta kesehatannya.

h. untuk keperluan anak-anak sekolah di Jakarta, Bandung, Surabaya dan tempat-tempat lainnya akan disediakan mess.

VI. Kesehatan/Perawatan dijamin

a. tidak akan dibeda-bedakan dalam hal perawatan poliklinik; ini harus memuaskan dan berdasarkan pengetahuan medis/kedokteran.

b. semua biaya perawatan dan pengobatan untuk buruh serta keluarganya dibebankan pada perusahaan.

c. upah dari buruh-buruh yang sakit dengan keterangan/sertifikat dokter menjadi tanggungjawab perusahaan :

untuk 6 bulan pertama 100%
untuk 6 bulan kedua 75%
sesudah mana baru akan dipertimbangkan perlu diapkir atau tidak.

d. selama sakit buruh masih tetap mendapatkan hak-haknya seperti waktu ia tidak sakit.

e. sebelum seorang buruh dinyatakan apkir dia akan masih tetap bisa menggunakan/menikmati perawatan-perawatan sebagaimana dimaksud pada No. VI sub c. dan apabila ia dinyatakan apkir, maka ia masih juga dapat menikmati perawatan sampai ia mendapat pekerjaan baru.

f. Apabila terjadi kecelakaan dalam melakukan tugas, maka akan berlaku Undang-Undang No. 33 tahun 1947 tentang Kompensasi Kecelakaan.

VII. Rekreasi/hiburan

a. Disuatu tempat kerja dimana sedikitnya bekerja 40 orang buruh, seminggu sekali akan diputar pertunjukkan-pertunjukkan bioskop, sandiwara atau hiburan lain untuk buruh-buruh.

b. Bioskop bioskop terbuka akan diatur sedemikian rupa supaya disesuaikan dari usia-usia penonton/pengunjung.

Dipindai dengan CamScanner

c. Akan disediakan taman-taman bacaan (perpustakaan). Pembelian buku-buku akan disesuaikan menurut petunjuk/penilikan dari fihak Buruh maupun Majikan.

d. Perusahaan akan menyediakan "Balai Buruh" untuk keperluan rapat-rapat dan kursus-kursus dan lain sebagainya.

e. Balai-balai rekreasi dan istirahat akan disediakan di Brastagi, Pagar Alam, 2 di Jawa (Ciumbuluit dan Tawangmangu), 1 di Kalimantan (Barabai) dan 1 di Indonesia Timur (Malino). Perusahaan akan membangun tempat-tempat hiburan dan olah raga dengan peralatannya yang diperlukan : gedung pertemuan (soos), sandiwara, bioskop, radio, ruangan-ruangan untuk olah-raga dan latihan, perpustakaan tempat-tempat peribadatan, taman anak-anak, tempat-tempat rekreasi/hiburan dan lain-lain.

VIII. C u t i

a. Tiap tahun 12 hari (cuti-tahunan).

b. Tiap 3 tahun 3 bulan (tidak termasuk hari-hari perjalanan).

c. Lebih dari 3 sampai 5 tahun, 4½ bulan (tidak termasuk hari-hari perjalanan).

d. Lebih dari 5 tahun, 6 bulan (tidak termasuk hari-hari perjalanan).

e. Terserah kepada buruh untuk menggunakan cutinya, apakah didalam negeri; kembali kekampung halaman atau ketempat famili/keluarga berada.

f. Semua biaya pulang-pergi untuk buruh dan keluarganya menjadi beban Perusahaan.

g. Selama cuti baik upah maupun tunjangan-tunjangan lainnya akan tetap dibayar oleh Perusahaan.

h. Pada awal cutinya apabila dikehendaki oleh buruh, upah setiap bulannya dapat dikirimkan ketempat ia bercuti.

IX. P e n s i u n

a. Sesudah mempunyai masa-kerja dari 15 - 20 tahun dan sesudah mencapai usia 50 tahun, maka jumlah pensiun akan sebesar 50% dari upah terakhir ditambah dengan tunjangan-tunjangan.

b. Sesudah mempunyai masa-kerja dari 20 - 25 tahun dan sesudah mencapai usia 50 tahun, pensiun akan sebesar 60%.

c. Sesudah masa-kerja lebih dari 25 tahun, maka tanpa mengingat apakah usia buruh telah mencapai 50 tahun, ia berhak menerima pensiun 75%.

Dipindai dengan CamScanner

d. Apabila buruh yang telah pensiun meninggal-dunia, maka jandanya yang akan menerima 75% dari pensiun suaminya yang meninggal, selama janda tadi belum/tidak kawin lagi.

e. Apabila janda tersebut meninggal dunia atau ia kawin lagi maka anak-anak yang masih dibawah umur akan masih menerima 60% dari pensiun janda tersebut.

X. Dana Cadangan

a. Terbuka bagi semua buruh dengan masa-kerja setelah bekerja 1 tahun.

b. Buruh membayar iuran 10% dari upah pokok. Perusahaan ikut membayar kepada dana tersebut 1½ kali iuran buruh. Perusahaan dan Serikat Buruh bersama-sama akan membuat suatu peraturan tentang (penggunaan) dana cadangan ini.

c. Dana cadangan ini tidak akan mengurangi hak pensiun, pesangon atau lain-lain pemberian, yang bersifat dekat-mendekati.

XI. Pemutusan Hubungan Kerja

Perusahaan mempunyai hak untuk memecat buruhnya, apabila buruh membuat pelanggaran akan tetapi harus dengan persetujuan Serikat Buruh.

Atas permintaan yang berkepentingan, maka pemberian-pemberian sebagai tersebut dibawah ini dapat diberikan sekali-gus :

a. *Pemutusan hubungan kerja karena usia tinggi atau apkir.*

1. Untuk tiap masa-kerja 1 tahun 2 bulan pembayaran dengan tunjangan-tunjangannya (upah dan tunjangan terakhir).
2. Mereka yang mempunyai masa-kerja 15 - 25 tahun boleh memilih menggunakan ad 1 diatas atau pensiun.
3. Apabila buruh mempunyai masa kerja kurang dari 15 tahun dan ia dipecat karena sesuatu alasan (bukan kecelakaan), maka ia akan menerima setiap bulannya sejumlah 40% dari upah terakhir. Apabila buruh tersebut meninggal dunia, maka jandanya akan menerima 30% dari pembayaran itu.
4. Biaya perjalanan dalam negeri, menurut yang dikehendaki buruh, dan untuk kepentingan buruh serta keluarganya akan dipikul oleh Perusahaan.
5. Semua tunjangan-tunjangan (makan, pembelian beras, dan lain-lain) selama bulan dimana pemecatan itu terjadi, dan ditambah dengan tunjangan untuk dua bulan lagi masih tetap akan dipertahankan.

Dipindai dengan CamScanner

b. *Pemecatan dengan hormat*

1. Untuk setiap tahun masa-kerja satu bulan upah dengan minimum 3 bulan upah.
2. Semua biaya perjalanan untuk buruh dan keluarganya dalam wilayah Indonesia dibayar oleh Perusahaan.
3. Makan dan pembelian bebas selama bulan buruh itu yang dipecat ditambah dengan tunjangan untuk bulan berikutnya masih tetap dipertahankan.

c. *Pemberhentian atas permohonan sendiri*

1. Pemberitahuan kepada Perusahaan (tentang maksud ini) harus disampaikan sebulan sebelumnya.
2. Untuk setiap tahun masa-kerja setengah bulan upah dengan minimum dari 1½ bulan upah.

d. Apabila seorang buruh dengan masa-kerja sedikitnya 15 tahun meninggal dunia, maka janda/anak-anaknya akan menerima hak pensiun menurut peraturan yang berlaku.

e. Apabila seorang buruh dengan masa-kerja kurang dari 15 tahun meninggal dunia, maka janda/anak-anaknya akan menerima haknya sesuai dengan XI sub a. No. 1.

XII. **Pendidikan**

1. *Buruh-buruh*

a. Kepada setiap buruh selama jam-jam kerja akan diberikan pelajaran-pelajaran pendidikan theorie.

b. Akan dibentuk regu pelatih untuk keperluan ini.

c. Bagi mereka yang menunjukkan kemampuan belajar, kepadanya akan diberi kesempatan untuk meneruskan pelajaran yang lebih tinggi baik didalam maupun diluar negeri atas biaya Perusahaan.

2 *Anak-anak/keluarga buruh*

a. Akan disediakan bangunan, perlengkapan, tenaga-tenaga pengajar, nilai-nilai pelajaran sekolah menurut peraturan Pemerintah.

b. Disuatu tempat dimana terdapat 40 orang anak-anak buruh, akan dibangun sebuah sekolahan.

c. Apabila terdapat kurang dari 40 orang anak, maka Perusahaan harus menyediakan sebuah bus untuk mengangkut anak-anak tersebut kesekolahan yang terdekat.

Dipindai dengan CamScanner

XIII. Gratificatie

a. Sekurang-kurangnya 10% dari keuntungan Perusahaan akan diberikan kepada buruh dengan perantaraan Serikat Buruh.

b. Sekurang-kurangnya 2 bulan upah akan diberikan sebagai gratificatie untuk setiap buruh :

1. Untuk Buruh-buruh Islam dibayarkan pada Hari Raya (Idulfitri).
2. Untuk Buruh-buruh Kristen dibayarkan pada 25 Desember.
3. Untuk Buruh-buruh Cina dibayarkan pada tgl. 1 Januari.
4. Untuk mereka bagi yang tidak termasuk ad 1, 2 dan 3 pada 1 Januari.

XIV. Perlengkapan

1. Buruh bergilir : jas hujan ditambah kopi-susu.
2. Buruh pelayar : jas hujan.
3. Buruh-buruh pembor, montir dan mereka yang berurusan dengan minyak dan lain-lain : pakaian kerja duakali 1 tahun.
4. Sopir-sopir, penjaga, pesuruh-pesuruh, buruh-buruh berlayar dan lain-lain : pakaian seragam dua kali 1 tahun.
5. Buruh-buruh lapangan (geoloog dan lain-lain) : duakali 1 tahun sepatu dan 2 pasang kaos panjang, pakaian kerja 2 pasang baju pelindung dada 4 buah handuk 1 buah sabun dan lain-lain, jika perlu alat-alat tidur, alat-alat makan dan minum yang digunakan.

N.B. Pakaian seragam tidak dibenarkan, karena berbau reklame.

XV. U m u m

1. *Penghargaan*

Kepada mereka yang mempunyai masa-kerja 20 tahun atau lebih, akan diberi tanda penghargaan (tanda jasa).

2. a. *Kelonggaran (dispensasi) Serikat Buruh*

Apabila seorang buruh terpilih menjadi anggota pengurus dari Serikat Buruh, maka kepadanya akan tetap diberikan hak-haknya oleh Perusahaan sebagaimana lazimnya :

PB. K.A.B.M. (Pengurus Pusat) — Ketua, Sekretaris, Bendahara, 2 Pembantu.

Dipindai dengan CamScanner

Cabang (Afdeling)	—	Ketua, Sekretaris, Bendahara.
Ranting (Onderafdeling)	—	Ketua, Sekretaris.

b. *Penggantian*
(Rehabilitasi)

Semua kerusakan/kerugian, yang diderita oleh buruh sebagai akibat peperangan akan diganti oleh Perusahaan.

c. *Upah selama periode pendudukan musuh*

Upah selama zaman pendudukan Jepang, 3½ tahun, akan diganti oleh Perusahaan.

d. *Pasanggrahan*

Pasanggrahan, bagi buruh-buruh yang bujangan, dapat mondok dengan membayar pondokan, mencucikan pakaian, dan lain sebagainya (mess).

e. *Pemberhentian-massaal (massa-ontslag)*

Pemberhentian massaal diusahakan jangan sampai terjadi.

XVI. **Jatah-jatah subsidi** (tidak terpisahkan dari upah yang layak).

	Buruh	*Tiap anggota keluarga*
Beras	18 kg.	—
Beras untuk istri	15 kg.	—
Beras untuk tiap anak	10 kg.	—
Susu	8 bl.	2 bl.
Ikan	3 kg.	—
Kacang hijau	5 kg.	1 kg.
Daging	4 kg.	—
Telur	10 butir	10 butir
Terigu (gandum)	3 kg.	—
Rokok	300 batang	—
Gula	3 kg.	1 kg.
Minyak goreng	2 kg.	—
Garam	1 kg.	½ kg.

Dipindai dengan CamScanner

XVII. **Pembelian bebas**

1. Pembelian bebas diizinkan sampai seharga 80% dari upah pokok, menurut keinginan buruh akan tetapi dengan batas-batas tertentu.
2. Dengan bantuan Perusahaan bisa dipesan/diizinkan untuk membeli alat-alat meubel, makanan anak-anak dan lain sebagainya.

XVIII. **Penerimaan buruh baru**

Perusahaan tidak dibenarkan menerima buruh-buruh baru dari luar Indonesia, apabila ternyata buruh itu bisa didapat didalam negeri.

XIX. **Lain-lain**

Semua peraturan-peraturan perusahaan yang tidak bertentangan dengan perjanjian ini dapat dilanjutkan.

Bandung, November 1950
Komisi Tuntutan Bersama

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
A. Tohir	**M. Hutabarat**

Disetujui oleh sidang pleno pada tgl. 13 Nopember 1950
(Konperensi Buruh Minyak Indonesia)
Pimpinan Sidang,

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
R.P. Situmeang	**Mochtar**

---

*) *Sumber :*

NV. De BPM Indonesia, IR/Arbeidszaken, tanggal 1 Janurai 1953, Bab II, hal. 4.

Dipindai dengan CamScanner

PENGHARGAAN DPP PERBUM PADA RESEPSI HARI ULANG TAHUN PKI KE 32 *)

Kepada P.K.I.
dan kawan-kawan Komunis Indonesia !

Perayaan ulang tahun ke TIGA PULUH DUA daripada PARTAI KOMUNIS INDONESIA adalah menunjukkan suatu bukti keuletan yang nyata, dalam memperjoangkan cita-citanya, yaitu cita-cita untuk membebaskan manusia dari penindasan dan mewujudkan perdamaian yang kekal diseluruh dunia.

Sebagai tanda penghargaan dan penghormatan, atas nama Buruh Minyak se-Indonesia dengan ini kami sampaikan :

1. sehelai bendera merah sebagai lambang Buruh guna tanda penghargaan atas perjoangan P.K.I. dalam membela hak-hak dan kepentingan kaum buruh, menentang kekejaman dan penindasan imperialisme.
2. sebuah palu untuk memimpin rapat, sebagai simbul P.K.I. memimpin Klas Buruh dan Rakyat banyak dalam perjoangan menghancur-leburkan imperialisme dan mewujudkan Negara Demokrasi Rakyat Indonesia sebagai peralihan kearah Sosialisme.
3. sebuah lampu bertanda palu arit, sebagai lambang moga-moga P.K.I. semakin menerangi kegelapan penghidupan Rakyat Indonesia serta memimpin terus perjoangan menuju kemerdekaan Nasional yang sejati dan perdamaian dunia yang kekal.

Terimalah tanda penghargaan dan penghormatan ini dari kami atas nama Buruh Minyak se-Indonesia dan

KARENA KEBENARAN PERJOANGAN P.K.I. PASTI MENDAPAT SOKONGAN DARI SETIAP ORANG YANG JUJUR, TERUTAMA DARI KAUM BURUH.

---

*) Majalah "Trumbel" suara Buruh Minyak No. 6-7, April-Mei 1952 Tahun ke-I, halaman 15.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN IV/1

DAFTAR JUMLAH ANGGOTA EX-PERBUM PADA PERUSAHAAN MINYAK DI INDONESIA

(Keadaan Tahun 1966)

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Seluruh Karyawan	Jumlah	
			Anggota PERBUM	Prosentage
1.	*PERTAMINA*			
	1.1. Kantor Pusat	1.405	239	17 %
	1.2. Unit I	3.933	118	3 %
	1.3. Unit II	6.594	2.572	39 %
	1.4. Unit III	923	600	65 %
	1.5. Unit IV	5.624	1.912	34 %
	1.6. *Direktorat Pemasaran Dalam Negeri*			
	a. Jawa Barat	757	348	46 %
	b. Jawa Tengah	385	250	65 %
	c. Indonesia Timur	689	310	45 %
	d. Sulawesi-Maluku	164	120	73 %
	e. Jambi	1.045	753	72 %
	f. Sumatra	378	185	49 %
	Jumlah	21.897	7.407	34 %
2.	Ex-PN PERMIGAN (Cepu)	2.148	2.000	93 %
3.	PT CALTEX Indonesia	4.350	2.273	52 %
4.	PT STANVAC Indonesia	5.522	3.220	58 %
	TOTAL	33.917	14.900	44 %

Dipindai dengan CamScanner

GAMBARAN JUMLAH ANGGOTA-ANGGOTA SB/KARYAWAN DI PERMINA, PERTAMIN, PERMIGAN, STANVAC DAN SHELL *) PADA PROLOOG & EPILOOG G-30-S/PKI.

(Dalam Prosentase)

No.	Serikat Buruh	Hubungan		Golongan	Prosentase	
		Vak Sentral	Afiliasi		Proloog G-30-S/ PKI	Epiloog G-30-S/ PKI
1.	PERBUM	SOBSI	P K I	Komunis	43,5	—
2.	B M	K B M	P N I	Nasional	19	15,3
3.	G B M	SARBUMUSI	N U	Agama	5	13,7
4.	O B M	GOBSII	P S I I	Agama	1	2,9
5.	SERBUMIT	GASBIINDO	—	Agama	4	20,7
6.	K B I M	K B I M	—	Agama	—	0,1
7.	S P M K I	KESPEKRI	PARKIN-DO	Agama	1,5	3
8.	S B M M	SOB-PANCA-SILA	—	Karya	—	1,2
9.	K B P M	K B K I	—	Karya	4	13,5
10.	S K B M	—	S O K S I	Karya	9	19,5
11.	S B M S I	—	—	—	4	2,2
12.	SARIBUMI	SOBRI	—	Karya	1	4,8
13.	SOKSI/Bidang Minyak	—	—	Karya	—	0,2
14.	PERSATUAN KARYAWAN PN. PERTAMINA UNIT V	—	—	—	—	2,9
15.	K B M K I	KESPEKRI	PARKIN-DO	Agama	—	—
16.	SEBUMI	SOB-PANCA-SILA	—	Karya	7	—
17.	PERKAMINDO	—	—	—	—	—
18.	KUBU-PANCA-SILA	KUBU-PANCA SILA	I P K I	—	1	—
				Jumlah :	100	100

*) belum termasuk di PT. Caltex.

Dipindai dengan CamScanner

SINGKATAN-SINGKATAN

BM	=	Buruh Minyak
BPM	=	de Bataafsche Petroleum Maatschappij
Caltex	=	California Texas Oil Company
Dekon	=	Deklarasi Ekonomi
DI	=	Darul Islam
Dirjen	=	Direktur Jendral
Dwikora	=	Dwi Komando Rakyat
G.30.S	=	Gerakan Tigapuluh September
GBM	=	Gerakan Buruh Minyak
KBMKI	=	Kesatuan Buruh Minyak Kristen Indonesia
KBPM	=	Kesatuan Buruh Pertambangan Minyak
KOGAM	=	Komando Ganyang "Malaysia"
KOSGORO	=	Kesatuan Organisasi Serba-Guna Gotong-Royong
Manipol	=	Manifesto Politik
Migas	=	Minyak Dan Gas Bumi
Nasakom	=	Nasionalisme, Agama, Komunisme
NIAM	=	Nederlandsche Indische Aardolie Maatschappij
NU	=	Nahdlatul 'Ulama
OBM	=	Organisasi Buruh Minyak
Ormas	=	Organisasi Massa
Orpol	=	Organisasi Politik
PARKINDO	=	Partai Kristen Indonesia
PERBUM	=	Persatuan Buruh Minyak
PERKAMINDO	=	Persatuan Karyawan Minyak Indonesia
Permigan	=	Pertambangan Minyak Dan Gas Nasional
Permina	=	Pertambangan Minyak Nasional
Pertamin	=	Pertambangan Minyak Indonesia
PKI	=	Partai Komunis Indonesia
Plin-plan	=	Plintat-plintut
PN	=	Perusahaan Negara
PSII	=	Partai Syarikat Islam Indonesia
RI	=	Republik Indonesia
Saribumi	=	Sarikat Buruh Minyak Indonesia
SB	=	Serikat Buruh
SBMM	=	Serikat Buruh Minyak Merdeka
SBMSI	=	Serikat Buruh Minyak Seluruh Indonesia

LIPS

Dipindai dengan CamScanner

SEBUMI	=	Serikat Buruh Minyak Indonesia
Serbumit	=	Serikat Buruh Minyak & Tambang
SOBSI	=	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOKSI	=	1. Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia 2. Swadiri Organisasi Karya Se-Indonesia
SPMK	=	Serikat Pekerja Minyak Kristen
Stanvac	=	Standard Vacuum Petroleum Company
TII	=	Tentara Islam Indonesia
UUD	=	Undang-undang Dasar
VS	=	Vak-Sentral

Dipindai dengan CamScanner

INDEK

A

Abdullah Thohir, 36, 41
Abdulmajid, 6
Abdul Muis, 3, 14
Abdulmuntalib, 34
Agus Jalaluddin, 34
Agus Notokusumo, 34
Agus Salim, Haji, 3, 14, 15-15n, 16-17
Ahem Erningpraja, 25
Aidit, D.N., 5, 7-9, 40
Alimin, 6, 14-15, 20
Ali-Wongso, Kabinet, 30
Amerika Latin, 60
Amerika Serikat, 5, 59-60
Amir Dahlan, 3
Amir Murtono, Overste, 24
Amir Syarifuddin, 4, 6-7
Arifin, 37
Arja, A., 40
Asraruddin, 20
Azis Anggawati Wibowo, 40

B

Baars, A., 3, 14
Baay Salim, 36-36n, 38, 41
Bachmid, 37
"badan sentral", 14
Balikpapan, 1, 34, 43, 59
Bandung, 14, 23, 38, 43
Banjarmasin, 1, 43
BBI, 19-20
Belanda, 7, 21, 29
Bergsma, P., 3, 14, 15-15n, 16-16n, 17-18
BKSBM, 59-60
BKS-BUMIL, 24-25
BM, 62
Boedi Oetomo, 12-12n, 13-14, 17
Bogor, 42
Bojonegoro, 6
BPM, 36, 38, 52, 59
Brandsteder, J.A., 3
BTI, 5, 61
Budisucitro, 18
Bunyu, 43

C

Caltex, 54, 59
Cepu, 1, 6, 7, 35, 43, 50
Cipto Mangunkusumo, 14
Cirebon, 43
Cokroaminoto, HOS., 3, 14-15, 17, 51
Cokromijoyo, 17
Cokronegoro, A., 5
co'operatie, 15
Cultuurbond, 12

D

Dahler, P.F., *lihat* Amir Dahlan, 14
Dalyono, M., 22
Darsono, 3, 14, 17-18, 51
Datuk Raja Bangun, J.A., 17n, 35, 37, 39, 51-52
Delanggu, 4
Demokrasi Rakyat, 8, 40
Dengah, J.A., 14-15
Dewan Perusahaan, 55
Digul, 4
DI/TII, 57

F

FBI Indonesia, 27-27n
FBMI, 42

Dipindai dengan CamScanner

FDR, 4-5
Front Nasional, Front Persatuan Nasional, 5, 8, 40, 59
Front Persatuan Buruh, 8, 22

G

Gani, Abd., 37
Gani, A.K., 41
GASBI, 20, 35
GASBIINDO, 23, 25, 26-26n, 27-27n, 28
GASBRI, 22
Gatot Subroto, Kolonel, 7
GERBUMI, 24, 27
Gercke, 14
Gerindo, 4
GOBSI-Indonesia, 24-25, 26-26n, 27-28
GOLKAR, 26
GPM, 41
GSBI, 22-23, 25-27, 62
GSBV, 20, 35
GSS, 21-22
Gultom H., 37

H

Hadi Sudarjo, 40
Harahap, Mayor, 24
Harun Al Rasyid, 22
Haryono, 20
Hatta, 4-6
Hazeu, 14
Hertogh, 14
HISSBI, 22, 25-26
HTLM, 36
Hutabarat, M., 36

I

Ibnu Sutowo, Mayor Jendral, 58
IB Pancasila, SOB, 23-23n, 26-26n, 27
ICFTU, 21n, 23-23n, 26
Ideham, Moh., 34
IFTU, 21n
IKDAM, 24
IK DEPSOS, 24
IKM, 24, 27
Inggris, 59-60
INI, 34-34n
Isa, Moh., 36
ISDP, 3
ISDV, 3, 14
Ishak Muklar, 49
Islam, 3, 14
Italia, 60

J

Jakarta, 1, 7, 19, 21, 24, 35, 39, 42
"Jalan Baru", 5, 7
Jambi, 37-38, 43
Jaswadi, 35
Jawa, 35
Jepang, 19, 36
Jerman Barat, 60
Jombang, 6

K

KABI, 25-26
KABM, 38, 59-62
Kalimantan, 35
Kartono, 41
Kasbani, 55
KBIM, 24, 26-26n, 27-27n, 28
KBKI, 23-23n, 25, 27, 48-49, 61
KBM, 23n, 26n, 27-27n, 28, 62
KBSI, 23, 25, 27, 48n
Kediri, 6
Kekarbu, 27-27n
KESPEKRI, 24-25, 26-26n, 27-28
Kho Hok Liong, 49
KMB, 7, 24
Komintern, 3, 21
KONGKARBU, 24n, 26-26n, 27-27n, 28

Dipindai dengan CamScanner

"Kongres Fusi", 39
KOSGORO, 27n
KSOBM, 59-60
Kuba, 58
Kubu Pancasila, 24-25, 26-26n, 27-27n
Kusumo Utoyo, R.M.M., 55

L

Lasykar Buruh, 20
Lasykar Minyak, 6-7, 20-21, 54
Lenin, 3
Linggarjati, 21

M

Madiun, 6-7, 20, 35
"Madiun Affair", 21
Majid Thahir A., 37
Makassar, 37, 43
Malang, 21
"Malaysia", "malaysia", 56-57, 59
Mangunjaya, 43
Marlan, 35, 37, 62
Martin Turangan, 49
Maruto Darusman, 5
Masyumi, 4, 6, 22, 49
Marxisme, Marxist, 3, 14, 45
MBI, 26
Medan, 37, 43
Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi, 62
Mewengkang, S., 34, 52
MKGR, 27-27n
Moskow, 3, 5
MPBI, 25-28
Murad, A., 37
Murba, Partai, 25, 48-49
Mursalin Daeng Mamangun, Laksamana Muda, 26-27
Muso, 3, 5-7, 14

N

Nainggolan, G., 37
Nanguning, H.H., 37
Nasionalisme, 13-14
Nasution, H., 36
Natsir, 29-30
Nayoan, 16
Ngadiman, 5
NIAM, 38
Ning Usman, 35
Nio Hiong Boeng, 37
NIP, 14, 17
Nirwono Yudo, 54
Nur Jali, 34
Nyono, 20-21

O

OBM, 41
OBOR, 55
Oey Gee Hwat, 20
Omar Dhani, 58
OPPI, 25
ORB, 13
Orde Baru, 26, 62

P

P-4., 29-30, 31-31n
Palembang, 36-37, 43
Pangkal Pinang, 43
Partai Buruh Indonesia, 4, 7, 20
Partai Sosialis, 4, 7
Partai Sosialis Indonesia, 4, 48n
PBI, 20
PBI, 35
PBKA, 24
PBM, 35, 39-42, 51
PDKI, 24
Perancis, 60
Perbum, 34, 36, 38-39, 41, 46, 48-54, 55-55n, 58-64
perjuangan klas, 39

Dipindai dengan CamScanner

Perkabi, 27-27n, 28
Permigan, 54-58
Permina, 54
"Persatuan Buruh Minyak", 41
"Persatuan Kita", 34
Persatuan Pensiunan, 24
Pertamin, 54
PFB, 13
PGAS, 13
PGHB, 13
PGRI, 24, 27-27n, 28
PKB, 35
PKBT, 13
PKI, 1, 3-7, 50, 58, 61
Plaju, 1, 36, 43
PMP No. 90/1955., 32
PNI, 4, 6, 23n, 49
POB. 35
Politieke actie, 15
Pontianak, 43
PORBISI, 24, 27
Post Bond, 12
PPKB, 16
PPM. 36
PPPB, 13-14
Prabumulih, 36, 43
Prawirosugondo, 15
PSPN. 24, 32
PTMN, 7, 54-55

R

Raden Salam Faiman, 36
Rakhmat, 55
"Republik Soviet Indonesia", 7
Revolusioner, 15-16
Riphat, 37
RRC, 57-58

S

Saibun, 37
Sakirman, 6
Samboja, 43
Sanga-sanga, 35, 42n
Sanger, 37
SARBUMUSI, 23, 25, 26-26n, 27-27n, 28, 62
Sarekat Islam, 3, 13-14
Sarekat Merah, 3
Sarekat Rakyat, 3
Saribumi, 49
Sarjono, 55
SB, 32-33
SBG, 21
SBII, 22-23, 25, 48-49
SBKA, 21
SBM, 20-21, 35, 37, 39, 42, 54
SBMI, 38-39
SB-Minyak Pacific, 39
SBMSI, 60, 62
SB Pegadaian, 24
SBTMI, 35-35n, 39, 41-42
SBU, 37
SDAP, 3, 14
SEBDA, 21
SEBUMI, 37, 41
Sei Gerong, 1, 36
Sekber Buruh, 25, 26-26n
Semarang, 3, 16, 35, 43, 49, 60
Semaun, 3, 13n, 14, 16-16n, 17-18
sentralisme demokrasi, 39
Serbumi, 35, 39, 41
Serbumisi, 35-35n, 39, 41-42
Serbumit, 61
SERBUPRI, 21
Setiajid, 20
Shell, 54, 57-57n, 59-60
SI, *lihat* Sarekat Islam
Simanjuntak, Pieter, 37
"Sin Min Lao Kung Hui", 35
Sitompul, H., 36
Situmeang, R.P., 37-37n, 38-40
Skandinavia, 60
SKB, 34
SKBM, 34, 42, 48-48n, 52, 61
SKDN, 24
Slamet Wijaya, 40
Sneevliet, H.F.J.M., 3

Dipindai dengan CamScanner

SOBRI, 23, 25, 27
SOBSI, 4, 6, 20-26, 30, 32, 35, 37, 39-40, 49-50, 59, 61-62
Soegeng, 17
Soemodiharjo, 18
Soetadi, 17
SOKSI, 24-24n, 25
Solo, Sala, 6, 20, 22, 25
Sosrokardono, 14
Soviet, Uni Soviet, 4-6, 58
SPBT, 24
SS Bond, 12
SSDP, 24
SS PTT, 24, 27-27n, 28
Stanvac, 54, 59
Subakat, 15
Sudarsono, R., Kolonel, 58
Sudiarto, 35
Sudono, Mayor, 7
Sugiri, 40
Suhardi, R.P., 58
Suharto, 26-27
Sukarno, Bung Karno, 5, 7, 25
Sukiman Wiryosanjoyo, 22
Sulawesi, 37
Sumaryo Legowo, 17n, 51, 54-55, 56n, 56-57
Sumatra, 36
Suparjan, 37-38, 40
Suparto, 5
Surabaya, 1, 3, 14, 23, 35, 43, 49, 62
Suripno, 4-5
Suryanatakusuma, 26
Suryono, 20, 35
Suryopranoto, R.M., 14, 15-15n, 16-18
Sutan Assin, 58
Sutan Syahrir, 4
Sutomo, 12n
Sutrisno, 5
Suwardi Suryaningrat, 14-15, 17
Swandoro, 16
Swiss, 60
Syahbaruddin, A., 41
Syahran, H., 37
Syamsu Harya Hudaya, 20
Syndicalism, Anarcho, 12
Syurie, Moh., 35

T

Tanjung, 35, 43
Tan Ling Jie, 5-6
Tan Malaka, 3, 14, 18
Tan Siang Long, 41
Tarakan, 35, 43
Tejasukmana, 51-52
Tejomartoyo, 17
Tuku W. Basuki, 55
Trade Unionism, 11, 40
Trade Unionism, Social Democratic, 12
Trade Unionism, Tendential, 11

U

Undang-undang No. 22/1957., 31
Usup Munandar, 40

V

vakactie, 15
Vaksentral, 15-15n, 16, 32
VIP-BOW, 13
VSTP, 13, 18

W

Wahidin Sudirohusodo, 12n
Watung, M., 34
WFTU, 21-21n, 23n, 39
Widya Maladi Yusuf, R., 55
Wijaya Sastra, R.S., 40
Wilopo, 30
Wonokromo, 1, 43, 62

Dipindai dengan CamScanner

Y

Yogyakarta, 6, 16-18, 20, 25
Yusuf Wijayana, 37

Z

Zainal Arifin, 35

Dipindai dengan CamScanner

BIBLIOGRAFI

1. "Arbeidszaken N.V. De BPM Indonesia", 1 Januari 1953.
2. "Kongres ke-II Perbum", diterbitkan oleh Panitia Kongres ke-II Perbum, 1953.
3. Surat² Perbum kepada Direksi N.V. De BPM/PT Shell Indonesia.
4. Surat² SOBSI kepada Direksi N.V. De BPM/PT Shell Indonesia.
5. Surat² FBMI kepada Direksi N.V. De BPM Indonesia.
6. Surat² KABM kepada Direksi N.V. De BPM Indonesia, 1950 - 1951.
7. "Konstitusi SOBSI", diterbitkan oleh Dewan Nasional SOBSI, Jakarta 1955.
8. "Bintang Merah", Majalah teori dan politik Marxisme-Leninisme, Tahun ke-XX, Maret 1964.
9. "Bintang Merah", No. 1-3, Tahun VI/1950.
10. "Bintang Merah", No. 1-11, Tahun VII/1951.
11. Laporan tentang "Perbaikan Konstitusi dan Program BTI", diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat BTI.
12. "Soeara Boeroeh", Surat-kabar, Tahun 1947.
13. Sandra, "Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia", PT Pustaka Rakjat, Jakarta 1961.
14. "Masalah Gerakan Buruh Di Indonesia", Siaran Pengurus Besar GASBIINDO, Februari 1970.
15. "Sekitar G.30.S/PKI Dan Penghancurannya", Ringkasan Ceramah oleh Letkol Sunardi DM, Ketua Team Penerangan Kopkamtib.
16. "Tesis 45 Tahun PKI" — 23 Mei 1920 — 23 Mei 1965, Yayasan "Pembaruan", Jakarta 1965.
17. Aidit, D.N., "Jadilah Komunis Yang Baik Dan Lebih Baik Lagi", Yayasan "Pembaruan", Jakarta 1964.
18. Aidit, D.N., "Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia", Yayasan "Pembaruan", Jakarta 1957.
19. Aidit, D.N., "Kaum Tani mengganyang setan² desa", Jilid I, Yayasan "Pembaruan", Jakarta 1964.
20. Aidit, D.N., "Langit takkan runtuh", Yayasan "Pembaruan", Jakarta 1963.

Dipindai dengan CamScanner

pangkat dan jabatannya semua pejabat² yang berasal dari/ mewakili organisasi² Perbum/SOBSI dan GSBI".

39. Surat Menteri Urusan Migas No. 155/M/Migas/65 tgl. 3 Nopember 1965 tentang "Pemberhentian sementara pegawai² aktivis PKI".
40. Surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Pangsar KOGAM/No. 85/KOGAM/1966, tgl. 31 Mei 1966 tentang "Organisasi² Massa yang se-azas, bernaung, atau berlindung dibawah bekas PKI".
41. Instruksi Presiden/Pangti ABRI No. Instr. 09/KOGAM/5/66 tgl. 13 Mei 1966 tentang "Pedoman pelaksanaan penertiban/ pembersihan personil Aparatur Pemerintah/Negara".
42. Keputusan KOTI No. 233/Koti/1966 tgl. 12 Desember 1966 tentang "Daftar nama² Organisasi se-azas dengan PKI".
43. Keputusan DIRUT Permina No. Kpts/DP/328/1966 tgl. 12 Desember 1966 tentang "Pemberian hukuman administratip terhadap pegawai² yang terlibat G.30.S".
44. Instruksi Dirjen Migas No. 237/D.D/Migas/67 tgl. 22 Juli 1967 tentang "Kebijaksanaan dibidang administratip bagi pegawai² dilingkungan Ditjen Migas.
45. Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. Kep. 028/KOPKAM/10/1968 tgl. 18 Oktober 1968 tentang "Dasar Kebijaksanaan Penertiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/Negara".
46. Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan No. Kep. 010/KOPKAM/3/1969 tentang "Penyempurnaan Ketentuan Dalam Surat Keputusan Pangkopkamtib No. Kep. 028/KOPKAM/10/1968".
47. "Pokok Kebijaksanaan Team Screening Pusat Dalam Melaksanakan Tugasnya Pada Tahun 1969".
48. Surat-Keputusan Dirut Pertamina No. 1519/Kpts/DR/DU/1971 tgl. 15 Januari 1971 tentang "Ketentuan² Peninjauan Tindakan Administratip Terhadap Pegawai² Yang Berstatus Golongan C-2".

Dipindai dengan CamScanner

pangkat dan jabatannya semua pejabat² yang berasal dari/ mewakili organisasi² Perbum/SOBSI dan GSBI".

39. Surat Menteri Urusan Migas No. 155/M/Migas/65 tgl. 3 Nopember 1965 tentang "Pemberhentian sementara pegawai² aktivis PKI".
40. Surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Pangsar KOGAM/No. 85/KOGAM/1966, tgl. 31 Mei 1966 tentang "Organisasi² Massa yang se-azas, bernaung, atau berlindung dibawah bekas PKI".
41. Instruksi Presiden/Pangti ABRI No. Instr. 09/KOGAM/5/66 tgl. 13 Mei 1966 tentang "Pedoman pelaksanaan penertiban/ pembersihan personil Aparatur Pemerintah/Negara".
42. Keputusan KOTI No. 233/Koti/1966 tgl. 12 Desember 1966 tentang "Daftar nama² Organisasi se-azas dengan PKI".
43. Keputusan DIRUT Permina No. Kpts/DP/328/1966 tgl. 12 Desember 1966 tentang "Pemberian hukuman administratip terhadap pegawai² yang terlibat G.30.S".
44. Instruksi Dirjen Migas No. 237/D.D/Migas/67 tgl. 22 Juli 1967 tentang "Kebijaksanaan dibidang administratip bagi pegawai² dilingkungan Ditjen Migas.
45. Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. Kep. 028/KOPKAM/10/1968 tgl. 18 Oktober 1968 tentang "Dasar Kebijaksanaan Penertiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/Negara".
46. Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan No. Kep. 010/KOPKAM/3/1969 tentang "Penyempurnaan Ketentuan Dalam Surat Keputusan Pangkopkamtib No. Kep. 028/KOPKAM/10/1968".
47. "Pokok Kebijaksanaan Team Screening Pusat Dalam Melaksanakan Tugasnya Pada Tahun 1969".
48. Surat-Keputusan Dirut Pertamina No. 1519/Kpts/DR/DU/1971 tgl. 15 Januari 1971 tentang "Ketentuan² Peninjauan Tindakan Administratip Terhadap Pegawai² Yang Berstatus Golongan C-2".

Dipindai dengan CamScanner